



KEMANTAN RI



**LAPORAN KINERJA (LKj)
DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TA. 2022**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022. Laporan Kinerja ini mencakup ikhtisar pencapaian Sasaran Program sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 disusun mengacu Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kita semua berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 untuk terwujudnya *good governance*.

Jakarta, 15 Februari 2023

Direktur Jenderal,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nasrullah', written over a horizontal line.

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT IV**

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon / Fax. 021 - 78831856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 10 Februari 2023

Inspektur IV

drh. IGMN. Kuswandana, M.M
NIP. 196604081994031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4 Sumber Daya Manusia	7
1.5 Dukungan Anggaran	8
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	22
3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2022	22
3.3 Kinerja Lainnya	92
3.4 Akuntabilitas Keuangan	93
IV. PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2022 Per Kewenangan Per Jenis Belanja	8
Tabel 2.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2022 Per Kegiatan	8
Tabel 3.	Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Ditjen PKH.....	14
Tabel 4.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024.....	18
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2022	20
Tabel 6.	Rincian Output (RO) Ditjen PKH TA. 2022	21
Tabel 7.	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	24
Tabel 8.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Daging.....	26
Tabel 9.	Pertumbuhan produksi daging pada Tahun 2021-2022.....	26
Tabel 10.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	30
Tabel 11.	Penyaluran KUR untuk Usaha Peternakan Tahun 2020-2022.....	31
Tabel 12.	Realisasi Akad Kredit dan Jumlah Debitur SubSektor Peternakan Tahun 2021-2022.....	32
Tabel 13.	Perkembangan Realisasi Investasi SubSektor Peternakan Tahun 2020-2022.....	32
Tabel 14.	Perkembangan Realisasi Investasi SubSektor Peternakan per Bidang Usaha Tahun 2020-2022	33
Tabel 15.	Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Peternak Tahun 2022.....	35
Tabel 16.	Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2022	35
Tabel 17.	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas Tahun 2022.....	36
Tabel 18.	Distribusi Benih Tanaman Pakan ternak (TPT) oleh UPT Pusat Tahun 2022.....	37
Tabel 19.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Susu	38
Tabel 20.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	40
Tabel 21.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Telur	43
Tabel 22.	Capaian Produksi Telur Tahun 2021-2022	43
Tabel 23.	Kegiatan Pendukung IKU 3 Tahun 2022	44
Tabel 24.	Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan.....	47
Tabel 25.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	49
Tabel 26.	Capaian Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis.....	51
Tabel 27.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	52
Tabel 28.	Hasil Perhitungan Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS.....	55
Tabel 29.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	58

Tabel 30.	Hasil perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	60
Tabel 31.	Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	60
Tabel 32.	Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet.....	61
Tabel 33.	Perhitungan Parameter Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet....	63
Tabel 34.	Penghitungan Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium Keswan	64
Tabel 35.	Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak.....	65
Tabel 36.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	66
Tabel 37.	Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.....	68
Tabel 38.	Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	68
Tabel 39.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	70
Tabel 40.	Realisasi Capaian IKU Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	72
Tabel 41.	Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022	72
Tabel 42.	Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020-2022	73
Tabel 43.	Capaian Nilai Ekspor Pertanian Tahun 2022.....	74
Tabel 44.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	76
Tabel 45.	Realisasi Capaian IKU Nilai PMPRB Ditjen PKH Tahun 2022	80
Tabel 46.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	84
Tabel 47.	Realisasi Capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH Tahun 2022	87
Tabel 48.	Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022.....	90
Tabel 49.	Pergeseran/Realokasi Belanja Pegawai Tahun 2022.....	99
Tabel 50.	Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022.....	102

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi SDM Ditjen PKH	7
Grafik 2.	Kinerja SIKOMANDAN Tahun 2020-2022.....	30
Grafik 3.	Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2022.....	48
Grafik 4.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022	73
Grafik 5.	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan Tahun 2022	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Capaian Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2022.....	87
Gambar 2.	Penghargaan Predikat WBBM Tahun 2022.....	92
Gambar 3.	Penghargaan Predikat Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2021.....	92
Gambar 4.	Penghargaan Predikat SNI Award 2022 Peringkat Perak Kategori Organisasi Kecil Barang.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022.....	107
Lampiran 2.	Data Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022.....	107
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022.....	110
Lampiran 4.	Tabel Produksi Daging, Telur, dan Susu Tahun 2018-2022	113
Lampiran 5.	Tabel Populasi Ternak Tahun 2018-2022.....	113
Lampiran 6.	Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2022.....	114
Lampiran 7.	Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit <i>Rabies</i> dan <i>Anthrax</i> Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Kasus Tahun 2021	117
Lampiran 8.	Status Kesehatan Hewan Per Provinsi Tahun 2022.....	118
Lampiran 9.	Rincian Surveillans PHMS Tahun 2022 pada UPT Veteriner Lingkup Ditjen PKH.....	120
Lampiran 10.	Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	121
Lampiran 11.	Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.....	122
Lampiran 12.	Data Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017-2021.....	123
Lampiran 13.	Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen PKH Tahun 2022.....	124
Lampiran 14.	Rincian NSPK Lingkup Ditjen PKH Tahun 2022	125
Lampiran 15.	Manual IKU Ditjen PKH Tahun 2020-2024.....	126
Lampiran 16.	SK Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022.....	127
Lampiran 17.	Standar Operasional Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Program dan/atau Kegiatan Ditjen PKH TA. 2022.....	128

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tahun 2020-2024 telah memasuki tahun ketiga. Pada tahun 2022 ini, Ditjen PKH masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak, pertumbuhan ekspor, terjaminnya mutu pangan asal ternak, kemanfaatan sarana produksi, luas wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terkendalnya kasus *zoonosis* pada manusia, terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, serta terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Upaya yang telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah dari dana APBN dan Non APBN.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas “Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan” yang diwujudkan dalam tiga Program yaitu (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta (3) Program Dukungan Manajemen.

Dalam program yang dilaksanakan, terdapat Indikator Kinerja Program yang dijabarkan menjadi 11 (sebelas) indikator yaitu: (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH.

Pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PKH selalu dilaksanakan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Capaian Sasaran Program Ditjen PKH tahun 2022 adalah **sangat berhasil** yang diperoleh dari Capaian Sasaran Strategis antara 100% sampai 676%, dengan rincian Indikator Kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis*; (6) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (8) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (9) Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (10) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan Indikator Kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen PKH tahun 2022 sebesar Rp4.254.915.296.000 dengan realisasi Rp3.784.355.403.725 atau mencapai 88,94%. Terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar 11,06% disebabkan: 1) Realisasi BOP vaksinasi PMK serta Penandaan dan Pendataan Ternak yang tidak terealisasi maksimal, serta 2) Pengadaan impor sapi indukan yang tidak terealisasi.

Ditjen PKH terus melakukan berbagai terobosan sebagai upaya mendorong peningkatan produksi komoditas peternakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, antara lain:

1. Menyusun kegiatan “Desa Korporasi Sapi” pada lokasi sentra sebagai solusi percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau dalam negeri sekaligus memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
2. Mendorong pembiayaan yang bersumber NonAPBN antara lain: kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
4. Penambahan bibit sapi indukan melalui impor untuk meningkatkan jumlah induk dalam negeri.
5. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
6. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kot

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditjen PKH memiliki Tugas “Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan” sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kinerja Ditjen PKH diukur dari aspek teknis yang meliputi capaian populasi dan produksi komoditas peternakan serta kinerja pendukungnya. Selanjutnya dari aspek Makro Ekonomi yang meliputi kinerja Produk Domestik Bruto (PDB), investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta proksi kesejahteraan peternak melalui Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) dan Nilai Tukar Usaha Petani Peternak (NTUPT).

Kinerja Makro Ekonomi selama tahun 2020-2022 menunjukkan PDB Subsektor Peternakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB Sektor Pertanian. Hal ini menandakan bahwa Subsektor Peternakan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan Sektor Pertanian. Capaian PDB Subsektor Peternakan tahun 2020 sebesar Rp167.116,4 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp167.647,3 miliar atau meningkat 0,32% (*c to c*), selanjutnya tahun 2022 sebesar Rp178.100,6 miliar atau meningkat 6,24% (*c to c*). Capaian PDB Sektor Pertanian tahun 2020 sebesar Rp1.061.087,3 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp1.072.977,7 miliar atau meningkat 1,12% (*c to c*), dan tahun 2022 sebesar Rp1.097.952,3 miliar atau meningkat 2,33% (*c to c*).

Investasi PMDN Subsektor Peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2020-2022, yaitu pada tahun 2022 dari sebesar Rp2.283,5 miliar menjadi Rp2.591,5 miliar (TW I-III) atau secara kumulatif meningkat Rp308,1 miliar. NTPT tahun 2022 sebesar 101,24 atau naik 3,22% dari NTPT 2020 sebesar 98,08, sementara NTUPT tahun 2022 sebesar 101,57 atau naik 3,79% dari NTUPT tahun 2020 sebesar 97,87.

Kinerja populasi ternak periode tahun 2020-2022 diperoleh rata-rata pertumbuhan positif yaitu ayam ras petelur sebesar 4,96%, ayam ras pedaging 4,31%, puyuh 4,06%, sapi potong 3,16%, sapi perah sebesar 2,17%, kelinci 2,15%, kambing 1,88%, itik 1,69%, ayam buras 1,41%, kuda 1,34%, itik manila 0,92%, dan kerbau 0,70%. Sementara populasi ternak yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif adalah domba sebesar 5,45% dan babi 2,20%.

Kinerja produksi daging periode tahun 2020-2022 diperoleh rata-rata pertumbuhan positif yaitu, daging ayam ras pedaging sebesar 8,58%, kerbau 6,87%, ayam ras petelur 5,68%, sapi 4,93%, kuda 3,77%, kelinci 3,12%, itik 2,84%, kambing 1,68%, ayam buras 0,97%, dan domba 0,68%. Sedangkan yang memperoleh rata-rata pertumbuhan negatif adalah

daging puyuh sebesar 8,72%, itik manila 6,51%, dan babi 3,27%. Selanjutnya, kinerja produksi telur tahun 2020-2022 diperoleh rata-rata pertumbuhan positif yaitu telur ayam ras petelur 4,12%, puyuh 2,32%, ayam buras 2,26%, itik 0,91%, dan itik manila 0,52%, serta kinerja produksi susu tahun 2020-2022 diperoleh rata-rata pertumbuhan positif sebesar 1,17%.

Kinerja Produksi tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu produksi daging sebesar 4.725,80 ribu ton atau 106,09% dari target 4.454,33 ribu ton dan produksi telur sebesar 6.322,55 ribu ton atau 100,78% dari target 6.273,86 ribu ton.

Konsumsi daging apabila disetarakan dengan protein selama 2020-2022 menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun terjadi peningkatan pada kurun waktu tahun 2020 ke tahun 2022. Pada tahun 2020 sebesar 4,05 gram/kapita/hari menjadi 4,79 gram/kapita/hari pada tahun 2022. Namun, protein dari telur dan susu mengalami penurunan dari 3,47 gram/kapita/hari pada tahun 2020 menjadi 3,37 gram/kapita/hari di tahun 2022.

Sampai dengan saat ini, Ditjen PKH masih menghadapi tantangan terkait: (1) Produksi daging sapi di dalam negeri belum mencukupi, sehingga diperlukan impor dalam bentuk daging sapi beku dan sapi bakalan; (2) Pengembangan sapi potong masih terkendala belum banyak pengembangan budidaya berskala ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap percepatan capaian produksi daging sapi/kerbau untuk memenuhi kebutuhan nasional; (3) Permasalahan stabilitas harga daging ayam ras *livebird* karena *oversupply*; (4) Kelembagaan yang terkait efektivitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan dan asuransi; (5) Kemampuan Sumber Daya Manusia; (6) Infrastruktur berupa kualitas Rumah Potong Hewan (RPH) dan sarana transportasi; (7) Persaingan dan liberalisasi pasar; (8) Ketergantungan sarana produksi dari impor; serta (9) Munculnya penyakit eksotik, antara lain Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *African Swine Fever* (ASF), dan *Lumpy Skin Disease* (LSD).

Menjawab tantangan tersebut, Ditjen PKH melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan (3) Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelaksanaan program/kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selama tahun 2022 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Pertanian.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Ditjen PKH didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, dengan rincian dan tugas sebagai berikut:

1. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak, dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan serta pendaftaran pakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak; dan
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak; dan
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
2. Direktorat Pakan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan, dengan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.
3. Direktorat Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, dengan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan

- hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
4. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dengan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang *hygiene sanitasi* dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dengan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
6. Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2022 disajikan pada Lampiran 1.

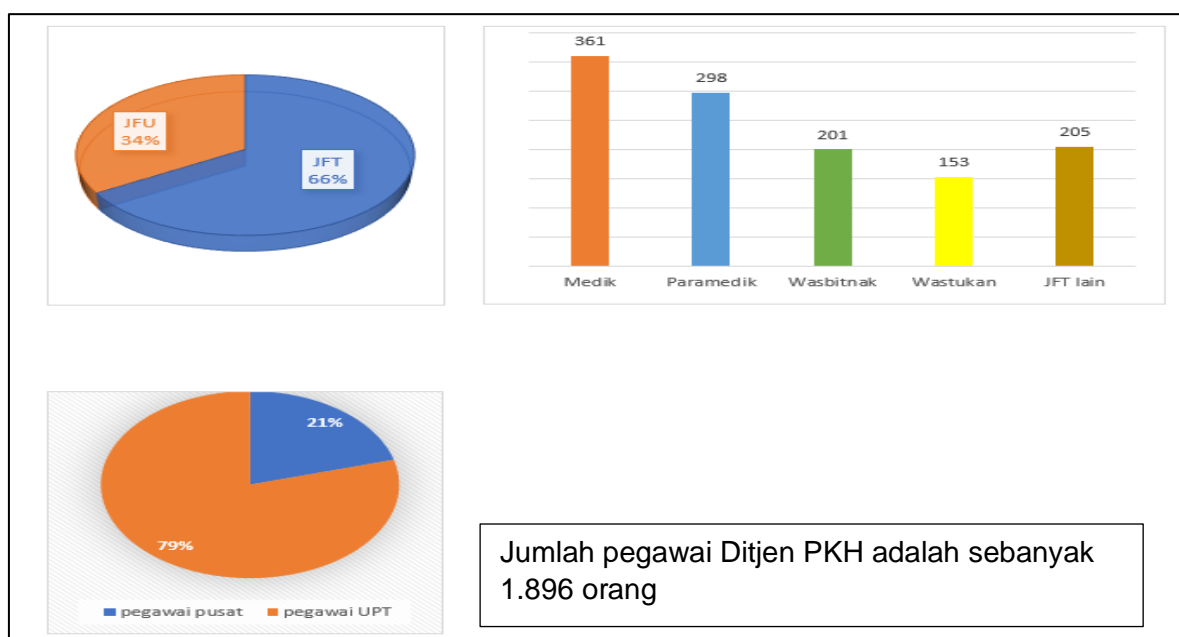
1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sampai dengan Desember 2022, jumlah SDM sebanyak 1.896 orang, yang terdiri dari:

1. Pegawai di Kantor Pusat dan Unit Pelayanan Teknis (UPT):
 - a. Jumlah pegawai Kantor Pusat sebanyak 392 orang yang terdiri dari Sekretariat Ditjen sebanyak 121 orang; Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 61 orang; Direktorat Pakan sebanyak 45 orang; Direktorat Kesehatan

Hewan sebanyak 71 orang; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 44 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 50 orang.

- b. Jumlah pegawai UPT sebanyak 1.504 orang yang tersebar pada 23 UPT.
2. Jumlah pegawai menurut golongan: Gol IV sebanyak 325 orang; Gol III sebanyak 1161 orang; Gol II sebanyak 395 orang; dan Gol I sebanyak 15 orang.
3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 23 orang; S-2 sebanyak 541 orang; S-1/D4 sebanyak 509 orang; Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 283 orang; SLTA sebanyak 483 orang; SLTP sebanyak 32 orang; dan SD sebanyak 25 orang.
4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 1.082 orang dan perempuan sebanyak 814 orang.
5. Jumlah pegawai menurut kelas jabatan: Medik Veteriner sebanyak 361 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 298 orang; Pengawas Mutu Pakan sebanyak 153 orang; Pengawas Bibit Ternak sebanyak 201 orang; JFT lainnya sebanyak 205 orang; JFU sebanyak 623 orang; dan Struktural sebanyak 55 orang.



Sumber: Ditjen PKH, 2022

Grafik 1. Komposisi Ditjen PKH Tahun 2022

1.5 Dukungan Anggaran

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2022, Ditjen PKH memperoleh alokasi APBN sebesar Rp4.254.915.296.000,00 dengan bobot anggaran terbesar berdasarkan kewenangan terdapat pada Satker Pusat sebesar Rp2.046.077.695,00 (48,09%). Sedangkan berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp3.897.185.246.000,00 (91,59%), dan berdasarkan jenis kegiatan bobot terbesar pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp2.475.479.506.000,00 (58,18%).

Tabel 1. Anggaran Ditjen PKH TA. 2022 Per Kewenangan Per Jenis Belanja

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Kantor Pusat	28.947.758.000	1.996.567.708.000	20.562.229.000	2.046.077.695.000
2	Kantor Daerah	110.374.973.000	833.931.197.000	197.845.090.000	1.142.151.260.000
3	Tugas Pembantuan	-	1.066.686.341.000	-	1.066.686.341.000
	Total	139.322.731.000	3.897.185.246.000	218.407.319.000	4.254.915.296.000
	Proporsi	3,27%	91,59%	5,13%	100%

Sumber: DIPA Ditjen PKH, 2022

Tabel 2. Anggaran Ditjen PKH TA. 2022 Per Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Proporsi
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	134.028.982.000	3,15%
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	2.475.479.506.000	58,18%
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1.252.518.395.000	29,44%
4	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	42.205.789.000	0,99%
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	324.201.683.000	7,62%
6	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	26.480.941.000	0,62%
	Total	4.254.915.296.000	100%

Sumber: DIPA Ditjen PKH, 2022

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam melaksanakan visi dan misi tahun 2022, Ditjen PKH mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yang telah mengalami revisi kedua pada 29 Oktober 2021 dengan menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian.

Visi

Mengacu visi Kementerian Pertanian yaitu “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Ditjen PKH merumuskan visi:

“Terwujudnya Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”

Misi

Untuk mewujudkan visinya, Ditjen PKH merumuskan misi organisasi yang tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Benih/Bibit dan Produksi Ternak yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan Ketersediaan Pakan yang Berkualitas secara Berkelanjutan

Pakan merupakan komponen terbesar dalam peternakan, baik usaha pembibitan, pengembangbiakan, maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan, dapat menggunakan bahan pakan lokal maupun *biomassa* ikutan dari hasil tanaman yang ada di sekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian, dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. **Mewujudkan Kesehatan Hewan dalam rangka Meningkatkan Produktivitas Ternak dan Mendukung Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk, disamping itu juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penguatan kesehatan hewan adalah pengembangan kesehatan hewan sebagai bagian dari pembangunan pertanian melalui pencegahan penyakit *zoonosis* serta bagian dari kesehatan lingkungan melalui kelestarian hewan dan lingkungannya.

Untuk mencapai produktivitas ternak secara optimal hanya dapat terpenuhi jika status dan kondisi kesehatan hewan dalam keadaan yang baik. Salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan peternakan adalah melalui evaluasi peningkatan produktivitas ternak serta kinerjanya.

Di sisi lain, resistensi antimikroba saat ini berkembang menjadi isu global yang dibahas dalam berbagai forum internasional, dan dipandang sebagai salah satu ancaman yang serius untuk ditangani bersama. Untuk mengoptimalkan dan mengurangi resistensi antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka penatagunaan antimikroba harus diterapkan untuk meningkatkan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, penatagunaan antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan program terkoordinasi yang mempromosikan penggunaan antimikroba yang tepat dan sesuai aturan, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, mengurangi resistensi mikroba dan mencegah penyebaran infeksi yang disebabkan oleh organisme yang resistan terhadap berbagai jenis antimikroba (termasuk antibiotik dan *antiprotozoa*).

4. **Meningkatkan Keamanan dan Mutu Produk Hewan serta Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan, serta pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan Usaha Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan Berdaya Saing

Potensi komoditas dan produk unggulan Subsektor Peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Daya saing subsektor peternakan merupakan kemampuan menghasilkan komoditas yang memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit pembiayaan usaha, asuransi ternak, pengembangan investasi, diseminasi teknologi tepat guna dan penyuluhan, penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, pengembangan standar mutu dan penerapan tata cara pengolahan hasil peternakan yang baik, sertifikasi dan ijin edar produk, perbaikan sistem logistik, pengembangan informasi, serta pengembangan pasar domestik dan internasional).

6. Menerapkan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Ditjen PKH Profesional dan Modern

Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan Reformasi Birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik dalam mewujudkan *good governance*.

Misi Ditjen PKH tersebut diatas sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan

Tujuan Program/Kegiatan Pembangunan Ditjen PKH periode 2020-2024 mencakup:

1. Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Peningkatan Produksi Ternak yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi, sehingga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumber daya lokal harus diwujudkan dengan baik. Upaya penyediaan benih/bibit ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan secara teknis maupun manajerial. Penerapan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) pada peternak/kelompok peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, serta mendukung peningkatan daya saing ekspor.

2. Tersedianya Pakan Berkualitas dan Berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting dalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci sistem produksi yang efisien dan berdaya saing. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan lokal termasuk biomassa ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan dalam menunjang peningkatan produksi.

3. Meningkatnya Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah, maupun antar negara harus selalu ditingkatkan. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan di suatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis, dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Nasional

Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*, serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. Tersedianya Produk Peternakan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

Produk peternakan bernilai tambah diperoleh dari upaya pengolahan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar; termasuk di dalamnya praktek peternakan organik. Produk peternakan berdaya saing diperoleh dengan efisiensi produksi baik budidaya maupun pascapanen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi, serta kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk peternakan. Untuk itu, perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, aspek distribusi dan pemasaran memegang peran yang penting dalam peningkatan daya saing produk.

Selain untuk memenuhi pasar domestik dengan penyediaan produk peternakan yang berkualitas dan terjangkau dari aspek harga maupun ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ekspor juga merupakan prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan produk berdaya saing sesuai kebutuhan pasar internasional, dan didukung dengan pengembangan pemasaran dan kerjasama internasional.

Beberapa upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan ijin edar, pelayanan informasi pasar, serta peningkatan efisiensi produksi dengan fasilitasi pembiayaan untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan kemitraan usaha.

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Upaya mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, terdapat perbaikan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang menyangkut aspek manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan.

Tujuan dan indikatornya merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tujuan dan indikator tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Ditjen PKH

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya Produk Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit dan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Tersedianya benih/bibit ternak berkualitas dan berkesinambungan	1. a. Jumlah benih/bibit ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat) b. Jumlah produksi ternak (ekor)
	2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan pakan secara berkelanjutan	2. Tersedianya pakan berkualitas, aman, dan berkelanjutan	2. Indeks ketersediaan pakan berkualitas dan aman (indeks)
	3. Menyelenggarakan kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kesehatan hewan	3. Status Kesehatan Hewan (%)
	4. Menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan daya saing produk hewan dan kesehatan masyarakat	4. Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Nasional	4. Jumlah unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Unit Usaha)
			5. Jumlah produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Sertifikat Veteriner)
			6. Jumlah maksimal kasus <i>zoonosis</i> yang terjadi penularan dari hewan ke manusia (kasus)
	5. Meningkatkan pengolahan, dan pemasaran produk peternakan berdaya saing	5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	7. Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton)
			8. Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif
	6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional	6. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai roadmap RB Kementan	9. Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (indeks)

Sumber: Renstra Revisi 2 Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Sasaran

Berdasarkan tugas dan kewenangan, Ditjen PKH memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dicapai melalui 3 (tiga) Program dari 5 (lima) Program Kementan, yaitu:

- i) SS 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
- ii) SS 2 : Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
- iii) SS 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian.
- iv) SS 6 : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel.

Program

Adapun rincian Program dan Sasaran Program disampaikan sebagai berikut:

A. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Sasaran Program:

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Asal Ternak

Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu.

2. Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan

Kinerja keamanan pangan diukur berdasarkan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya persentase keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

3. Termanfaatkannya Sarana Pertanian sesuai dengan Kebutuhan

Indikator kinerja sasaran program ini diukur dari tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan sarana prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

4. Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Indikator kinerja sasaran program ini adalah Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

5. Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis

Indikator kinerja sasaran program ini adalah Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

B. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan Sasaran Program:

1. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian

Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri yang merupakan hasil seluruh kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah sektor pertanian terbesar ada pada agroindustri. Menciptakan nilai tambah dapat dilakukan melalui penguasaan teknologi. Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

C. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program:

1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator kinerja sasaran program diukur dari seberapa jauh nilai PMPRB Ditjen PKH. Pencapaian nilai RB dengan sasaran program mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan.

2. Terkelolanya Anggaran Ditjen PKH yang AkunTabel dan Berkualitas

Sasaran program terkelolanya anggaran yang akunTabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Ditjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai penjabaran arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementan Tahun 2020-2024, Kebijakan Ditjen PKH diarahkan mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Peternakan yang Sesuai dengan *Good Breeding Practices (GBP)* dan *Good Farming Practices (GFP)*

GBP dan GFP adalah pelaksanaan usaha peternakan di bidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. GBP dan GFP meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit dan ternak; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan benih/bibit dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dapat dicapai melalui daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan nilai tambah produk peternakan melalui pengolahan hasil peternakan dan pengembangan peternakan organik.
- b. Peningkatan daya saing produk peternakan melalui pengembangan investasi, kemitraan, kelembagaan peternak, fasilitasi prasarana dan sarana pemasaran hasil peternakan, promosi peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri serta pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

3. Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan *higiene* dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana yang berdampak pada hewan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan AkunTabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akunTabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PKH dilakukan berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional terdapat 8 (delapan) area

perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen PKH dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Kementan yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen PKH untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sesuai dokumen Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama Ditjen PKH Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program		Indikator	Satuan	Target				
					2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,85	1,20	1,24	1,28
			2	Peningkatan produksi susu	%	0,55	0,61	0,71	0,85
			3	Peningkatan produksi telur	%	2,15	2,16	2,16	2,16
	SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	85,20	85,50	85,70	86,00
	SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis	5	Persentase wilayah yang terkendali zoonosis	%	74,00	74,50	75,00	76,00
	SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80,50	80,50	81,00	81,00
	SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan	%	91,25	92,25	93,50	94,50

Program	Sasaran Program		Indikator	Satuan	Target				
					2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	87,00	90,00	92,00	95,00
	SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	15,00	20,00	25,00	30,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	33,50	34,00	35,50
	SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	88,93	90,32	90,85

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II

Pada Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II, khususnya untuk target Peningkatan Produksi Daging tahun 2022 adalah sebesar 1,2%, Peningkatan Produksi Telur sebesar 2,16%, Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis sebesar 80,5%, serta Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 20%. Sementara pada Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PKH Tahun 2022 target Peningkatan Produksi Daging tahun 2022 adalah sebesar 7,92%, Peningkatan Produksi Telur sebesar 6,46%, Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis sebesar 80%, serta Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 2%. Hal ini disebabkan adanya perubahan target, sementara pada Renstra Kementan dan Renstra Ditjen PKH belum dilakukan revisi target keempat IKU di atas.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Dirjen PKH Tahun 2022 sesuai dengan revisi terakhir bulan Desember 2022 terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu: (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Nilai PMPRB Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran

Ditjen PKH. Selengkapnya target indikator kinerja Perjanjian Kinerja Dirjen PKH Tahun 2022 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target 2022
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	7,92
		2	Peningkatan Produksi Susu	%	0,61
		3	Peningkatan Produksi Telur	%	6,46
SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	%	85,50
SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus <i>zoonosis</i>	5	Persentase Wilayah yang Terkendali <i>Zoonosis</i>	%	74,50
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,00
SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	92,25
SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	90,00
SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	2,00
SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	33,50
SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akurat dan berkualitas	11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,93

Perjanjian Kinerja Dirjen PKH dengan Menteri Pertanian Tahun 2022 disampaikan pada Lampiran 3. Untuk mencapai Sasaran Program tersebut, pada tahun 2022 Ditjen PKH melaksanakan beberapa kegiatan sesuai pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian Output (RO) Ditjen PKH TA. 2022

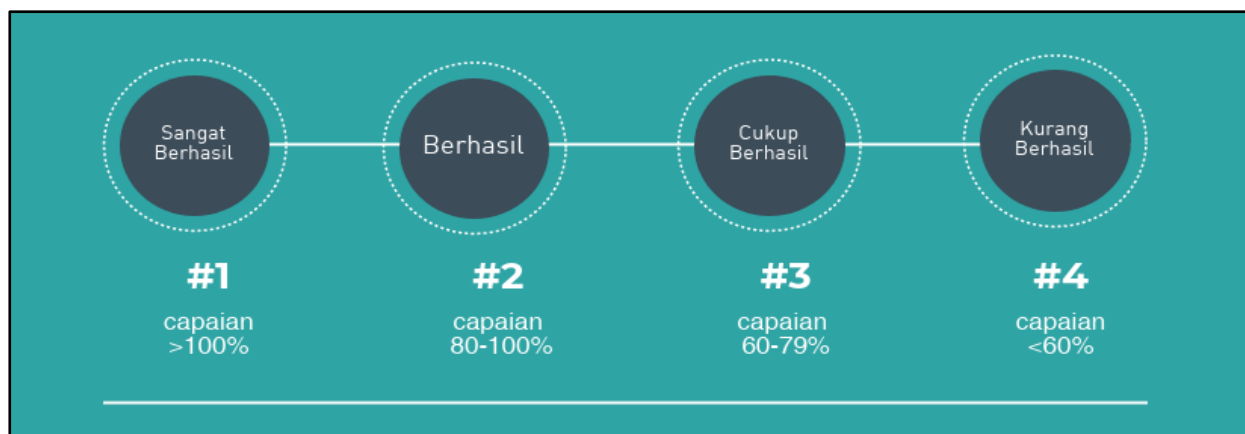
NO	URAIAN	Pagu (Rp)
1	1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	5.526.162.000
2	1783.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	1.598.168.000
3	1783.QEG.001 Hijauan Pakan Ternak (PEN)	30.852.086.000
4	1783.QEG.002 Pakan Olahan dan bahan pakan (PEN)	79.714.324.000
5	1783.QJA.001 Mutu dan Keamanan Pakan	16.338.242.000
6	1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	2.074.900.000
7	1784.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	36.272.453.000
8	1784.BEL.001 Ternak Yang Diganti/Diberikan Bantuan (PEN)	169.250.198.000
9	1784.QAH.001 Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN)	1.980.199.175.000
10	1784.QAH.002 Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik (PEN)	27.638.185.000
11	1784.QJA.001 Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	9.000.000.000
12	1784.QJC.001 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (PEN)	242.020.659.000
13	1784.RAG.001 Sarana Bidang Kesehatan Hewan	9.023.936.000
14	1785.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	15.266.520.000
15	1785.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	46.299.588.000
16	1785.CAG.005 Ternak Yang Didata dan Ditandai (PEN)	397.643.666.000
17	1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul (PEN)	69.326.123.000
18	1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (PEN)	70.879.123.000
19	1785.QEL.001 Optimalisasi Reproduksi (PEN)	198.694.350.000
20	1785.QEL.002 Ternak Ruminansia Perah (PEN)	5.419.000.000
21	1785.QEL.003 Ternak Ruminansia Potong (PEN)	267.751.852.000
22	1785.QEL.004 Ternak Unggas dan Aneka Ternak (PEN)	57.056.521.000
23	1785.RAG.001 Sarana Balai Perbibitan Ternak	24.383.202.000
24	1785.RAG.002 SBSN Bull Center Indrapuri	448.450.000
25	1785.RAG.003 SBSN Sarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala	10.430.748.000
26	1785.RAG.004 SBSN Sarana Sentra Unit Pembibitan Ternak Kerbau Nasional Siborongborong	2.002.042.000
27	1785.RBK.003 SBSN Prasarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala	53.919.252.000
28	1785.RBK.004 SBSN Prasarana Sentra Unit Pembibitan Ternak Kerbau Nasional Siborong-Borong	32.997.958.000
29	1786.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.596.755.000
30	1786.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.488.000.000
31	1786.PDF.001 Sertifikasi Unit Usaha	10.418.855.000
32	1786.QDC.001 Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	959.190.000
33	1786.QJA.001 Keamanan dan Mutu Produk Hewan	17.854.643.000
34	1786.RAG.001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.541.296.000
35	1786.RBK.001 Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	347.050.000
36	1787.EBA.956 Layanan BMN	4.951.836.000
37	1787.EBA.957 Layanan Hukum	3.500.000.000
38	1787.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	30.118.407.000
39	1787.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.800.000.000
40	1787.EBA.962 Layanan Umum	7.700.000.000
41	1787.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.503.940.000
42	1787.EBA.994 Layanan Perkantoran	239.448.383.000
43	1787.EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.305.779.000
44	1787.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	15.127.918.000
45	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.132.353.000
46	1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	10.613.067.000
47	5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	9.510.941.000
48	5891.AFA.001 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1.363.650.000
49	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	7.742.024.000
50	5891.RAG.001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3.939.872.000
51	5891.RBK.001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3.924.454.000
	JUMLAH	4.254.915.296.000

Sumber: SATUDJA, 2022

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

Untuk mengukur Capaian Kinerja Ditjen PKH menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap Sasaran Program yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Ditjen PKH tahun 2022 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Program tahun 2022 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*:



Evaluasi kinerja Ditjen PKH tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2022 dengan kinerja tahun sebelumnya, terhadap target akhir Jangka Menengah, serta terhadap target Kementerian Pertanian dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi target, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta upaya perbaikan di tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2022

Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Revisi II) memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang diukur melalui *maximize target* yaitu: 1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); 2) Peningkatan Produksi Susu; 3) Peningkatan Produksi Telur; 4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; 5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*; 6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; 7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8) Tingkat Kemanfaatan Sarana

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Nilai PMPRB Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH.

Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 22/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$\text{NE} = 50\% + (E/20 \times 50)$ <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>*Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal dicapai K/L dalam formula efisiensi -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
--	--

Pencapaian kinerja Ditjen PKH tahun 2022 selengkapnya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Sasaran Program Ditjen PKH Tahun 2022

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	7,92	14,50	183,08	Sangat Berhasil
		2	Peningkatan Produksi Susu	%	0,61	2,39	391,80	Sangat Berhasil
		3	Peningkatan Produksi Telur	%	6,46	7,28	112,69	Sangat Berhasil
SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	%	85,50	94,00	109,94	Sangat Berhasil
SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus <i>zoonosis</i>	5	Persentase Wilayah yang Terkendali <i>Zoonosis</i>	%	74,50	83,83	112,52	Sangat Berhasil
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis	%	80,00	80,00	100,00	Berhasil
SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	92,25	95,86	103,91	Sangat Berhasil
SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	90,00	90,20	100,22	Sangat Berhasil
SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	2,00	13,52	676,00	Sangat Berhasil
SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	33,50	35,73	106,66	Sangat Berhasil
SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,93	90,51	101,77	Sangat Berhasil

Sumber: 1) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2022; 2) Data Ditjen PKH 2022

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 7 disimpulkan pencapaian kinerja Ditjen PKH Tahun 2022 sebesar 190,78 (**sangat berhasil**). Hal ini merupakan hasil kerja keras dan wujud komitmen pimpinan serta jajaran Ditjen PKH dalam peningkatan kinerja yang dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Ditjen PKH tahun 2022. Capaian Indikator Kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis*; (6) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (8) Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (9) Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (10) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian Indikator Kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis.

Analisis capaian Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Program sebagai berikut:

Sasaran Program 1 (SP1) **MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN ASAL TERNAK**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan produksi daging sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan Sasaran Strategis (SS) yaitu Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri melalui Subsektor Peternakan dengan target Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) adalah Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik).

SP1. IKU1	
Peningkatan Produksi Daging	
(Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)	
Target	Realisasi
7,92%	14,50%
% Capaian	
183,08% (Sangat Berhasil)	

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) terhadap target tahun 2022.

Cara perhitungan Pertumbuhan Produksi Daging adalah akumulasi produksi daging pada tahun berjalan (A^t) ($t=2022$) dikurangi akumulasi produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2021$), dibagi dengan akumulasi produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2021$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci peningkatan produksi daging 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil perhitungan IKU Peningkatan Produksi Daging dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Daging

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022*	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	0,40	0,85	7,92	1,24	1,28	183,08	259,39	10.357,14	1.132,81
Realisasi IKSP (%)	0,14	5,59	14,50	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) tahun 2022 dalam bentuk *meatyield* sebesar 4.725,80 ribu ton atau mencapai 106,09% dari target produksi sebesar 4.454,33 ribu ton dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pertumbuhan Produksi Daging pada Tahun 2021-2022*

No.	Jenis Daging	2021			2022*			% pertumbuhan realisasi 2021-2022
		Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	
1	Sapi	403.309	365.510	90,63	373.771	373.843	100,02	2,28
2	Kerbau	22.671	14.193	62,61	14.322	15.825	110,50	11,50
3	Kambing	50.469	40.515	80,28	41.568	43.180	103,88	6,58
4	Domba	48.966	34.670	70,80	34.719	37.370	107,64	7,79
5	Babi	162.782	175.997	108,12	177.141	177.286	100,08	0,73
6	Ayam Buras	297.910	269.799	90,56	273.118	275.416	100,84	2,08
7	Ayam Ras Pedaging	3.509.945	3.185.698	90,76	3.497.897	3.765.573	107,65	18,20
8	Itik	40.609	41.021	101,02	41.792	37.309	89,27	(9,05)
Total		4.536.659	4.127.404	90,98	4.454.328	4.725.802	106,09	14,50

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Keterangan: *) Angka Sementara (dalam *meatyield*)

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging sebesar 14,50%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2022 sebesar 7,92%, maka diperoleh capaian peningkatan produksi daging sebesar 183,08% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging adalah 14,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 5,59%, maka diperoleh capaian sebesar 259,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,14%, maka diperoleh capaian sebesar 10.357,14%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) tahun 2022 sebesar 14,50%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 1,28%, maka saat ini sudah mencapai 1.132,81% karena target tersebut masih mengacu pada Renstra Ditjen PKH 2020-2024 Revisi II.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2020-2024 dalam Kegiatan Prioritas 2, yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Laut Secara Berkelanjutan, maka Kementan telah menetapkan peningkatan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Target produksi daging nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Nasional pada tahun 2024 adalah sebesar 4,60 juta ton. Capaian produksi daging nasional tahun 2022 adalah sebesar 4,73 juta ton, dengan demikian maka realisasi capaian kinerja produksi daging tahun 2022 mencapai 102,93%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi dan produksi daging secara nasional pada tahun 2022, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

1. Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) selama 2020-2022 mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 6.790.013 ekor.
2. Pengembangan ternak ruminansia tahun 2022, yaitu pengadaan sapi potong lokal/persilangan sebanyak 10.290 ekor dan kambing/domba sebanyak 14.250 ekor.
3. Sertifikasi benih/bibit ternak tahun 2022 menghasilkan 41 sertifikat dari 41 pemohon sertifikasi. Pemohon berasal dari UPT Ditjen PKH, UPT Daerah dan perusahaan ayam ras. Jumlah produk yang sudah disertifikasi yaitu sapi potong 1.094 ekor, sapi perah 81 ekor, domba 211 ekor, kambing 522 ekor, 225 ekor *bull* sapi (setara dengan 3.345.000 *straw*), 12 ekor *bull* kambing (setara dengan 84.000 *straw*), babi 57 ekor, embrio 2.091, itik 2 flock dan bibit DOC yang berasal dari 14 produsen *breeder*.

4. Semakin berkembangnya pelaku perunggasan dari 35 perusahaan pembibit PS menjadi 40 perusahaan pembibit PS.
5. Penandaan dan Pendataan Ternak dalam rangka mendukung kegiatan vaksinasi dan penanggulangan wabah PMK di Indonesia melalui pengadaan 19.821.549 unit *eartag QR Secure Code* yang didistribusikan ke 34 provinsi.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait ketersediaan daging sapi/kerbau, Ditjen PKH terus melakukan terobosan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi/kerbau, antara lain:

1. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara.
2. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
3. Kegiatan reguler Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak sapi potong asli/lokal/persilangan sebanyak 10.290 ekor.
4. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
5. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing/domba:

1. Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak kambing/domba sebanyak 14.250 ekor.
2. Berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk melakukan promosi peningkatan konsumsi daging kambing/domba sebagai alternatif sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi/kerbau.
3. Koordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba atau Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak agar melakukan penyeleksian terhadap ternak yang diekspor (bukan merupakan bibit unggul).

Upaya yang dilakukan Ditjen PKH terkait stabilisasi perunggasan, antara lain:

1. Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
2. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor Subsektor Peternakan.
3. Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
4. Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor.
5. Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam ras melalui sertifikasi *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP).

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging babi, antara lain:

1. Pengembangan Ternak Babi melalui program bantuan pemerintah sebanyak 2.220 ekor.

2. Peningkatan perkembangan populasi babi di BPTU-HPT Siborongborong sebanyak 607 ekor.
3. Peningkatan kualitas genetik babi melalui impor semen beku dengan menggunakan semen impor.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) sebagaimana tercantum dalam Tabel 10 memiliki nilai efisiensi sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 10. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

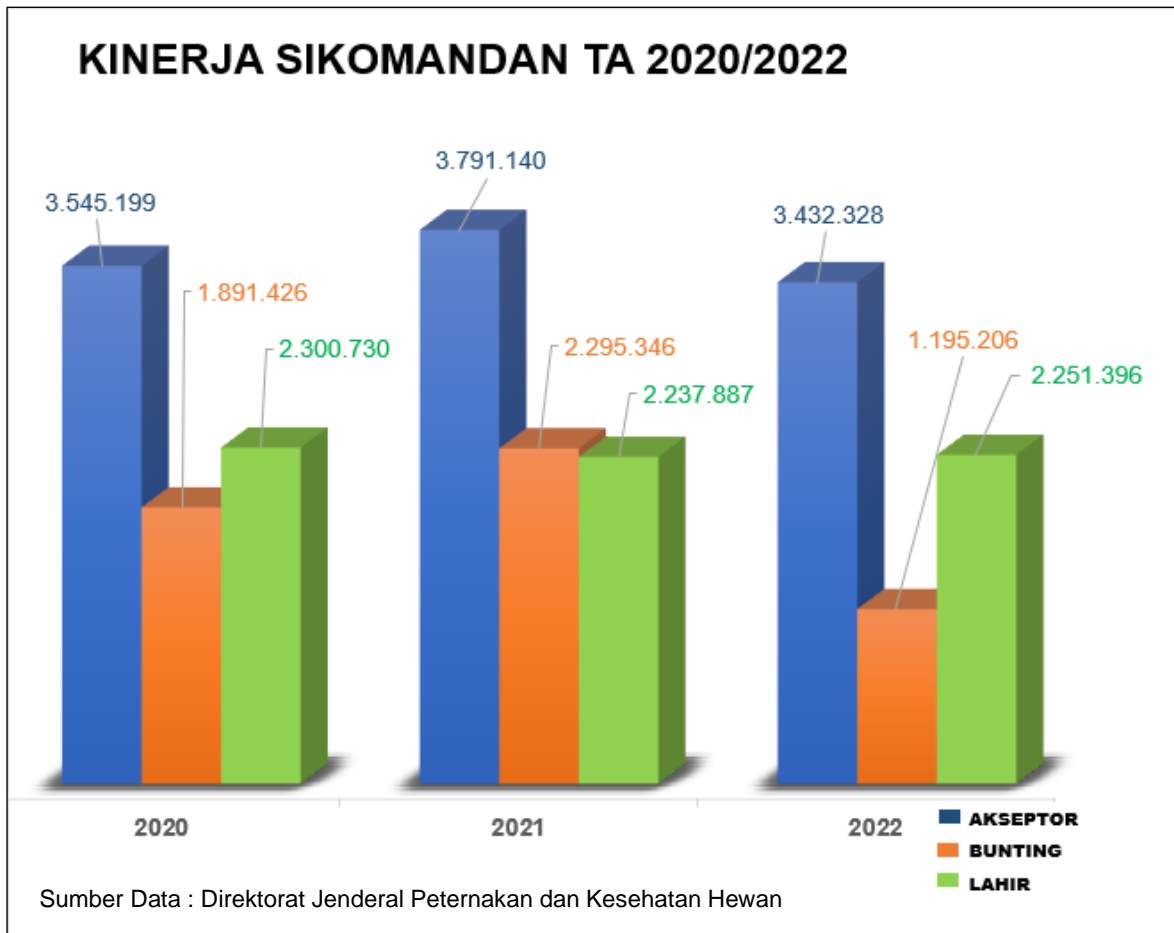
Sumber: Ditjen PKH, 2022

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Produksi Daging ditunjang oleh beberapa Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH antara lain:

(1) Peningkatan Kelahiran Ternak melalui Kegiatan Optimalisasi Reproduksi/ Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)

Capaian kinerja Optimalisasi Reproduksi secara nasional periode 2020-2022 sebanyak 10.768.667 akseptor dan lahir sebanyak 6.790.013 ekor sebagaimana Grafik 2 berikut.



Grafik 2. Kinerja SIKOMANDAN Tahun 2020-2022

(2) Aspek Pembiayaan (Realisasi Pemberian Kredit Pembibitan dan Penggemukan)

Aspek pembiayaan sangat penting dalam mewujudkan akselerasi peningkatan populasi dan produksi ternak, terutama melalui peningkatan skala usaha dan efisiensi usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha, semakin efisien usaha maka biaya produksi per satuan produk lebih rendah sehingga daya saing usaha meningkat. Fasilitasi pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk bidang usaha peternakan pada tahun 2022 berdasarkan data Sakura Kementan tercatat sebesar Rp 19,21 Triliun dan kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (*Mixed Farming*) sebesar Rp 9,38 Triliun, atau total Rp 28,60 Triliun dengan total debitur sebanyak 484.223 pelaku usaha. *Mixed Farming* yang dimaksud disini adalah usaha peternakan terintegrasi dimana pemanfaatan KUR untuk usaha peternakan minimal 60% dari kredit dan maksimal 40% untuk pertanian lainnya (tanaman pangan, hortikultura atau perkebunan).

Pertumbuhan realisasi KUR untuk usaha peternakan pada periode tahun 2020-2022 sebesar 23,26%, sedangkan apabila tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 maka mengalami peningkatan sebesar 23,60%. Peningkatan yang cukup besar ini sebagai dampak penurunan bunga KUR dari 9% menjadi 6% serta peningkatan plafon KUR untuk KUR mikro yang semula sebesar Rp25 Juta menjadi Rp100 Juta, dan berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian tentang pedoman pelaksanaan KUR, pinjaman sampai dengan Rp 100 Juta tidak dipersyaratkan agunan tambahan. Walaupun di lapangan masih ada beberapa penyalur KUR yang mempersyaratkan agunan/perikatan selain agunan pokok.

KUR untuk usaha peternakan terintegrasi pertanian lainnya pada periode 2021-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 57,81% per tahun. Bahkan apabila realisasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 68,28%. Pertumbuhan yang besar ini menunjukkan bahwa minat pelaku usaha terhadap usaha peternakan terintegrasi dengan pertanian lainnya mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini karena peternakan terintegrasi dengan pertanian lainnya dapat mengefisienkan biaya pakan dan mendukung usaha pertanian lainnya dengan pupuk atau penyiangan gulma dan rumput seperti pada perkebunan sawit.

Pertumbuhan jumlah debitur pada periode yang sama sebesar 2,61% per tahun. Sedangkan apabila tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, maka debitur mengalami penurunan sebesar 28,68%. Hal ini dimungkinkan karena adanya wabah PMK pada tahun 2022, sehingga pelaku usaha belum berani menambah skala usaha atau populasi ternak.

Tabel 11. Penyaluran KUR untuk Usaha Peternakan Tahun 2020-2022

No	Uraian	Realisasi KUR (Rp Triliun)			Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2019-2021	2021-2022
A.	Bidang Usaha Peternakan	10.63	15.54	19.21	37.17	23.60
B.	Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (<i>Mixed Farming</i>)	2.72	5.58	9.39	86.71	68.28
TOTAL		13.35	21.12	28.60	57.20	35.40
	Jumlah Debitur (Pelaku Usaha)	497,353	678,964	484,223	23.48	-28.68

Keterangan:

Kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (*Mixed Farming*) adalah bidang usaha yang minimal 60% kredit dari KUR untuk usaha peternakan, dan maksimal 40% untuk pertanian lainnya (tanaman pangan, hortikultura atau perkebunan)

Sumber: SIKP dan SAKURA Kementan, 2022

Realisasi KUR subsektor peternakan tahun 2022 didominasi untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya kambing domba dan pembibitan dan budidaya unggas. Secara rinci nilai dan jumlah debitur KUR untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Akad Kredit dan Jumlah Debitur KUR Subsektor Peternakan Tahun 2021-2022

No	Komoditas	Realisasi (Rp Triliun)		Jumlah Debitur		Pertumbuhan 2021-2022(%)	
		2021	2022	2021	2022	Rp	Debitur
1	Sapi Potong	7.77	10.03	267,377	208,742	22.56	-28.09
2	Domba dan Kambing Potong	2.10	2.75	92,722	70,970	23.63	-30.65
3	Ternak Perah	1.26	1.67	34,177	26,378	24.26	-29.57
4	Babi	1.02	1.37	34,183	25,455	25.82	-34.29
5	Unggas	2.63	3.38	55,764	44,264	22.14	-25.98
TOTAL		14.78	19.20	484,223	375,809	23.02	28.85

Sumber: Aplikasi SAKURA, Ditjen PSP diolah Ditjen PKH, 2022

(3) Investasi Bidang Usaha Peternakan

Sesuai data yang sudah dirilis oleh BKPM yang diolah oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, realisasi investasi total PMA Subsektor Peternakan Tahun 2022 (angka sementara s.d. Triwulan III) mencapai 35,27 Juta US\$ dan untuk PMDN sebesar Rp 2,59 Triliun. Secara rinci perkembangan realisasi PMA dan PMDN Sub Sektor Peternakan tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Perkembangan Realisasi Investasi Subsektor Peternakan 2020-2022

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2021 *	2022 *	2020-2021	2021-2022
PMA (US\$ ribu)	44.443,50	28.556,70	6.389,30	35.274,30	-35,75	452,08
PMDN (Rp Juta)	2.283.452,70	2.138.747,20	1.772.792,20	2.591.516,40	-6,34	46,18

Keterangan: *) data sementara s.d. realisasi Triwulan III

Sumber: BKPM diolah Ditjen PKH, 2022

Realisasi investasi pada periode tahun 2020-2021 mengalami penurunan sebesar 35,75% untuk PMA dan 6,34% untuk PMDN. Penurunan merupakan dampak dari pandemi *Covid-19*, sedangkan apabila realisasi tahun 2022 s.d. Triwulan III dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama maka mengalami peningkatan sebesar 452,08% untuk PMA dan 46,18% untuk PMDN.

Realisasi investasi subsektor peternakan tahun 2022 baik PMA dan PMDN masih didominasi dari peternakan unggas sebesar 26,93 US\$ untuk PMA dan 2,18 triliun rupiah untuk PMDN. Secara rinci nilai total investasi PMA dan PMDN untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Perkembangan Realisasi Investasi SubSektor Peternakan Per Bidang Usaha Tahun 2020-2022

Pertumbuhan Investasi Sub Sektor Peternakan 2021-2022*										
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">PMDN 46,18%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">PMA 452,08%</div> </div>										
Bidang Usaha	PMA (Ribu US\$)					PMDN (Rp Juta)				
	2020	2021	2021*)	2022*)	Pertumbuhan 2021-2022* (%)	2020	2021	2021*)	2022*)	Pertumbuhan 2021-2022* (%)
Peternakan Sapi dan Kerbau	3,468.20	19,388.70	733.30	5,644.20	669.70	109,863.40	228,930.00	202,177.20	389,407.20	92.61
Peternakan Babi	-	-	-	-	-	10,881.00	30,136.40	29,632.50	9,343.60	(68.47)
Peternakan Unggas	40,975.30	9,164.60	5,652.60	26,937.00	376.54	2,160,547.10	1,823,977.40	1,538,083.90	2,181,125.40	41.81
Peternakan Domba dan Kambing	-	3.40	3.40	296.20	8,611.76	2,146.20	979.30	582.10	3,040.80	422.38
Jasa Penunjang & Peternakan Lainnya	-	-	-	2,396.90	-	15.00	54,724.10	2,316.50	8,599.40	271.22
Total	44,443.50	28,556.70	6,389.30	35,274.30	452.08	2,283,452.70	2,138,747.20	1,772,792.20	2,591,516.40	46.18

Keterangan: *) realisasi s.d. Triwulan III
Sumber: BKPM diolah Ditjen PKH, 2022

(4) Penguatan Kelembagaan

Korporasi merupakan manajemen pengelolaan berorientasi bisnis dari hulu sampai hilir, berada dalam wadah ekonomi peternak yang berbadan hukum (koperasi atau Perseroan Terbatas), dengan basis lokasi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian. Pengelolaan usaha peternakan berbasis kawasan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu sampai hilir dalam suatu sistem usaha tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, teknis, ekonomi dan ekologi/lingkungan, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang *feasible*, *bankable* dan berdaya saing.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penguatan kelembagaan di kawasan korporasi dari Kegiatan 1.000 Desa Sapi (Tahun 2020) dan Desa Korporasi Sapi (Tahun 2021) sebanyak 13 lokasi di 11 provinsi, yaitu: Kab. Lombok Tengah NTB, Kab. Lampung Selatan Lampung, Kab. Gowa dan Sidrap Sulawesi Selatan, Kab. Kediri dan Probolinggo Jawa Timur, Kab. Cianjur Jawa Barat, Kab. Boyolali Jawa Tengah, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan, Kab. Aceh Besar Aceh, Kab. Morowali Sulawesi Tengah, serta Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, berupa: penguatan kelembagaan peternak, penyusunan rencana aksi (*action plan*) dan penyusunan

rencana bisnis (*bussines plan*). Secara ringkas kinerja pengembangan kawasan korporasi peternak dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Lokasi Pengembangan Kawasan Korporasi Peternak Tahun 2022

No	Lokasi	Status Kelembagaan	Komoditas
1	Aceh Besar (Aceh)	UMKK Sapi Panca Montera	Sapi Potong
2	Solok Selatan (Sumbar)	Koperasi produsen Sangir Serumpun Sejahtera	Sapi Potong
3	PPU (Kalimantan Timur)	Koperasi Babulu Brahman Jaya	Sapi Potong
4	Sidrap (Sulawesi Selatan)	UMKK Panca Ternak Sejahtera	Sapi Potong
5	Cianjur (Jawa Barat)	Koperasi produsen sapi Mekar Surya Kencana	Sapi Potong
6	Kediri (Jawa Timur)	UMKK Narendra Panca Sotya Abadi	Sapi Potong
7	Boyolali (Jawa Tengah)	Koperasi produksi lembu Subur Rukun Tentrem	Sapi Potong
8	Banyuasin (Sumatera Selatan)	Koperasi produsen Dekopi Aka Jaya	Sapi Potong
9	Morowali (Sulawesi Tengah)	UMKK Brahman Jaya Morowali	Sapi Potong
10	Lombok Tengah (NTB)	Koperasi Syariah Mandalika Baren Sampi	Sapi Potong
11	Lampung Selatan (Lampung)	KPT Maju Bersama	Sapi Potong
12	Gowa (Sulsel)	PT Bumi Berjaya Agriculture	Sapi Potong
13	Probolinggo (Jawa Timur)	Koperasi Langgeng Basuki	Sapi Potong

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, 2022

(5) Penguatan Sistem Logistik

Pada tahun 2022 terdapat 6 kapal khusus angkutan ternak yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6 untuk mengangkut ternak dari daerah produsen ternak ke daerah konsumen. Ditjen PKH berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kelancaran tataniaga ternak melalui pemanfaatan kapal ternak dan optimalisasi muatan pada trayek kapal ternak. Total jumlah ternak yang diangkut pada tahun 2022 sebanyak 42.398 ekor dalam 99 *voyage* dengan rata-rata *loading factor* 86%. Pada tahun 2022 jumlah ternak yang diangkut mengalami penurunan sebesar 6,17% akibat pembatasan lalu lintas ternak karena wabah PMK. Secara rinci rute pelayaran dan rekap muatan ternak tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2022

No	Pangkalan/Provinsi	Kapal	Jaringan Trayek	Jumlah Pelayaran	Jumlah Ternak (ekor)	Rata-rata Loading Faktor (%)
1	Kupang, NTT	CN 1	Kupang-Waingapu-Tj Priok-Cirebon-Kupang	18	7.886	88
2	Kupang, NTT	CN 3	Kupang-Wini-Atapupu-Tj Priok/Banjarmasin/Samarinda-Kupang	16	7.808	98
3	Kupang, NTT	CN 2	Kupang/Bima-Tj Priok-Cirebon-Kupang/Bima	17	6.854	81
4	Kupang, NTT	CN 4	Kupang-Wini-Atapupu-Samarinda/Balikpapan-Kupang	16	6.987	87
5	Kupang, NTT	CN 6	Kupang-Banjarmasin-Bima-Banjarmasin-Kupang	16	9.125	114
6	Kwandang, Gorontalo	CN 5	Kwandang-Tarakan-Balikpapan/Samarinda-Palu-Balikpapan/Samarinda Kwandang	16	3.738	47
TOTAL				99	42.398	86

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, 2022

(6) Regulasi dan Deregulasi

Pada tahun 2022 Ditjen PKH aktif menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta dalam upaya mendukung iklim investasi pertanian (termasuk peternakan) yang lebih baik. Ditjen PKH bersama Unit Kerja Eselon I Kementan yang dikoordinasikan oleh Setjen Kementan telah menyusun Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, dan Permentan No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permentan No. 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Ditjen PKH juga berperan aktif dalam pengusulan daftar prioritas investasi yang dikoordinasikan oleh Setjen Kementan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden RI No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada tanggal 24 Mei 2021. Berdasarkan peraturan ini diatur beberapa bidang usaha yang terkait dengan peternakan sebagai berikut:

- a. Bidang Usaha Prioritas
 - 1) Fasilitas Pajak Penghasilan (*Tax Allowance*)
 - a) Pembibitan dan budidaya sapi potong (KBLI 01411) meliputi pembibitan sapi potong dan budidaya pembiakan sapi potong dengan persyaratan melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang.
 - b) Pembibitan dan budidaya sapi perah (KBLI 01412) meliputi pembibitan sapi perah dan budidaya sapi perah dengan persyaratan melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan terintegrasi dan/atau kemitraan dengan Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510).
 - c) Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim (KBLI 10510).
 - 2) Fasilitas Pengurangan Netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan usaha padat karya (*Investment Allowance*), yaitu Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510); dan Industri penyamakan kulit (KBLI 15112)
- b. Bidang usaha wajib melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMKM
 - 1) Budidaya ayam ras pedaging (KBLI 10520).
 - 2) Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental (KBLI 10520).
- c. Bidang usaha dialokasikan untuk koperasi dan UMKM, yaitu perdagangan eceran daging dan ikan olahan (KBLI 47245).

(7) Penyediaan Pakan Ternak

Dalam mendukung pencapaian produksi daging sapi, pada tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi Penyediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) melalui penanaman dan pengembangan hijauan pakan sapi potong dengan kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas sebanyak 15 (lima belas) unit di 15 (lima belas) kabupaten yang berada pada 11 (sebelas) provinsi seluas 150 Ha, terdiri dari: 1) Provinsi Jawa Barat seluas 10 Ha; 2) Jawa Tengah 10 Ha; 3) Jawa Timur 10 Ha; 4) Sumatera Selatan 10 Ha; 5) Bangka Belitung 10 Ha; 6) Kalimantan Tengah 20 Ha; 7) Kalimantan Selatan 20 Ha; 8) Kalimantan Timur 20 Ha; 9) Sulawesi Tengah 10 Ha; 10) Nusa Tenggara Timur 15 Ha; dan 11) Papua Barat 15 Ha. Rincian penanaman dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas TA.2022

No	Provinsi	Kabupaten	Luas Tanam (Ha)
1	Jawa Barat	Kab. Cianjur	10
2	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	10
3	Jawa Timur	Kab. Kediri	10
4	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	10
5	Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	10
6	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	20
7	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	20
8	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kertanegara dan Penajem Paser Utara	20
9	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	10
10	NTT	Kab. Belu	15
11	Papua Barat	Kab. Fakfak dan Tambraw	15
Jumlah			150

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2022

Kegiatan penanaman hijauan pakan tersebut dilaksanakan di 69 kelompok peternak. Jenis hijauan yang ditanam adalah rumput pakchong, odot, Indigofera. Adapun produksi hijauan pakan berkualitas hasil dari penanaman tersebut diestimasi 22.500 ton segar/tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pakan sapi potong 2.055 ekor.

Dengan stimulus kegiatan penanaman hijauan pakan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peternak dalam upaya penyediaan hijauan pakan berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak ruminansia khususnya sapi.

Selain upaya di atas untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sapi potong juga dilakukan distribusi benih tanaman pakan ternak dari UPT kepada peternak dalam mendukung penyediaan hijauan pakan ternak berkualitas. Distribusi benih tanaman pakan ternak masing-masing UPT dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Distribusi Benih Tanaman Pakan Ternak (TPT) oleh UPT Pusat TA.2022

No	Instansi	Rumput		Legum	
		Stek	Pools	Kg	Polybag
1	BPTU-HPT Indrapuri	18.900			
2	BPTU-HPT Siborong-borong	31.600			
3	BPTU-HPT Padang Mangatas	262.635		5,91	
4	BPTU-HPT Sembawa	6.172			
5	BPTU-HPT Baturraden	118.130		3,5	
6	BPTU-HPT Denpasar	58.110		61	100
7	BPTU-HPT Pelaihari	167.500	81.000	55	1.500
8	BET Cipelang	5.400			
9	BIB Lembang	352.000			
	Total	1.020.447	81.000	125	1.600

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2022

Selain itu, dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pakan, maka pada tahun 2022 juga telah difasilitasi pengujian untuk 5.050 sampel produk pakan, baik yang dilakukan melalui Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi dan laboratorium pakan daerah.

(8) Pengendalian Penyakit dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

- a. Peningkatan kapasitas peralatan maupun SDM laboratorium veteriner.
- b. Penguatan Puskesmas dengan memfasilitasi ketersediaan obat-obatan dan sarana lainnya di lokasi kegiatan prioritas.
- c. Penempatan Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner untuk membantu dinas dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit.
- d. Kegiatan kompartementalisasi unit-unit usaha peternakan sehingga terjamin kesehatan unit usaha tersebut dari penyakit tertentu.

(9) Penjaminan Produk Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Bagi yang Dipersyaratkan

- a. Sosialisasi dan pembinaan intensif dan berkelanjutan tentang penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan serta mendorong pelaku usaha produsen daging untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.
- b. Meningkatkan jumlah SDM Kesmavet (Auditor NKV, Pengawas Kesmavet, Petugas Pemeriksa *Antemortem-Postmortem*, serta Petugas Kesejahteraan Hewan) dan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam upaya penjaminan keamanan produk hewan.
- c. Peningkatan kapasitas laboratorium kesmavet di UPT Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan agar penyediaan daging bagi masyarakat memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan.
- e. Revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan RPH.

SP1. IKU2 Peningkatan Produksi Susu	
Target 0,61%	Realisasi 2,39%
% Capaian 391,80	

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi susu terhadap target tahun 2022.

Cara perhitungan Peningkatan Produksi Susu adalah produksi susu pada tahun berjalan (A^t) ($t=2022$) dikurangi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2021$), dibagi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2021$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil peningkatan produksi susu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil perhitungan IKU Peningkatan Produksi Susu dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Susu

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	2,50	0,55	0,61	0,71	0,85	391,80	143,98	1.707,14	281,18
Realisasi IKSP (%)	0,14	1,66	2,39	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Produksi susu tahun 2022 sebesar 968.980 ton (angka sementara) atau mencapai 98,93% dari target sebesar 979.460 ton. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu pada tahun 2022 mencapai 2,39% dari target 0,61%, artinya capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu sebesar 391,80% atau **“Sangat Berhasil”** dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu Tahun 2022 sebesar 2,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1,66%, maka diperoleh capaian sebesar 143,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,14%, maka diperoleh capaian sebesar 1.707,14%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja peningkatan produksi susu tahun 2022 sebesar 2,39%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 0,85% sudah mencapai 281,18%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kinerja peningkatan produksi susu tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena IKU ini tidak terdapat pada target Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah nasional, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH berupaya meningkatkan kualitas genetik sapi perah dan membentuk pejantan unggul sapi perah Indonesia melalui Uji Zuriat (*Progeny test*). Uji zuriat telah dimulai sejak tahun 2004 dan hingga saat ini telah mencapai tahap ke-4. Hasil uji zuriat tahap 1 sampai 4, telah menghasilkan 20 ekor pejantan unggul sapi perah dengan rata-rata produksi harian susu anaknya sebanyak 16,67 l/ekor/hari. Untuk tahap ke-4 telah ditetapkan 3 Calon Pejantan Unggul (CPU) yaitu ALBAVIEWPOIN 320129, 320541=CONAN 320121 dan 320542=SAMSON320122.

Peningkatan populasi dan produksi sapi perah pada tahun 2022 karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen PKH sebagai berikut:

- (1) Penyediaan/produksi benih (semen beku dan embrio) dan bibit unggul yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH.
- (2) Pemasukan bibit dari luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (2018-2022) sebanyak 10.879 ekor.
- (3) Kelahiran pedet dari Kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, yang dilanjutkan dengan kegiatan Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja produksi susu sebagaimana tercantum dalam Tabel 20 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 20. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) \cdot RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, sejak tahun 2017 Ditjen PKH melaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan *tagline* Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sampai dengan tahun 2019, kemudian sejak tahun 2020 *tagline* menjadi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang bertujuan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Komoditas sapi perah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018 - 2022) tercatat di dalam iSIKHNAS bahwa terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 494.791 ekor, dengan rincian tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor, tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor, tahun 2021 sebanyak 110.359 ekor, tahun 2022 sebanyak 107.984 ekor atau rata-rata kelahiran selama lima tahun terakhir kurang lebih 98.958 ekor/tahun.

Sebaran kelahiran sapi perah tersebut yaitu sebanyak 488.007 ekor (98,3%) di Pulau Jawa (5 terbesar pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta), sisanya sebanyak 6.784 ekor (1,7%) berada di luar Jawa (terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan). Dari jumlah kelahiran tersebut rata-rata perbandingan atau rasio jenis kelamin (*sex ratio*) betina: jantan yaitu 52,04%: 47,96% (betina 257.494 ekor, jantan 237.297 ekor). Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penambahan populasi calon sapi dara (*heifer*) sebanyak 52,04% dari total kelahiran per tahun sebagai *replacement stock* sapi induk yang sudah tidak produktif, dan terdapat potensi penambahan populasi sapi bakalan sebanyak 47,96% dari total kelahiran per tahun yang diperoleh dari kelahiran pedet jantan untuk digemukkan (*fattening*).

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan populasi ternak perah adalah:

- a) Penyusunan regulasi atau Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK).
- b) Kerja sama dengan dengan NGO/LSM Mercy-USA untuk pengembangan ternak sapi perah pada kelompok dan di wilayah pengembangan sapi perah di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat.
- c) Pengembangan sapi perah di Jatim, Jateng, Jabar, DIY, dan Sultra.
- d) Impor sapi perah. Rekomendasi teknis pemasukan bibit ternak perah yang diterbitkan pada periode 2016-2022 adalah sebanyak 21.273 ekor dan terealisasi 14.249 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1.050 ekor; tahun 2017 sebanyak 2.320 ekor; tahun 2018 sebanyak 3.482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4.124 ekor, tahun 2020 sebanyak 899 ekor, tahun 2021 sebanyak 1.164 ekor, dan tahun 2022 sebanyak 1.010 ekor.
- e) Fasilitasi untuk sarana prasarana pengolahan susu sebanyak 10 unit: 2 (dua) unit di UPT di BBPTU-HPT Baturraden dan 8 unit di provinsi antara lain: Kabupaten Bandung 2 unit, Kota Payakumbuh 2 unit, Kabupaten Enrekang 2 unit, Kabupaten Magetan 2 unit.

Dalam peningkatan mutu hasil olahan susu beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu dan sertifikasi izin edar Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan oleh Badan POM. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berupa:

- 1) Fasilitas prasarana: renovasi rumah produksi.
- 2) Fasilitasi sarana (alat dan mesin): alat penampung susu (*milk can*), boks pendingin susu (*coolbox*), mesin pengolah susu pasteurisasi, mesin penepung (*grinder*), mesin oven serbuk susu, mesin penutup botol, meja *stainless steel*, alat uji susu, *freezer* tutup atas bahan baku, *tray stainless steel* dan genset.

Selain itu untuk peningkatan mutu hasil olahan susu yang dilakukan adalah dengan memberikan sertifikasi izin edar MD. Selama tahun 2022 sudah dikeluarkan 4 izin edar MD.

- f) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak untuk Sapi Perah
 Dalam rangka mendukung produksi susu, Direktorat Pakan mengalokasikan fasilitasi penanaman hijauan pakan ternak pada lahan kelompok ternak sapi perah seluas 10 Ha di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.
 Selain itu, juga dilakukan fasilitasi perawatan dan pemeliharaan padang penggembalaan (*pastura*) dan kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT) di BBPTU-HPT Baturraden seluas 195,5 Ha yang menjadi sumber pakan sapi perah dan kambing perah yang selain untuk kebutuhan pembibitan ternak juga memproduksi susu di UPT tersebut. Fasilitasi pakan olahan di BBPTU-HPT Baturraden tahun 2022 sebanyak 2.259,63 Ton yang terdiri dari konsentrat 2.178,5 Ton dan suplemen 81,13 Ton.
- g) Bantuan Pakan Konsentrat Sapi Perah Darurat PMK
 Pada Tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi bantuan pakan konsentrat sapi perah untuk Provinsi Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 5.650 ton.

Adapun bantuan pakan untuk Jawa Barat sebanyak 1.549,25 ton; DIY 39,4 ton; Jawa Tengah 438,85 ton; dan Jawa Timur 3.622,5 ton.

- h) Penyaluran KUR ternak perah tahun 2022 sebesar 1,67 Triliun kepada 26.378 debitur.

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan produksi susu diantaranya:

- 1) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah dan Fasilitasi *Rearing* Unit Sapi Perah pada tahun anggaran 2023
Penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah adalah kelompok peternak penerima bantuan pengembangan (1) sapi perah: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara; (2) kambing perah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Penerima manfaat kegiatan Fasilitasi *Rearing* Unit Sapi Perah adalah UPTD yang menangani peternakan sapi perah di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.
- 2) Produksi semen beku sapi perah di BBIB Singosari dan BIB Lembang.
- 3) Produksi bibit sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 500 ekor.
- 4) Rekomendasi impor benih dan bibit sapi perah.

SP1. IKU3	
Peningkatan Produksi Telur	
Target 6,46%	Realisasi 7,28%
% Capaian 112,69% (Sangat Berhasil)	

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Telur merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) terhadap target tahun 2022.

Cara perhitungan Pertumbuhan Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) adalah akumulasi produksi telur pada tahun berjalan (A^t) ($t=2022$) dikurangi akumulasi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2021$), dibagi dengan akumulasi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2021$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil peningkatan produksi telur 2018-2022 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Telur

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	2,15	2,15	6,46	2,16	2,16	112,69	827,27	130,94	337,04
Realisasi IKSP (%)	5,56	0,88	7,28	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pertumbuhan Produksi Telur sebesar 7,28%. Apabila dibandingkan terhadap target peningkatan pertumbuhan tahun 2022 sebesar 6,46%, maka diperoleh capaian peningkatan pertumbuhan produksi telur sebesar 112,69% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”. Capaian produksi telur 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 22.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Telur tahun 2022 sebesar 7,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar 6,46%, maka diperoleh capaian sebesar 827,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar 0,88%, maka diperoleh capaian sebesar 827,27%.

Tabel 22. Capaian Produksi Telur 2021-2022 (Ribu Ton)

No	Jenis Telur	2021			2022			Pertumbuhan Realisasi 2021-2022 (%)
		target (ton)	realisasi (ton)	capaian (%)	target (ton)	realisasi (ton)	capaian (%)	
1	Ayam Buras	265.374	368.696	138,93	374.227	375.253	100,27	1,78
2	Ayam Ras Petelur	4.943.185	5.155.998	104,31	5.523.454	5.566.339	100,78	7,96
3	Itik	313.737	313.845	100,03	320.875	322.611	100,54	2,79
4	Puyuh	29.689	24.269	81,74	24.446	25.767	105,40	6,17
5	Itik Manila	35.656	30.625	85,89	30.855	32.576	105,58	6,37
Total		5.587.641	5.893.433	105,47	6.273.857	6.322.546	100,78	7,28

Sumber: Ditjen PKH, 2022

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja Peningkatan Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2022 sebesar 7,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 2,16%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 337,04%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kinerja peningkatan produksi telur tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena IKU ini tidak terdapat pada target Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2022 adalah sebesar 6.322,55 ribu ton atau mencapai 110,76% dari target produksi telur sebesar 5.708,21 ribu ton. Khusus untuk produksi telur ayam ras tahun 2022 sebesar 6,08 juta ton, dengan kebutuhan sebesar 5,88 juta ton, maka masih terdapat neraca ketersediaan terhadap kebutuhan telur ayam ras surplus sebesar 0,2 juta ton. Selain itu, pertumbuhan populasi ayam ras petelur di Indonesia tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 7,96%. Oleh karena itu, Ditjen PKH terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor telur tetas (*hatching egg*) dan bersaing di perdagangan global.

Telur merupakan komoditas yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu Ditjen PKH terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk gemar mengonsumsi telur sebagai sumber protein hewani asal ternak, sebagai upaya untuk peningkatan konsumsi di dalam negeri. Ditjen PKH juga melakukan koordinasi secara intens untuk stabilisasi *supply* telur dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja produksi telur sebagaimana tercantum dalam Tabel 23 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 23. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

1. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (peternak rakyat, PINSAR Petelur, Peternak layer Nasional, BPS dan Badan Pangan Nasional);
2. Pemantauan pelaporan secara *online*;
3. Koordinasi penetapan impor GPS *layer* dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.

Sasaran Program 2 (SP2) MENINGKATNYA PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Untuk mencegah dan mengurangi risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, maka pengawasan keamanan menjadi sangat penting agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.

SP2. IKU4	
Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	
Target 85,50%	Realisasi 94,00%
% Capaian 109,94% (Berhasil)	

Keamanan pangan segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan pangan segar asal hewan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah persentase pangan segar mulai dari unit produksi hingga peredaran yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan.

Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable*

food) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Cara perhitungan jumlah pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah perhitungan jumlah pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah jumlah sampel pangan segar asal hewan (daging, susu dan telur) yang berdasarkan hasil perhitungan rata-rata seluruh parameter uji cemaran mikroba menunjukkan hasil di bawah ambang batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) terhadap jumlah sampel keseluruhan berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di seluruh wilayah Indonesia yang dikoleksi dari unit usaha produk hewan secara sampling memenuhi kaidah keilmuan mewakili populasi seluruh unit usaha produk hewan yang teregistrasi dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan}}{\text{Jumlah Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan}} \right) \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2022 sebesar 94%. Angka ini didapat dari perhitungan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sebanyak 13.560 sampel dibandingkan dengan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan secara keseluruhan sebanyak 14.375 sampel dikalikan 100%. Sampel dikoleksi dari kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan. Sampel tersebut dikoleksi dari 653 unit usaha, yang meliputi rumah potong hewan, *cold storage*, kios daging, pengolahan daging, budidaya unggas petelur, pengumpulan pengemasan pelabelan telur konsumsi (PPPTK), pengolahan telur dan penampungan susu. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan, serta Rincian Sampel Per UPT dan Wilayah Kerja selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Hasil perhitungan realisasi capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	81,50	85,2	85,50	85,70	86,00	109,94	111,90	108,55	109,30
Realisasi IKSP (%)	86,60	84,0	94,00	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2022 sebesar 94%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2022 sebesar 85,5%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan sebesar 109,94% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2022 sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar 84%, maka diperoleh capaian sebesar 111,90%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar 86,6%, maka diperoleh capaian sebesar 108,55%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2022 sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 86%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 109,30%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2022 sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan target Kementan sebesar 85,25%, maka realisasi kinerja mencapai 110,26%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementan, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementan.

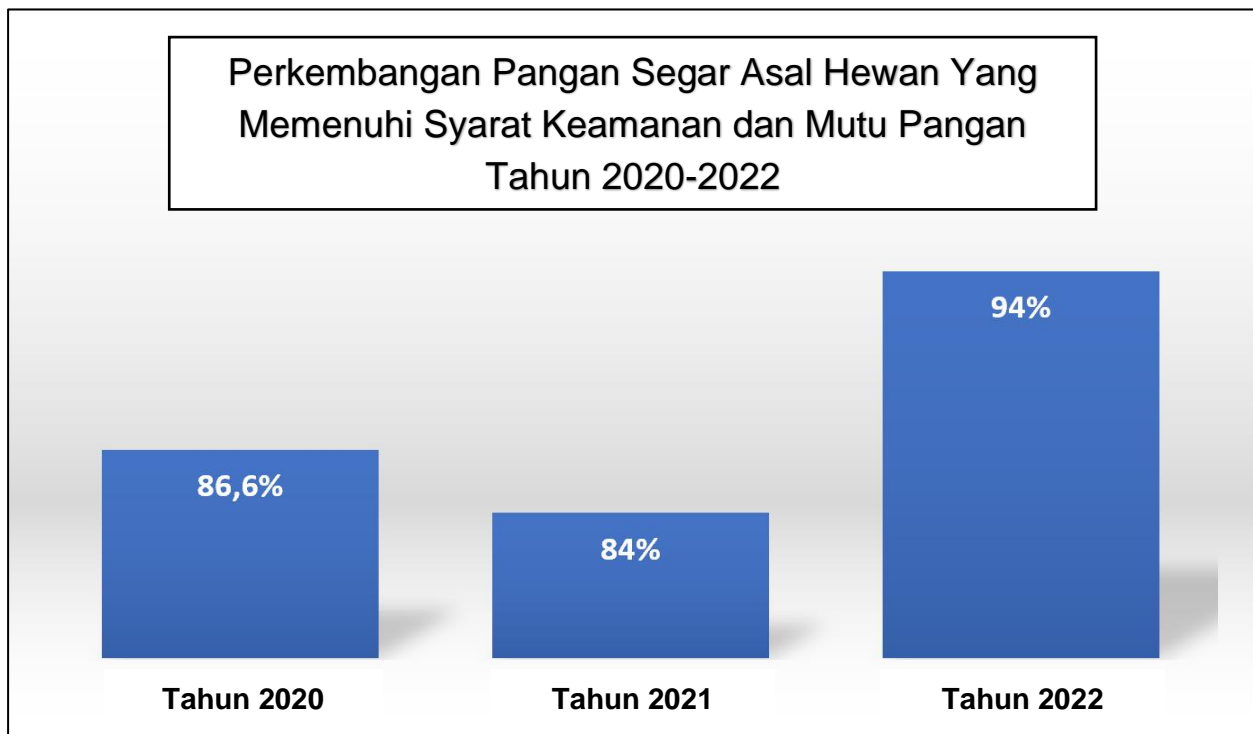
e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan,

pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan *output* pengawasan mutu dan keamanan produk hewan. *Output* ini dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi: (1) pengawasan keamanan produk hewan yang melibatkan pemerintah daerah (dinas provinsi/kabupaten/kota), (2) monitoring dan surveillans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 10 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, BVet, Loka Vet Jayapura dan 10 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (3) pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH.

Pada Tahun 2022 Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan mengalami kenaikan. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan jumlah unit usaha yang diambil sampel produknya, peningkatan pembinaan *hygiene* sanitasi pada unit usaha produk hewan, serta peningkatan biosekuriti terkait dengan pengendalian dan pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Grafik 3.



Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, 2022

Grafik 3. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2022

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana tercantum dalam Tabel 25 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 25. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2022 antara lain: meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada unit usaha produk hewan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya, serta meningkatkan peran pengawas kesmavet di provinsi/kabupaten/kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

Adapun upaya-upaya tindak lanjut di tahun 2023 antara lain:

- 1) Memfokuskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan;

- 2) Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan;
- 3) Mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV, registrasi produk hewan serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan.

Sasaran Program 3 (SP3)

MENINGKATNYA LUAS WILAYAH YANG TERKENDALI KASUS ZONOSIS

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit pada manusia yang ditularkan melalui hewan (*zoonosis*) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas, dimana dua diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, meliputi: *Rabies* dan *Anthrax*.

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian *zoonosis* adalah persentase wilayah yang terkendali dari *zoonosis*, wilayah terkendali adalah provinsi yang tidak terjadi kasus pada manusia atau mengalami penurunan *zoonosis*.

SP3. IKU5	
Persentase Wilayah Yang Terkendali <i>Zoonosis</i>	
Target 74,5%	Realisasi 83,83%
% Capaian 112,52% (Sangat Berhasil)	

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* dilihat dari status wilayah terhadap kasus penyakit *Rabies* dan *Anthrax* pada tahun 2022 dibandingkan dengan kasus di tahun 2022. Cara penghitungannya yaitu jumlah provinsi yang terkendali dibagi seluruh jumlah provinsi dikalikan 100%. Jumlah provinsi yang terkendali adalah provinsi yang tidak ada kasus sama sekali atau penurunan kasus atau tidak ada peningkatan kasus pada tahun berjalan.

Capaian kasus *Rabies* Tahun 2022 adalah sebesar 70,59% dan capaian kasus *Anthrax* pada Tahun 2022 adalah sebesar 97,06%, sehingga Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* pada tahun 2022 adalah sebesar **83,83%**. Data Status Wilayah terhadap Kasus Penyakit *Rabies* dan *Anthrax* Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase wilayah yang terkendali *zoonosis* dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Capaian Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	74,00	74,50	75,00	76,00	112,52	95,26	tidak bisa dibandingkan karena IKU baru	110,30
Realisasi IKSP (%)	-	88,00	83,83	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Pada Tabel 26 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* pada tahun 2022 adalah 83,83%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 74,50%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* sebesar 112,52% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* Tahun 2022 sebesar 83,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar 88%, maka diperoleh capaian sebesar 95,26%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 karena IKU Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* merupakan IKU yang baru ditetapkan pada tahun 2021.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* tahun 2022 sebesar 83,83%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 76%, maka saat ini sudah mencapai 110,30%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Strategi pencegahan penularan *zoonosis* dilakukan melalui koordinasi intens antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan *zoonosis*. Ditjen PKH melalui Fungsi Direktorat Kesmavet memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan penularan *zoonosis* dari hewan ke manusia dilakukan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan target pada populasi masyarakat di daerah endemis atau risiko tinggi tertular *zoonosis*. Selain itu dilakukan pembentukan kader *zoonosis* serta peningkatan kompetensi kader sebagai salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penularan *zoonosis*.
2. Pencegahan penularan *zoonosis* dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di Rumah Potong Hewan (RPH). Selain itu pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* berperan dalam mendeteksi penyakit hewan menular strategis dan *zoonosis* dalam rangka mendukung kegiatan surveilans di RPH.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* sebagaimana tercantum dalam Tabel 27 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 27. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas, dimana dua diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, diantaranya meliputi *Rabies* dan *Anthrax* dengan memperkuat strategi melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penilaian Risiko Bersama

Penilaian risiko bersama ini dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antar kementerian dan pemangku kebijakan terkait yang bertanggungjawab dalam aspek kesehatan manusia, kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pelibatan ahli lintas sektor dan berbagi informasi akan menghasilkan penilaian risiko bersama dalam penanggulangan *zoonosis* dalam hal pilihan manajemen dan komunikasi risiko terhadap ancaman *zoonosis*.

2. Pemeriksaan kesehatan hewan (*ante-mortem*/AM) dan pemeriksaan kesehatan jeroan serta karkas (*post-mortem*/PM).

Pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan jeroan serta daging, berperan penting dari pemantauan *zoonosis* dan penyakit hewan menular, karena sebagian besar hewan ternak dipotong di RPH. Pemeriksaan AM/PM merupakan elemen yang signifikan dalam rantai pangan asal hewan, dimana data klinis, patologi, kontaminasi kimia dapat tersedia dan terukur. Pemeriksaan ini juga berkontribusi dalam deteksi dini *hazard* (bahaya) yang berdampak pada kesehatan manusia, maupun kesehatan dan kesejahteraan hewan.

3. Pemetaan *Zoonosis*

Pemetaan *zoonosis* dalam menjamin keamanan pangan untuk memahami konsentrasi bahaya (*hazard*) pada tahapan rantai pangan asal hewan yang berdampak pada risiko kesehatan manusia. Bahaya pada pemetaan ini meliputi *Zoonotik-Tuberculosis* (zTB), *Mycobacterium Bovis* pada sapi dan *Toxoplasma gondii* pada kambing.

4. Pembentukan Kader Siaga *Rabies* (Kasira)

Sebagai upaya mendorong pembebasan *Rabies* berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Kesmavet Ditjen PKH menginisiasi pembentukan Kasira di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dan Kabupaten Sungai Penuh Provinsi Jambi. Pada tahun mendatang Kasira diharapkan dapat direplikasi di wilayah-wilayah endemis dan berisiko tinggi di Indonesia.

Keberadaan Kasira diharapkan mempercepat pelaporan kasus dan respon, meningkatkan cakupan vaksinasi anjing, memperluas penyebaran informasi serta meningkatkan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat dalam pengendalian *Rabies*, serta mampu meningkatkan sinergitas Puskesmas, Puskesmas dan instansi terkait dalam meningkatkan motivasi dan komitmen kader serta mendorong implementasi *One Health* sehingga pengendalian *Rabies* dapat dilaksanakan secara efektif.

5. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Pencegahan dan pengurangan risiko *zoonosis* dilakukan melalui komunikasi risiko yang meliputi: pemberian informasi kepada masyarakat tentang risiko penanggulangan, pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk melindungi mereka selama penanggulangan *zoonosis*. Sasaran utama komunikasi risiko adalah masyarakat dan pihak-pihak terkait yang berisiko terhadap situasi kegawatdaruratan kesehatan.
6. Pencegahan penularan *zoonosis* dari hewan ke manusia dilakukan melalui KIE kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli *zoonosis*. Dengan demikian, Ditjen PKH berperan penting dalam mengomunikasikan pencegahan *zoonosis* baik kepada pemangku kepentingan terkait maupun kepada masyarakat.

Sasaran Program 4 (SP4)

MENINGKATNYA LUAS WILAYAH YANG TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik. Selain itu, berdasarkan Kepmentan No. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, bahwa dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular. Pada tahun 2022, Ditjen PKH memprioritaskan Pengendalian Hewan Menular Strategis pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, dan *Hog Cholera* (RABAH). Dengan mewabahnya penyakit *African Swine Fever*/ASF (2021), *Lumpy Skin Disease*/LSD (Februari 2022), dan Penyakit Mulut dan Kuku/PMK (April 2022), maka prioritas pengendalian ditambahkan ketiga penyakit tersebut.

Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis *Zoonosis* (PHMSZ) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, *Hog Cholera*, ASF, LSD, serta PMK. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat *zoonosis* atau tidak. Bobot situasi

berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja wilayah terkendali PHMSZ didapat dari rata-rata Angka Kesehatan Hewan (AKH) 442 kabupaten/kota di 34 Provinsi dengan hasil 80%.

SP4. IKU6	
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80%	Realisasi 80 %
% Capaian 100 (Berhasil)	

Cara perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari PHMS (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak PHMS (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Hasil perhitungan Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	80,00	80,50	80,00	81,00	81,00	100,00	99,08	99,99	98,77
Realisasi IKSP (%)	80,01	80,74	80,00	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS pada tahun 2022 adalah 80%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 80%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 100% atau masuk dalam kategori "**Berhasil**". Penghitungan Persentase wilayah terkendali PHMS berdasarkan pada Angka Kesehatan Hewan di 442 Kabupaten/kota di 34 Provinsi. Data status kesehatan hewan per provinsi tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 8.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS pada tahun 2022 adalah sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 80,74%, maka realisasi kinerja tahun 2022 mencapai 99,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 80,01%, maka realisasi kinerja tahun 2022 mencapai 99,99%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS pada tahun 2022 adalah 80%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 81,00%, maka realisasi tahun 2022 mencapai 98,77%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS tahun 2022 sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian sebesar 80,5%, maka realisasi saat ini telah mencapai 99,38%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian realisasian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS, diantaranya disebabkan:

1. Pelaksanaan surveilans ke wilayah tertarget yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) UPT Veteriner yaitu: Balai Veteriner Medan, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Subang, Pusvetma, dan Loka Papua. Target awal surveillans sebesar 456.514 sampel dan terealisasi sebesar 544.080 sampel. Rincian surveilans pada 10 (sepuluh) UPT Veteriner dapat dilihat pada Lampiran 9.
2. Pencegahan dan pengamanan penyakit dengan target 11.946.491 dosis terealisasi sebanyak 11.353.820 dosis (95,04%) dengan rincian obat dan vaksin antara lain *Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera, ASF, LSD, dan PMK*.
3. Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner pada tahun 2022 sebanyak 931 orang, dengan rincian 517 orang Dokter Hewan, 112 orang S1 Paramedik, 179 orang D3 Paramedik dan 123 orang SMA Paramedik. Adanya tenaga kesehatan hewan memiliki andil besar dalam kegiatan pengobatan dan vaksinasi.
4. Kegiatan Kompartementalisasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pada tahun 2022, telah menerbitkan Sertifikat Kompartemen bebas *AI* sebanyak 228 unit di 19 provinsi, *Brucellosis* sebanyak 2 unit di 2 provinsi, *ASF* sebanyak 3 unit di 2 provinsi.

5. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- a. Pengendalian Penyakit *Rabies*
Pelaksanaan vaksinasi *Rabies* di 30 provinsi sebanyak 350.610 dosis tertarget pada wilayah tertular dan perbatasan untuk mencegah penyebaran penyakit *Rabies*.
 - b. Pengendalian Penyakit *Brucellosis*
 - 1) Pelaksanaan vaksinasi *Brucellosis* tertarget pada wilayah tertular dan perbatasan untuk mencegah penyebaran penyakit *Brucellosis* sebanyak 33.540 dosis.
 - 2) Pengendalian penyakit *Brucellosis* dilaksanakan pada wilayah yang tertular dan pada wilayah pembebasan dengan melakukan surveilans dengan prevalensi penyakit diatas 0,2% dilakukan program vaksinasi dengan vaksin *Brucellosis*, sedangkan prevalensi bawah 0,2% dilakukan kegiatan test dan potong bersyarat (*test & slaughter*).
 - c. Pengendalian Penyakit *Anthrax*
Dalam upaya pengendalian penyakit *Anthrax* dilakukan kegiatan vaksinasi sebanyak 118.560 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran *Anthrax* ke wilayah/daerah sekitar. Pengendalian penyakit *Anthrax* dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
 - d. Pengendalian Penyakit *Hog Cholera*
Dalam upaya pengendalian penyakit *Hog Cholera* dilakukan vaksinasi sebanyak 56.550 dosis di wilayah tertular yaitu di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
 - e. Pengendalian Penyakit ASF
Dalam upaya pengendalian penyakit ASF dilakukan vaksinasi sebanyak 37.100 dosis di wilayah tertular yaitu di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.
 - f. Pengendalian Penyakit LSD
Dalam upaya pengendalian penyakit LSD dilakukan vaksinasi sebanyak 217.622 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran LSD ke wilayah/daerah sekitar. Wilayah vaksinasi LSD yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Program pengendalian LSD dilakukan dengan deteksi dini, penelusuran kasus: surveilans pasif dan aktif, pengendalian lalu lintas, vaksinasi darurat, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan LSD melalui KIE.

g. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Dalam upaya pengendalian PMK dilakukan vaksinasi sebanyak 9.273.470 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran PMK ke wilayah/daerah sekitar. Program penanggulangan PMK dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan vaksinasi massal dengan target melakukan vaksinasi pada sapi, kerbau, kambing, dan babi pada basis kabupaten secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan PMK melalui KIE, melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas ternak dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS sebagaimana tercantum dalam Tabel 29 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 29. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS, antara lain:

1. Pemberian anggaran untuk obat dan vaksin serta operasional vaksinasi melalui dana Tugas Pembantuan serta penyediaan bahan pengendalian sebagai stok pusat dalam keadaan wabah.
2. Pelaksanaan surveillans tertarget oleh 10 UPT Veteriner.
3. Produksi Obat dan Vaksin oleh Pusvetma.
4. Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan.

5. Pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan dan penerapan *biosecurity*.
6. Pengawasan Obat Hewan.
7. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan kapasitas laboratorium veteriner.

Sasaran Program 5 (SP5)

TERMANFAATKANNYA SARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN

Transformasi ke arah Peternakan Modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan teknologi, serta mampu menghasilkan *output* berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi.

Dalam penyediaan pangan asal ternak bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah maupun pusat menyebabkan terbatasnya penyediaan fasilitas tersebut di Indonesia.

SP5. IKU7	
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 92,25%	Realisasi 95,86%
% Capaian 103,91% (Sangat Berhasil)	

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana peternakan (sarana kesmavet, sarana kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, dan sarana pakan), maka dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Tingkat kemanfaatan sarana pakan berupa sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Pakan Olahan, dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisisioner. Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak menggunakan kuisisioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerima bantuan. Sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan dan kesmavet menggunakan kuisisioner dengan beberapa parameter penilaian. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuisisioner dengan

menggunakan beberapa parameter penilaian berupa: kelengkapan administrasi, pengendalian dan pembinaan, serta pemeliharaan) dan didistribusikan ke 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Veteriner. Jenis sarana-prasarana dapat dilihat pada Lampiran 10 dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel Alsintan (Unit)	Alsintan Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Direktorat Pakan				
Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	16	16	16	100%
Sarana Prasarana Pakan Olahan	11	11	11	100%
Direktorat Perbibitan dan Produksi ternak				
Container Semen Beku	250	250	245	98,00%
Direktorat Keswan				
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	427	427	427	92,10%
Direktorat Kesmavet				
Sarana kesmavet	7	7	7	93,33%
Prasarana kesmavet	2	2	2	93,33%
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				95,86%

Sumber: Hasil perhitungan dari Kuesioner yang dibagikan ke Responden yang diolah oleh Direktorat lingkup Ditjen PKH, 2022

Realisasi capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	91,25	92,25	93,50	94,50	103,91	97,40	100,18	101,44
Realisasi IKSP (%)	95,69	98,42	95,86	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 sebesar 95,86%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 92,25%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 103,91% atau masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 sebesar 95,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,42%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 97,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,42%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 97,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 95,69%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 100,18%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 adalah sebesar 95,86%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 94,50%, maka realisasi indikator kinerja sasaran program ini mencapai 101,44%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 sebesar 95,86%. Apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar 88,14%, maka realisasi indikator kinerja sasaran program ini mencapai 108,76%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya:

1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Tabel 32. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

No	Lokasi	Fasilitas Prasarana dan Sarana Kesmavet	Jumlah	Satuan	% Pemanfaatan
A	Prasarana				
1	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Prasarana RPH-R Gowa	1	Unit	75
2	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Prasarana Tempat Pemotongan Hewan Kurban	1	Unit	100
JUMLAH			2	Unit	
B	Sarana				
1	Balai Besar Veteriner Denpasar	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1	Unit	100
2	Balai Veteriner Banjarbaru	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1	Unit	100
3	BPMSPH Bogor	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1	Unit	90
4	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Sarana RPH-R Gowa	1	Unit	75

No	Lokasi	Fasilitas Prasarana dan Sarana Kesmavet	Jumlah	Satuan	% Pemanfaatan
5	Kota Bogor, Jawa Barat	Sarana (Peralatan) RPHR Kota Bogor	1	Unit	100
6	Kab. Sleman, DIY	Sarana (Peralatan) RPHR Kentungan	1	Unit	100
7	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sarana Tempat Pemotongan Hewan Kurban	1	Unit	100
JUMLAH			7	Unit	
JUMLAH KESELURUHAN			9	Unit	93,33

Sumber: Ditjen PKH, Tahun 2022

Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) merupakan salah satu mata rantai dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Namun, saat ini masih banyak RPH khususnya milik pemerintah yang belum memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, hal tersebut karena keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan di daerah yang menyebabkan terbatasnya penyediaan biaya pemeliharaan dan perbaikan RPH. Dalam rangka upaya penjaminan keamanan daging ASUH tersebut, maka diberikan bantuan anggaran pada RPHR berupa pembangunan, renovasi dan fasilitasi peralatan.

Pada tahun 2021, fasilitasi prasarana dan sarana rumah potong hewan dialokasikan di 3 lokasi, yaitu RPH-R Kota Bogor, RPH-R Gowa dan RPH-R Kentungan Sleman. RPH-R Kota Bogor dan RPH-R Kentungan Sleman sudah dimanfaatkan 100% karena sudah rutin beroperasi setiap hari, sedangkan untuk RPH-R Kab. Gowa belum termanfaatkan secara optimal pada tahun 2022 karena peralatan pemotongan yang belum lengkap (proses pengadaan gagal lelang tahun 2021).

Pemotongan hewan kurban secara umum masih dilakukan secara tradisional dan cenderung mengabaikan aspek higiene-sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kesehatan lingkungan. Pemotongan hewan kurban umumnya dilakukan di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), seperti di halaman rumah, masjid, atau di tepian jalan dengan fasilitas pemotongan hewan dan penanganan karkas/daging yang sangat minim, sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan dan kelayakan daging hewan kurban yang akan dibagikan dan tentunya sangat berisiko mengancam kesehatan orang yang mengkonsumsi. Oleh karena itu, pada tahun 2021 juga dialokasikan sarana prasarana tempat pemotongan kurban. Pada tahun 2021, fasilitasi prasarana dan sarana tempat pemotongan hewan kurban dialokasikan di 1 lokasi, yaitu Kota Makassar tepat di kompleks Masjid Raya Darul Muttaqin, Minasa Upa. Tempat pemotongan hewan kurban tersebut telah dimanfaatkan sejak tahun 2021 hingga tahun 2022.

Selain itu, pada tahun 2021 telah dilakukan fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di 3 UPT, yaitu Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Banjar Baru dan BPMSPH Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan peran laboratorium kesehatan

masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan dan keamanan produk hewan baik yang diproduksi maupun yang beredar di masyarakat melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan. Pemanfaatan sarana peralatan di Balai Besar Veteriner Denpasar dan Balai Veteriner Banjar Baru telah dimanfaatkan sebesar 100% karena merupakan peralatan yang mendukung pengujian rutin baik untuk sampel aktif maupun sampel pasif. Sedangkan untuk pemanfaatan sarana peralatan di BPMSPH Bogor masih belum dimanfaatkan optimal khususnya untuk pengujian sampel pasif. Hal ini dikarenakan belum ada penetapan tarif PNBP untuk layanan pengujian dan sudah diusulkan untuk revisi tarif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Pemeriksaan dan pengujian produk hewan tersebut meliputi: pemeriksaan organoleptik, fisik, kimia, mikrobiologi, dan residu untuk menjamin kesehatan dan keamanan produk hewan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian produk hewan yang berdayaguna perlu didukung ketersediaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang memadai sehingga diharapkan juga dapat menunjang kegiatan penyidikan/surveilans untuk menentukan penyebab penyakit asal makanan (*foodborne disease*) dan penyakit yang dapat ditularkan dari mikroba tertentu melalui makanan asal hewan (*foodborne zoonosis*).

Berdasarkan tingkat kemanfaatan sarana prasana kesmavet maka penghitungan dilakukan berdasarkan kemanfaatan fasilitasasi prasarana sarana yang diberikan pada tahun 2022 sebagaimana Tabel 32 diatas, maka tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesmavet pada tahun 2022 sebesar 93,33 % dari target 93% (% capaian 100,35%).

Tabel 33. Perhitungan Parameter Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Parameter		%
Parameter Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Sarana Prasarana Tempat Potongan Hewan Kurban		
1	Belum ada pemanfaatan pada tahun 2021 dan 2022	0
2	Baru ada pemanfaatan untuk pemotongan hewan kurban tahun 2022	50
3	Sudah dimanfaatkan untuk pemotongan hewan kurban	100
Parameter perhitungan Tingkat Pemanfaatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan		
4	Belum ada pemanfaatan	0
5	Sudah melakukan uji coba pemotongan hewan	25
6	Sudah ada struktur kelembagaan RPH	50
7	Sudah melakukan pemotongan namun belum rutin	75
8	Sudah melakukan pemotongan secara rutin	100
Parameter perhitungan tingkat pemanfaatan Sarana Laboratorium Kesmavet		
9	Belum ada pemanfaatan	0
10	Pelatihan dan training alat	20
11	Sudah mengembangkan metode pengujian untuk peralatan	60
12	Sudah melakukan uji coba pengujian sampel pengembangan Teknik dan metode	80
13	Sudah melakukan validasi metode pengujian dan melakukan pengujian sampel aktif	90
14	Sudah melakukan pengujian sampel aktif dan pasif	100

Sumber: Ditjen PKH, 2022

2) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Hewan

Efektivitas pengelolaan laboratorium secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai standar. Kemanfaatan sarana prasarana laboratorium diperoleh dengan distribusi kuisioner ke 8 (delapan) UPT Veteriner dengan beberapa parameter penilaian sebagaimana Tabel 34.

Tabel 34. Perhitungan Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan

	Parameter	Kriteria	Score (YA=10/TIDAK=0)	Rata-rata
Kelengkapan Administrasi				
1	Ada Spek dan data dukung pengadaan	Ya/Tidak	10	10
2	Ada SK Pengawasan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	7
3	Ada Dokumen pengelolaan (pembukuan penggunaan) alat laboratorium dan pemanfaatannya	Ya/Tidak	10	10
Pengendalian				
4	Ada SOP Mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
5	Ada Pengawasan Kelayakan dan Pemanfaatan Alat Laboratorium Berkala	Ya/Tidak	10	10
6	Ada Laporan Pemanfaatan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
7	Ada Mekanisme Realokasi Alat Laboratorium yang tidak dimanfaatkan secara optimal	Ya/Tidak	10	7
8	Ada Database Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
Pembinaan&Pemeliharaan				
9	Ada pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan	Ya/Tidak	10	10
10	Ada pelatihan untuk operator	Ya/Tidak	10	10
			Rata-rata	92,1

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Jenis alat laboratorium yang dinilai kemanfaatannya adalah alat yang digunakan di 7 bagian laboratorium yaitu Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Serologi, Patologi dengan jumlah peralatan laboratorium sebanyak 427 unit dengan hasil penilaian 92,1% masih dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan dengan baik.

3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak tahun 2022 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer di provinsi. Kontainer tersebut digunakan untuk mendistribusikan semen beku dalam mensukseskan kegiatan SIKOMANDAN. Dalam rangka pendistribusian semen beku tahun 2021 telah dialokasikan bantuan berupa kontainer sejumlah 250 unit.

Untuk mengukur capaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana peternakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Perhitungan tingkat kemanfaatan, diukur menggunakan metode survei melalui kuesioner dengan sampel penerima bantuan sebanyak 85,29% atau 29 provinsi dari 34 provinsi. Klasifikasi penilaian bantuan yang termanfaatkan sebagai berikut:

- a) 100 jika jawaban ya mencapai 91% s.d 100%.
- b) 90 jika jawaban ya mencapai 81% s.d 90%.
- c) 80 jika jawaban ya mencapai 71% s.d 80%.
- d) 70 jika jawaban ya mencapai 61% s.d 70%.
- e) 60 jika jawaban ya mencapai 51% s.d 60%.

Dari sampling yang dilakukan, diketahui bahwa semua bantuan sarana prasarana yang disalurkan telah dimanfaatkan 245 unit dari target 250 unit, sehingga realisasinya mencapai 98% atau **berhasil**.

Tabel 35. Tingkat Kemanfaatan Saprass Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Capaian
1	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak	92	98	106,52	Sangat Berhasil

Sumber: Ditjen PKH, 2022

4) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pakan

Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pakan tahun 2022 mencapai 100%, diperoleh dari pemanfaatan fasilitas sarana pakan olahan melalui kegiatan Bank Pakan di 11 kelompok dan sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) di 16 kelompok pada tahun 2021 yang masih semuanya termanfaatkan.

Fasilitas sarana pakan olahan melalui kegiatan Bank Pakan pada 11 kelompok sebagai berikut:

- (1) Sido Rukun berlokasi di Desa Margodadi, RT 009 RW 004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
- (2) Tiga Putri berlokasi di Desa Tawang Sari Kec. Arahkan Kab. Indramayu, Jabar.
- (3) Kandang Mukti berlokasi Desa Mekarjaya Kec. Kertajati Kab. Majalengka Jabar.
- (4) Genting Makmur Jaya di Desa Negororejo Kec. Lumbang Kab. Probolinggo Jatim.
- (5) Bahagia Sejahtera di Desa Tamiajeng, Kec. Trawas Kab. Mojokerto, Jatim.
- (6) Awar Awar Sejahtera di Desa Awar-awar Kec. Asembagus Kab. Situbondo Jatim.
- (7) Sepakat berlokasi di Desa Tangga, Kec. Kab. Bima Nusa Tenggara Barat.
- (8) KTT Hisdi berlokasi di Kelurahan Rite Kec. Raba Kota Bima Nusa Tenggara Barat.
- (9) Bersaudara di Desa Benu Kec. Takari Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur.
- (10) Alerang I di Desa Bontolangkasa Selatan, Kec. Bontonompo Kab. Gowa Sulsel.
- (11) Ayam Mandiri Efrata di Desa Marakiri Kab. Maluku Tengah Maluku.

Capaian kinerja kemanfaatan sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) tahun 2021 diperoleh dari 16 kelompok sebagai berikut:

- (1) Sawah Haseum di Desa Sukamenak Kec. Bantarujeg Kab. Majalengka, Jabar.
- (2) Harapan Sejahtera I di Desa Banggala Mulya, Kec. Kalijati, Subang Jabar.
- (3) Karya Mandiri di Desa Pekon Suka Banjar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Lampung.
- (4) Sabana Mandiri di Desa Sukatani Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten.
- (5) Arum Jaya di Desa Wanakerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang Banten.

- (6) Kendal Karet di Desa Sindang Panon Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang Banten.
- (7) Karya Alam di Desa Dandang Kec. Cisauk Kab. Tangerang, Banten.
- (8) Fajar Sejahtera di Desa Ancol Pasit Kec. Jambe Kab. Tangerang Banten.
- (9) Cihurang di Desa Mandala Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang Banten.
- (10) KWT Flamboyan di Desa Tanggulaingin Kec. Montong Kab. Tuban Jatim.
- (11) Suloyo Gandring di Desa Wolutengah Kec. Gandring Kab. Tuban Jatim.
- (12) Makaryo di Desa Waleran Kec. Grabagan Kab. Tuban Jatim.
- (13) KTT Tanjung Sari di Desa Tanjung Harjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, Jatim.
- (14) Lembu Jaya di Desa Tangir Kec. Malo, Kab. Bojonegoro Jatim.
- (15) Batu Bangke Mandiri di Desa Cendi Manik Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat NTB.
- (16) Titiq Sama Guna di Desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara NTB.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Tabel 36 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 36. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner;
- 2) Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada Direktorat Pakan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA;
- 3) Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

- 4) Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk:
- Peningkatan sistem mutu laboratorium (ISO SNI 17025);
 - Penggunaan peralatan pengujian laboratorium;
 - Pakan olahan;
 - Kesmavet.

Sasaran Program 6 (SP6)
MENINGKATNYA NILAI TAMBAH KOMODITAS PERTANIAN

SP6. IKU8	
Tingkat Kemanfaatan	
Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	
Target 90%	Realisasi 90,20%
% Capaian 100,22% (Berhasil)	

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan.

Data tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diperoleh berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Pembina Daerah dan penerima manfaat. Penghitungan realisasi tingkat kemanfaatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Tingkat Kemanfaatan} &= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana termanfaatkan}}{\text{Jumlah total sarana prasarana}} \times 100\% \\
 &= \frac{46}{51} \times 100\% \\
 &= 90,20\%
 \end{aligned}$$

Capaian realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Capaian Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{90,2}{90} \times 100\% \\
 &= 100,22\%
 \end{aligned}$$

Jenis sarana prasarana dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana PPHNak

Jenis Sarana Prasarana	Jumlah yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Jumlah yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
1. Sarana Pengolahan Daging	2	2	2	100,00
2. Prasarana Pengolahan Daging	1	1	1	100,00
3. Sarana pengolahan Telur	1	1	1	100,00
4. Prasarana Pengolahan Telur	2	2	2	100,00
5. Sarana Pengolahan Susu	3	3	3	100,00
6. Prasarana Pengolahan Susu	3	3	3	100,00
7. Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	5	5	5	100,00
8. Prasarana Pupuk Organik	5	5	5	100,00
9. Sarana Prasarana Pupuk Organik (DKS)	15	15	11	73,33
10. Sarana Pasar Ternak	7	7	7	100,00
11. Prasarana Pasar Ternak	6	6	6	100,00
12. Prasarana Tata Niaga	1	1	0	0,00
Jumlah	51	51	46	90,20
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				90,20

Sumber: Direktorat PPHNak, Ditjen PKH, 2022

Realisasi capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana PPHNak

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	87,00	90,00	92,00	95,00	100,22	110,24	106,12	94,95
Realisasi IKSP (%)	85	81,82	90,20	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2022 adalah sebesar 90,20%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 90%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 100,22% atau masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2022 adalah sebesar 90,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 81,82%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 110,24%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 85%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 106,12%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2022 sebesar 90,20%. Apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah tahun 2024 sebesar 95%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 94,95%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2022 sebesar 90,20 %. Apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian sebesar 85,33%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 105,71%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tingkat sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, diantaranya:

1. Kondisi sarana prasarana (kondisi baik dan tidak rusak).
2. Tingkat pemahaman dan keterampilan personil yang mengoperasikan sarana pengolahan.
3. Ketepatan jenis dan spesifikasi sarana dengan kebutuhan penerima.
4. Komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang diberikan.
5. Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2021) berjumlah 51 unit terdiri dari 33 unit sarana dan 18 unit prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Jenis sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 11.

Dari fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran tahun 2021 sebanyak 51 unit telah termanfaatkan sebanyak 46 unit sedangkan 5 unit belum termanfaatkan dengan optimal, yaitu:

- a) Fasilitasi Prasarana Tata Niaga di Kupang belum termanfaatkan secara optimal. Penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah terlalu jauh dari pelabuhan pengeluaran di Waingapu sehingga pelaku usaha kesulitan memanfaatkan.
- b) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan biogas kegiatan pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kelompok Coppo Bulu Desa Bulu Kec. Panca dan Kelompok Padomae Jaya Desa Rijang Panua Kec. Kulo Kab. Sidrap sudah termanfaatkan namun masih sebatas di sekitar kandang.

- c) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan biogas kegiatan pengembangan Desa Korporasi Sapi KTT Sakalam Jaya Desa Sarampad Kec. Cugenang dan KTT Makmur Desa Cikahuripan Kec. Gekbrong Kab. Cianjur berupa rumah kompos dan biogas belum termanfaatkan karena ada kebocoran di instalasi, kerusakan sudah diperbaiki namun dalam pengelolaannya merasa keberatan karena belum memerlukan biogas dan rumah kompos.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan didukung oleh kegiatan dan RO sebagaimana tercantum dalam Tabel 39 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 39. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = 50% + (E/20 x 50)					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022.

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adanya koordinasi yang optimal antara satker pelaksana, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- 2) Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan hasil peternakan.
- 3) Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

Sasaran Program 7 (SP7) MENINGKATNYA DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas Subsektor Peternakan telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti obat hewan dan produk unggas. Hal ini mengingat komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu penyumbang devisa negara, namun masih perlu ditingkatkan daya saingnya di pasar luar negeri. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

SP7. IKU 9	
Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 2,00%	Realisasi 13,52%
% Capaian 676% (sangat berhasil)	

Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan nilai ekspor terhadap target tahun 2022.

Cara perhitungan Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan (A^t) ($t=2022$) dikurangi akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2021$), dibagi dengan akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2021$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil perhitungan IKU Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Lampiran 12 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Realisasi Capaian IKU Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk PKH

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	15	15,00	2,00	25,00	30,00	676,00	164,68	45,68	45,07
Realisasi IKSP (%)	29,6	8,21	13,52	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebesar 13,52%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 2%, maka realisasi Indikator mencapai 676,00% atau masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

Capaian nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan tahun 2022 secara keseluruhan dari kelima kelompok komoditas yang terdiri dari hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk nonpangan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak berdasarkan angka tetap Desember 2022 sebesar US\$ 1,184 milyar atau mencapai 113,52% jika dibandingkan dengan total target nilai ekspor tahun 2022 sebesar US\$ 1,004 Milyar.

Hal ini menunjukkan capaian nilai ekspor produk peternakan tahun 2022 adalah “**Berhasil**”. Capaian nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 41.

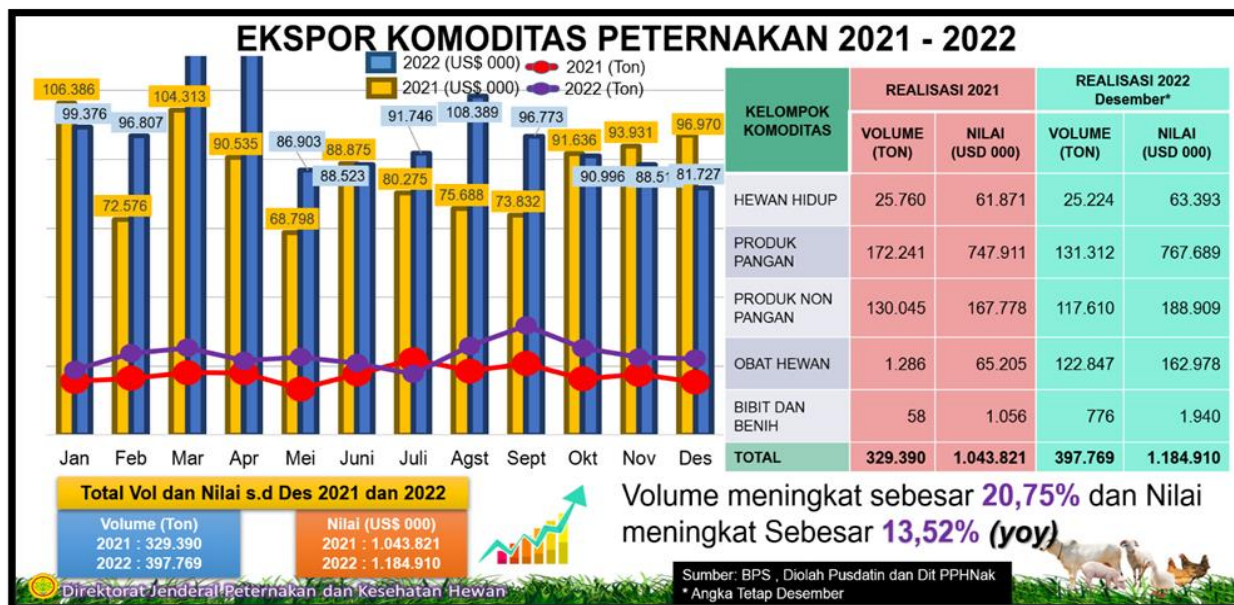
Tabel 41. Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$ 000)		%
		Target	Realisasi*)	
1	Hewan Hidup	79.012	63.393	80,23
2	Produk Pangan Segar dan Olahan	706.702	767.689	108,63
3	Produk Non Pangan	197.668	188.909	95,56
4	Obat Hewan	19.884	162.978	819,65
5	Benih dan Bibit Ternak	923,1	1.940	210,12
		1.004.189	1.184.910	117,99

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Ket: Angka Tetap Desember 2022

Sedangkan Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 4.



Grafik 4. Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan Tahun 2022

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan (hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak) tahun 2022 sebesar 13,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka indikator kinerja sasaran program ini mencapai 164,68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 8,21%, maka indikator kinerja sasaran program ini mencapai 45,68%. Secara rinci Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020-2022

No	Komoditas	Nilai Ekspor (USD)			Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2021-2022	2020-2022
1	Hewan Hidup	80.407.271	61.871.086	63.393.123	2,46	(21,16)
2	Produk Pangan Segar dan Olahan	733.756.382	747.910.837	767.689.785	2,64	4,62
3	Produk Non Pangan	133.207.036	167.777.958	188.909.073	12,59	41,82
4	Obat Hewan	16.684.860	65.205.214	162.978.632	149,95	876,81
5	Benih dan Bibit Ternak	597.528	1.056.728	1.939.620	83,55	224,61
Jumlah/ Total		964.653.077	1.043.821.823	1.184.910.233	13,52	22,83

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Ket: Angka Tetap Desember 2022

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan (hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak) tahun 2022 sebesar 13,52%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2024 sebesar 30%, maka saat ini mencapai 45,07%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 sebesar 13,52%. Apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian sebesar 9,21%, maka indikator kinerja sasaran program ini mencapai 146,80%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

Total nilai ekspor pertanian tahun 2022 senilai USD 40,57 Milyar dengan kontribusi subsektor sebagaimana Tabel 43.

Tabel 43. Capaian Nilai Ekspor Pertanian Tahun 2022

No	Subsektor	Capaian Realisasi Nilai Tahun 2022 (USD 000) *	Share terhadap Capaian Realisasi Nilai Kementan (%)
1	Tanaman Pangan	235.898,50	0,53
2	Hortikultura	735.579,24	1,67
3	Perkebunan	41.861.836,98	95,10
4	Peternakan	1.184.910,23	2,69
Total		44.018.224,95	100,00

Sumber: BPS, diolah Pusdatin dan Ditjen PKH

Ket: Angka tetap Desember 2022

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor sektor pertanian yakni Subsektor Perkebunan sebesar USD 41,86 Milyar atau setara dengan 95,10%. Subsektor Peternakan menempati urutan kedua penyumbang terbesar yaitu 2,69% terhadap capaian nilai ekspor sektor pertanian atau sebesar USD 1,18 Milyar, disusul Subsektor Hortikultura sebesar 1,67% atau sebesar USD 735,57 Juta dan Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,53% atau sebesar USD 235,89 Juta.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

1) Keberhasilan

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja di atas, Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor.

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan ekspor untuk produk peternakan diantaranya:

- a) Terbukanya pasar ekspor unggas ke Singapura setelah sebelumnya dipasok oleh Malaysia, sampai dengan Desember 2022 pihak *Singapore Food Agency* (SFA) telah melakukan audit ke unit usaha perunggasan yang akan melakukan ekspor ke Singapore sebanyak 7 kali. Pada Juli 2022 telah dilakukan ekspor perdana produk karkas unggas ke Singapura sebanyak 50 ton.
- b) Produksi daging khususnya ruminansia kecil (kambing dan domba) telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia
- c) Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Myanmar, Timor Leste, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk pasar dalam negeri
- d) Realisasi nilai ekspor produk pangan mencapai 101,67% dengan kontribusi terbesar adalah ekspor produk madu yang capaian nilai ekspornya sebesar 155,40%.
- e) Realisasi nilai ekspor benih dan bibit ternak mencapai 167,28% dengan kontribusi terbesar adalah ekspor *Hatching Eggs* (HE) ke Myanmar dan Timor Leste.
- f) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara.
- g) Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor dan peningkatan pengetahuan kepada pelaku usaha yang berpotensi ekspor melalui sekolah ekspor yang dilaksanakan bagi pelaku usaha di 15 Provinsi. Hal ini terutama dilakukan kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis yang diminta negara tujuan ekspor, maupun dalam pengisian kuesioner *establishment* yang diberikan oleh negara tujuan ekspor.

2) Kendala

Dalam melakukan ekspor ternak dan hasil ternak beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia diantaranya:

- a) Merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia sejak Bulan April 2022, ekspor obat hewan mengalami penurunan 90,51% disebabkan karena fokus untuk pemenuhan kebutuhan akan obat hewan di dalam negeri.

- b) PMK juga berdampak terhadap pembatasan pemasukan hewan rentan PMK di Malaysia dan Brunei Darussalam sehingga pada tahun 2022 nilai ekspor biri-biri (domba) mengalami penurunan sebesar 72,67% sedangkan nilai ekspor kambing menurun 87,13% dibanding tahun 2021.
- c) Masih adanya proses *G to G* yang belum selesai dengan beberapa negara tujuan ekspor.
- d) Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan dari negara tujuan seringkali menjadi hambatan dalam menembus pasar global.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Tabel 44 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 44. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) \cdot RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022.

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS). Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Terdapat 5 (lima) kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian, yang juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam upaya mencapai target GRATIEKS, terdiri dari:

- a) Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.

Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya identifikasi pelaku usaha ekspor di daerah dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di 15 provinsi. Melalui kegiatan identifikasi pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditi di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor. Disamping itu, pada tahun 2022 juga telah dilakukan beberapa pendampingan kepada para pelaku usaha baik skala industri maupun UMKM yang memiliki potensi ekspor, untuk fasilitasi akses pasar ekspor, diantaranya yakni:

- 1) Penyampaian informasi terkait peluang promosi dan akses pasar ekspor komoditi peternakan dan kesehatan hewan di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA) dan Jepang.
 - 2) Penguatan kelembagaan peternak dengan pengembangan kemitraan dengan *off taker* dan berkoordinasi dengan asosiasi HPDKI terkait ekspor kambing dan domba.
 - 3) Ditjen PKH melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (impor) dan/atau pengeluaran (ekspor).
 - 4) Peningkatan status kesehatan hewan melalui kompartementalisasi bebas penyakit sebagai salah satu persyaratan produk peternakan yang akan diekspor.
 - 5) Peningkatan investasi melalui pemanfaatan KUR untuk usaha budidaya maupun pascapanen dan pengolahan.
 - 6) Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak baik di tingkat nasional.
 - 7) Mengikutsertakan pelaku usaha yang sudah ekspor maupun siap ekspor dalam acara pameran peternakan skala nasional dan internasional. Pada tahun 2022, para pelaku usaha diikutkan pada kegiatan *Trade Expo Indonesia* (TEI) dan *International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition* (ILDEX).
 - 8) Melakukan serangkaian kegiatan promosi ke beberapa Negara yang dikemas dalam program *One Day With Indonesian Coffee, Fruits, Floriculture, Livestock and Veterinary Products* (ODICOFF-LV).
- b) Menambah ragam komoditas ekspor dengan cara: mendorong varian komoditas ekspor termasuk dari bahan raw atau setengah jadi menjadi dalam bentuk jadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* menggali potensi daerah, serta mendorong tumbuhnya investasi di bidang industri agribisnis. Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai upaya dalam menambah jenis produk yang dapat diterima di negara yang telah menjadi tujuan ekspor Indonesia, diantaranya adalah:

- 1) Melakukan harmonisasi persyaratan kesehatan hewan dengan negara target tujuan ekspor. Pada tahun 2022 telah dilakukan proses *G to G* dengan UEA, Singapura, Jepang, dan Brunei Darussalam yang diantaranya adalah untuk produk ayam, kambing dan domba, serta telur.
 - 2) Jepang yang sebelumnya baru menerima produk olahan daging ayam yang telah melewati proses pemanasan, maka telah mulai dilakukan proses *G to G* untuk produk lainnya seperti daging beku ayam, dan daging sapi beserta olahannya. Pihak Jepang masih memerlukan informasi lebih lanjut terkait sertifikasi bebas kompartemen *Avian Influenza* (AI) yang dilakukan Indonesia, serta proses *self declaration* bebas kompartemen AI tersebut di *World Organization for Animal Health* (WOAH).
 - 3) Singapura yang sebelumnya baru pertama kali menerima produk karkas ayam dan olahannya, maka tengah dilakukan proses *G to G* untuk akses pasar telur ayam untuk konsumsi.
 - 4) Berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan jamaah haji Indonesia menggunakan produk ekspor Indonesia ke Arab Saudi.
 - 5) Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Pada tahun 2022 negara yang menjadi target mitra dagang baru yakni Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar.
- c) Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K). Upaya yang telah dilakukan, yakni dengan mendorong para pelaku usaha ekspor terutama untuk komoditi ternak hidup kambing dan domba dengan melakukan kemitraan dengan para peternak serta melakukan pendampingan kepada mitranya dalam aspek produksi. Dengan demikian dapat dihasilkan ternak yang memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan ekspor, serta memiliki daya saing baik secara mutu maupun harga di pasar ekspor. Upaya lain adalah dengan mempertemukan antara pelaku usaha peternakan dengan calon *buyer* di negara tujuan, seperti di Jepang yang saat ini telah lancar melakukan eksportasi olahan daging ayam, kita juga mendorong agar produk UMKM Indonesia seperti abon, rendang daging kambing kaleng, dan rendang daging sapi juga bisa dibeli oleh *buyer* yang sama.
- d) Meningkatkan frekuensi pengiriman ekspor melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sasaran Program 8 (SP8)
TERWUJUDNYA BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA

SP8. IKU 10	
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 33,50	Realisasi 35,73
% Capaian 106,66% (Berhasil)	

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government* dan *good governance* secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dalam pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan instrumen untuk pengawasan dan penilaian pelaksanaan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk Kementerian Pertanian. PMPRB diisikan langsung oleh masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun daerah pada sistem penilaian yang telah dibangun. Ditjen PKH sebagai bagian unit kerja dari Kementerian Pertanian turut mendukung suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penilaian setiap kemajuan yang telah dilakukan dan menarasikan bukti program/kegiatan dalam upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

PMPRB Ditjen PKH dilaksanakan dengan tujuan untuk mengimplementasikan program reformasi birokrasi pada unit kerja sehingga memudahkan dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh unit kerja. Selain itu, juga untuk menyediakan data/informasi bagi Kementerian dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Terkait pelaksanaan PMPRB, pada Ditjen PKH telah dilaksanakan penilaian mandiri oleh Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PKH. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 11-22 April 2022. Tujuan evaluasi adalah

untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu evaluasi yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan saran dan perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen PKH.

Pengukuran Nilai PMPRB diperoleh dengan membandingkan antara target dan nilai maksimal yang dapat diperoleh pada komponen pengungkit dikali 100%, sedangkan sumber data didapatkan dari lembar kerja evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian Nilai PMPRB Ditjen PKH mendapat nilai dari Inspektorat Jenderal Kementan sebesar 35,73. Secara rinci Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen PKH Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 13. Realisasi capaian IKU Nilai PMPRB Ditjen PKH dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45. Realisasi Capaian IKU Nilai PMPRB Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	32,3	32,75	33,50	34,00	35,50	106,66	109,40	110,62	100,65
Realisasi IKSP (%)	32,3	32,66	35,73	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2022 adalah 35,73. Apabila dibandingkan dengan target 2022 sebesar 33,50, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH 106,66% dengan kategori “**Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2022 adalah 35,73. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 32,66, maka diperoleh capaian sebesar 109,40. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 32,3, maka diperoleh capaian sebesar 110,62.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2022 sebesar 35,73. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 35,50, maka saat ini sudah mencapai 100,65%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja reformasi birokrasi di Ditjen PKH dapat dilihat dari kenaikan nilai PMPRB yang setiap tahunnya selalu meningkat. Keberhasilan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 dengan melaksanakan program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan

penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ditjen PKH juga menunjuk agen perubahan pada setiap unit kerja untuk mendukung perbaikan di 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1) Manajemen Perubahan

Untuk manajemen perubahan telah disusun Rencana Aksi, diantaranya:

- a) Sosialisasi *Core Value* ASN **BerAKHLAK** merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Value* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan **#banggamelayanibangsa** merupakan *employer branding* ASN *Jaman Now* yang melayani dengan sepenuh hati. *Core Values* ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja.
- b) Strategi manajemen perubahan melalui internalisasi dan implementasi program RB dalam rapat pimpinan dan setiap kegiatan.
- c) Monitoring rencana aksi Reformasi Birokrasi secara berkala.
- d) Pelaksanaan *Quick Wins* unit kerja dimana untuk tahun 2022 menunjang percepatan kinerja pembebasan wilayah dari PHMS yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Kota Sabang Provinsi Aceh dan Pulau Rupa Provinsi Riau), yang dilaksanakan oleh:
 - (1) Balai Veteriner Bukittinggi terkait Pembebasan *Rabies* di Pulau Rupa dan Pulau Bengkalis
 - (2) Balai Veteriner Medan terkait Pembebasan *Brucellosis* di Kota Sabang

2) Deregulasi Kebijakan (Penataan Peraturan Perundang-undangan)

Deregulasi kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen PKH yaitu deregulasi kebijakan dalam hal perijinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, layanan perijinan berusaha dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta Pendataan Ternak, Kementerian Pertanian telah menerbitkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
- b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian;
- c) Peraturan Menteri Pertanian 17/2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pengembalaan Umum;

- d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan;
- e) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan dalam rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Footh and Mouth Disease*);
- f) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Footh and Mouth Disease*).

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 pengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian, serta menyusun rancangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4) Penataan Tata Laksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi.

5) Penataan Sistem Manajemen SDM

- a) Melakukan identifikasi kebutuhan pegawai Ditjen PKH sesuai dengan beban kerja organisasi (peta jabatan);
- b) Melakukan identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi
- c) Melakukan pengelolaan kinerja pegawai tahun 2022;
- d) Melakukan monitoring kehadiran pegawai secara berkala (bulanan);
- e) Melakukan penyusunan revisi peta jabatan baru Ditjen PKH;
- f) Melakukan promosi pegawai dan uji kompetensi jabatan fungsional;
- g) Penetapan kinerja individu dan pelaksanaan evaluasi jabatan;
- h) Menyusun program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

6) Akuntabilitas

- a) Nilai Kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PKH tahun 2021 adalah sebesar 81,80 dengan predikat A;
- b) Balai Inseminasi Buatan Lembang adalah UPT yang mendapatkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Nasional dari Kementerian PAN RB tahun 2022.

7) Pengawasan

Sejak tahun 2009, Ditjen PKH berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat organisasi maupun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan agar tujuan pelaksanaan

program/kegiatan dapat tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai tahun 2021 diterapkan SPIP terintegrasi oleh Ditjen PKH sebagai komitmen pelaksanaan system pengendalian internal. Salah satu indikator bahwa SPIP telah berjalan dengan optimal yaitu minimnya temuan hasil audit baik internal maupun eksternal. Hasil penilaian penjaminan kualitas SPIP tahun 2022 Ditjen PKH oleh Itjen Kementan selaku *Quality Assurance* adalah sebesar 3,78 dengan kategori “Terdefinisi”.

8) Pelayanan Publik

Ditjen PKH selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Ditjen PKH dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima (terbaik) bagi masyarakat, yang mempunyai kepentingan pada organisasi Ditjen PKH sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pelayanan Publik dapat dilihat dari:

- a) Seluruh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH sudah melakukan Evaluasi Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali;
- b) BET Cipelang menjadi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2022 dari Kementerian PAN dan RB;
- c) PUSVETMA, BBIB Singosari, dan BET Cipelang mendapatkan Anugerah SNI *Award* Tahun 2022;
- d) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 terhadap pelayanan Ditjen PKH adalah sebesar 3,48 Skala Likert.
- e) Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Ditjen PKH melakukan penyesuaian/perubahan pada sistem layanan rekomendasi dengan tetap mengutamakan terwujudnya pelayanan prima untuk kepuasan pelanggan.
- f) Pada Tahun 2022 terdapat penambahan aplikasi SIMREK PKH yaitu Sistem Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar yang merupakan migrasi dari SIMREK2 (app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2) serta Sistem Pelaporan Realisasi Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa. Selain itu, dikembangkan layanan perubahan rencana kebutuhan komoditas Ruminansia Besar dan perubahan rencana kebutuhan komoditas Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya yang terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) dari Lembaga *National Single Window* (LNSW).

- g) Pada aplikasi SIMPOL PKH terdapat penambahan sistem untuk Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan, Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan dan Registrasi Produk Hewan untuk Komoditas Daging yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH sebagaimana tercantum dalam Tabel 46 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 46. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen PKH telah mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi. Pelaksanaan reformasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, diantaranya:

- (1) Salah satu bentuk komitmen Ditjen PKH untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang serta bersih dan bebas dari KKN menuju pelayanan prima adalah dengan menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu terintegrasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Diharapkan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (SMMAP) ini, Ditjen PKH dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta proaktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan suap.

Ruang lingkup penerapan SNI ISO Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan Ditjen PKH terdiri dari:

- a) Sekretariat Ditjen PKH yaitu: 1) Layanan Rekomendasi; 2) Kepegawaian; 3) Keuangan; dan 4) Pengadaan Barang Milik Negara;

- b) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yaitu 1) Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Bibit; 2) Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi;
- c) Direktorat Pakan yaitu: 1) Surat Persetujuan/Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan; 2) Surat Persetujuan Izin Pemasukan/Pengeluaran Benih Hijauan Tanaman Pakan Ternak (TPT); 3) Nomor Pendaftaran (NPP); 4) Surat Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran Pakan Olah;
- d) Direktorat Keswan yaitu: 1) Surat Persetujuan Pengeluaran Obat Hewan; 2) Surat Persetujuan Pemasukan Obat Hewan; 3) Izin Usaha Obat Hewan; 4) Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan; 5) Izin Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa; 6) Izin Pemasukan Hewan Laboratorium; 7) Rekomendasi Kesehatan Hewan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar;
- e) Direktorat Kesmavet yaitu: 1) Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya; dan
- f) Direktorat PPHNak yaitu: Akselerasi ekspor.

Ditjen PKH telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI-ISO 9001:2008 sejak tahun 2014 yang disertifikasi dan di re-*assessment* pada tahun ketiga oleh Lembaga Sertifikasi QS-Cert setiap tahunnya. Juga sejak tahun 2018 menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyipuan (SMMAP) SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 yang Terintegrasi dan mendapatkan sertifikat dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan SMMAP SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 dilakukan *surveillans* berupa Audit Eksternal setiap setahun sekali. Selanjutnya di tahun 2021, Ditjen PKH meraih ReSertifikasi atas SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan *surveillans* pertama dengan hasil tetap dipertahankan sertifikasinya.

- (2) Sejak tahun 2009, Ditjen PKH berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat organisasi dan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan agar tujuan program/kegiatan tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Satlak SPIP Pusat mendorong Satker UPT maupun Dinas Provinsi melalui implementasi SPIP yang optimal untuk memperoleh Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM menuju Zona Integritas (ZI). Hasil Penjaminan Penilaian Maturitas SPIP lingkup Kementan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021, level maturitas SPIP Ditjen PKH masuk dalam level 3 dengan nilai 3,78, dengan kategori “Terdefinisi”, yaitu sudah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.
- (4) Ditjen PKH telah menerapkan dan terus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Ditjen PKH tahun 2021 adalah 81,80 dengan predikat A.

Sasaran Program 9 (SP9)
TERWUJUDNYA ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN
YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS

SP9. IKU11	
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 88,93	Realisasi 90,51
% Capaian 101,78% (Sangat Berhasil)	

Nilai Kinerja (NK) Anggaran merupakan salah satu indikator sasaran program Ditjen PKH atas pelaksanaan anggaran belanja untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Evaluasi Kinerja Anggaran diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021, terdapat tiga aspek pengukuran yaitu Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks yang semuanya dituangkan ke dalam Aplikasi SMART.



Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang dapat diakses melalui alamat *website* <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Capaian didapatkan dengan menghitung Nilai Kinerja Program berdasarkan nilai kinerja yang ditampilkan pada *dashboard* aplikasi SMART. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH tahun 2022 adalah 90,51. Realisasi Capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH secara rinci dapat dilihat pada Tabel 47.

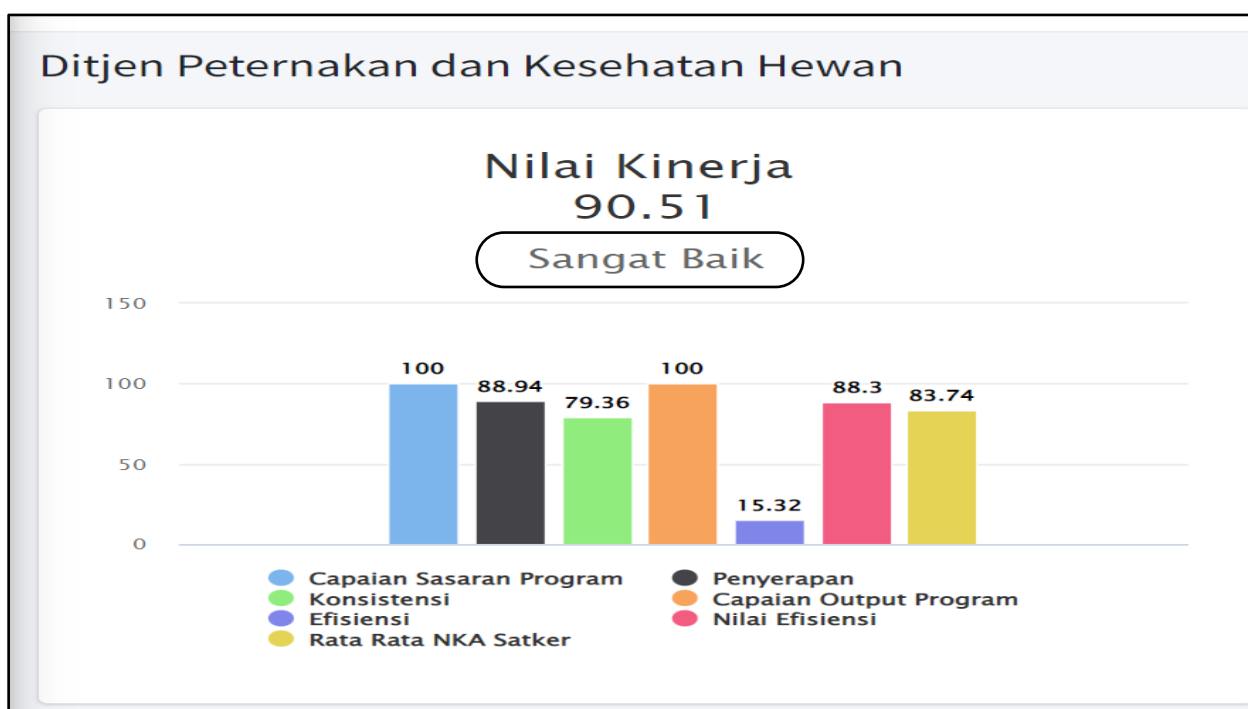
Tabel 47. Realisasi Capaian NK Anggaran Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2022	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85	101,78	100,10	99,21	99,63
Realisasi IKSP (%)	91,23	90,42	90,51	-	-				

Sumber: Ditjen PKH, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Realisasi Indikator Kinerja NK Anggaran Ditjen PKH yang dipantau melalui aplikasi SMART per tanggal 15 Januari 2023 adalah sebesar 90,51 Nilai. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 88,93 Nilai, maka diperoleh capaian 101,78% atau masuk ke dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PKH Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021 (SMART), 2022

Gambar 1. Capaian Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2022

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja NK Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2022 adalah sebesar 90,51 Nilai. Apabila dibandingkan dengan realisasi NKA tahun 2021 sebesar 90,42 Nilai, maka NK Anggaran Ditjen PKH mencapai 100,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi NKA tahun 2020 sebesar 91,23 Nilai, maka NK Anggaran Ditjen PKH mencapai 99,21%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja NK Anggaran Ditjen PKH tahun 2022 sebesar 90,51 Nilai. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 90,85 Nilai, maka saat ini sudah mencapai 99,63%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Target NK Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2022 sebesar 90,51 Nilai. Apabila dibandingkan dengan Target Nilai Kinerja Anggaran Kementan Tahun 2022 sebesar 91,98 Nilai, maka Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2022 mencapai 98,40%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi capaian NK Anggaran Ditjen PKH yang dipantau melalui aplikasi SMART per tanggal 15 Januari 2023 adalah sebesar 90,51 Nilai atau 101,78% dari target 88,93 Nilai pada tahun 2022. Adapun rincian realisasi indikator capaian yang dinilai sebagai berikut:

- 1) Capaian sasaran program dengan nilai sebesar 100%;
- 2) Penyerapan anggaran dengan nilai sebesar 88,94%;
- 3) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 79,36%;
- 4) Capaian output program dengan nilai sebesar 100%;
- 5) Efisiensi 15,32 dan dikonversi menjadi Nilai efisiensi sebesar 88,30; dan
- 6) Rata-rata Nilai Kinerja Satker dengan nilai sebesar 83,74

Keberhasilan pencapaian NK Anggaran Ditjen PKH dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Masing-masing Satker telah membentuk Tim *Person in Charge* (PIC) yang menangani aplikasi monitoring dan evaluasi (Monev).
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang menangani monitoring dan evaluasi (Monev) masing-masing Satker karena telah dilakukan (dua) kali *workshop* dan pendampingan.
3. Peran aktif dari Tim Monev masing-masing satker yang meningkat dalam melakukan penginputan data capaian keluaran program/kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian Rata-rata Nilai Kinerja Satker sebesar 83,74.
4. Koordinasi yang intensif antara petugas Monev pusat dengan Petugas Monev unit kerja UPT dan Satker dinas Provinsi, baik melalui komunikasi *WA group* maupun kunjungan langsung ke Satker untuk melakukan bimbingan teknis jika ada yang mengalami kendala.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH diantaranya:

1. Adanya revisi DIPA karena realokasi dan refokusing anggaran sebanyak 12 kali berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya refokusing dan realokasi anggaran menyebabkan perubahan data informasi kinerja, yaitu berkurangnya target atau bahkan ada yang dihilangkan, sehingga berpengaruh terhadap target volume keluaran atau target Indikator Keluaran Kegiatan (IKK). Namun karena sebelumnya sudah dilaksanakan persiapan pelaksanaan (koordinasi, CP/CL, pertemuan dalam rangka persiapan dan lain-lain), dan sudah menggunakan anggaran, maka untuk target tidak bisa dihilangkan. Hal ini tentunya berpengaruh pada capaian realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) di Satker. Selain itu juga terdapat data informasi kinerja yang tidak dilakukan pemutakhiran sesuai dengan dokumen perencanaan revisi akhir.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) di beberapa Satker tidak sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan nilai konsistensi rendah. Beberapa Satker tidak melakukan Revisi RPD sesuai dengan realisasi pada halaman III DIPA.
4. Adanya kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan ternak, serta gagal lelang menyebabkan tidak tercapainya realisasi serapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Nilai kinerja anggaran tingkat satker belum optimal karena Satker belum melakukan penginputan data CRO secara keseluruhan karena masih menunggu selesainya distribusi ternak ke kelompok dan penyelesaian pengadaan lainnya.

Rekomendasi perbaikan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH, yaitu:

1. Target output Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan Ditjen PKH ke depan yaitu: Satuan capaian *output* Layanan Dukungan Manajemen hendaknya menggunakan satuan Laporan jika dalam satu tahun anggaran menghendaki target *output* 1 (satu) atau dapat menggunakan satuan Layanan jika dalam satu tahun anggaran menghendaki target *output* 12 (dua belas), agar tercapai keselarasan antara capaian *output* dengan realisasi anggaran.
2. Masing-masing direktorat teknis agar melakukan revisi informasi kinerja, jika ditemukan ketidaksesuaian data informasi kinerja pada aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas.
3. Masing-masing direktorat teknis agar melakukan inventarisir data informasi kinerja pada masing-masing aplikasi Monev, diantaranya target per Rincian Output (RO) dan level komponen, termasuk pada Satuan Kerja di bawahnya agar sudah sesuai dengan data terbaru setelah dilakukan revisi anggaran terakhir. Jika terdapat perbedaan data, agar berkoordinasi dengan kelompok perencanaan untuk proses pemutakhiran data di aplikasi KRISNA dan SatuDJA.

4. Unit Kerja Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan bertanggungjawab melakukan input data realisasi kinerja pada level: Komponen, Rincian Output Satker, Rincian Output dan Indikator Kinerja Kegiatan.
5. Masing-masing direktorat teknis diharapkan agar melakukan koordinasi kepada Satuan Kerja dibawahnya untuk melengkapi pelaporan level Komponen dan RO.
6. Masing-masing Satker dengan capaian RO rendah agar melakukan upaya:
 - a. Memastikan data-data terkait target per RO dan target volume RO agar sudah sesuai dengan data terbaru setelah dilakukan revisi anggaran terakhir. Jika ada perbedaan data, agar berkoordinasi dengan bagian yang menangani perencanaan di masing-masing unit kerja untuk dilakukan pemutakhiran data.
 - b. Memastikan pengisian Realisasi Volume RO, progress, dan keterangan telah terisi pada kolom Data Integrasi pada Aplikasi SMART.
7. Satker dengan capaian serapan rendah agar segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan serapan anggaran.
8. Satker dengan konsistensi anggaran rendah diharapkan agar melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA sesuai dengan realisasi belanjanya dan melakukan *updating* RPD halaman III DIPA triwulan IV tahun 2022 berdasarkan perhitungan rencana realisasi belanja Satker di triwulan IV tahun 2022 untuk diajukan revisinya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja NK Anggaran Ditjen PKH sebagaimana tercantum dalam Tabel 48 dengan nilai efisiensi sebesar **100,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 48. Nilai Efisiensi Ditjen PKH Tahun 2022

PROGRAM	OP	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	120,00%	3.904.232.672.000	3.441.107.100.920	4.685.079.206.400	1.243.972.105.480
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	55,00%	26.480.941.000	25.516.758.072	14.564.517.550	-10.952.240.522
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian	106,66%	324.201.683.000	317.792.174.865	345.782.869.659	27.990.694.794
Jumlah (Σ)			4.254.915.296.000	3.784.416.033.857	5.045.426.593.609	1.261.010.559.752
Efisiensi (E) = $\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					20,00%	
Nilai Efisiensi (NE) = $50\% + (E/20 \times 50)$					100,00%	

Sumber: Ditjen PKH, 2022

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2022 melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya penguatan dalam tata kelola anggaran yang merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan kerja yang pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja anggaran melalui pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) triwulanan, baik secara luring maupun secara daring. Pertemuan Monev tersebut menghadirkan peserta Tim Monev dari masing-masing Satker baik dari pusat maupun dari Unit Pelaksana Teknis dan Provinsi yang diisi dengan bimbingan teknis penginputan data, juga sekaligus dilakukan workshop pengentrian data, serta diskusi untuk penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Ditjen PKH.

Rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH, maka akan dilakukan koordinasi secara intensif ke seluruh Satker dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja profesional, mengikuti aturan, serta integritas dan komitmen semua pegawai yang kuat. Selain itu, akan dilakukan perbaikan perencanaan, terutama penyesuaian Informasi Kinerja agar mudah dalam monitoring dan evaluasi.

Adapun rekomendasi untuk perbaikan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH kepada semua unit kerja, yaitu:

1. Melakukan bedah DIPA/POK tahun 2023, antisipasi penyesuaian untuk awal tahun.
2. Persiapkan dan rancang pelaksanaan kegiatan mulai bulan Desember 2022.
3. Menyusun mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan tahun 2023.
4. Menyusun dan mendistribusikan Juknis dan Juklak pada bulan Januari tahun 2023.
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun (*timeline* yang sudah direncanakan), sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terjadwal dan tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun.
6. Melakukan lelang Pra-DIPA.
7. Percepatan input data pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SIRUP.
8. Melaksanakan kegiatan belanja barang dari awal tahun.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan melakukan tindakan pengendalian.

3.3 Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang diraih oleh Ditjen PKH tahun 2022 diantaranya:

1. Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh BIB Lembang dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 2. Penghargaan Predikat WBBM Tahun 2022

2. Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" oleh BET Cipelang dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 3. Penghargaan Predikat Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2021

3. Penghargaan SNI Award 2022 Peringkat Perak Kategori Organisasi Kecil Barang oleh BET Cipelang dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).



Gambar 4. Penghargaan Predikat SNI Award 2022 Peringkat Perak Kategori Organisasi Kecil Barang

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PKH awal Tahun 2022 sebesar Rp1.605.218.582.000,00 kemudian mendapatkan tambahan anggaran untuk penanggulangan PMK sehingga pagu alokasi anggaran menjadi Rp5.023.214.162.000,00 dan selanjutnya mengalami refocusing menjadi Rp4.254.915.296.000,00 Selama TA. 2022 terdapat revisi yang menyebabkan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar satker lingkup Ditjen PKH sebagai berikut:

a. Revisi DIPA I, Revisi Pemblokiran (*Automatic Adjustment*)

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2022 dan Surat Menteri Pertanian nomor: 193/RC.110/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penyampaian Rekapitulasi Pemblokiran (*Automatic Adjustment*) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat alokasi anggaran untuk *self blocking* sebesar Rp13.149.828.000,00 atau sebesar 0,82% dari total anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.605.218.582.000,00. Revisi ini ditetapkan dengan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-954/AG/AG.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-1/*Automatic Adjustment*) dengan pagu anggaran tetap Rp1.605.218.582.000,00.

b. Revisi DIPA II, Revisi Luncuran SBSN dan Refokusing Anggaran

Pada tahun anggaran 2021 BPTU-HPT Indrapuri mendapat alokasi anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp19.200.000.000,00, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Rapat Koordinasi Realisasi Anggaran SBSN Proyek Tahun Anggaran 2021 (TA 2021) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPTU-HPT Indrapuri Nomor: 23005/PL.220/F2.A/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 hal: Keputusan KPA untuk Melanjutkan Pekerjaan TA. 2021 serta Surat Kuasa Pengguna Anggaran BPTU-HPT Indrapuri Nomor:03009/KU.120/F2.A/01/2022 tanggal 1 Januari 2022 Hal: Usulan Peluncuran Kembali Anggaran SBSN, maka dilakukan revisi anggaran untuk berupa penambahan pagu yang bersumber dari SBSN sebesar Rp448.450.000,00 yang dialokasikan pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak pada RO SBSN Bull Center Indrapuri yang digunakan untuk pengadaan 1 Unit Hay Baller.

Selain itu terdapat usulan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran dalam satu Program antar RO maupun dalam RO yang sama, antar KRO maupun dalam KRO yang sama, antar Kegiatan maupun dalam Kegiatan yang sama, antar satker, antar wilayah kerja Kanwil DJPB. Pergeseran anggaran tersebut mengakibatkan perubahan RO Prioritas Nasional, perubahan alokasi dana Tugas Pembantuan, perubahan antar jenis belanja, dan perubahan pada akun belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda (akun 526) dengan penetapan revisi berdasarkan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-71/AG/Ag.3/2022 tanggal 17 Februari 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi Ke-2) dengan pagu anggaran menjadi Rp1.605.667.032.000,00.

c. Revisi DIPA III, Perubahan Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Wabah PMK

Menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian Nomor 96/RC.110/M/5/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Perubahan *Automatic Adjustment* Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengusulkan revisi anggaran berdasarkan Surat Nomor: 18038/RC.140/F/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 hal Usulan Revisi Anggaran. Perubahan blokir AA Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan semula Rp13.149.828.000,00 menjadi 42.499.262.000,00 bertambah sebanyak Rp29.349.434,00.

Selain itu dengan adanya wabah penyakit PMK di Indonesia maka perlu dilakukan refokusing anggaran yang digunakan untuk pengadaan vaksin 800.000 dosis dan operasional penanganan PMK senilai Rp40.017.548.000,00 serta produksi vaksin PMK sebanyak 200.000 dosis senilai Rp3.663.528.000,00.

Pagu anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah revisi III tetap sebesar Rp1.605.667.032.000,00 sesuai dengan surat Direktur Anggaran Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-244/AG/AG.3/2022 tanggal 24 Mei 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-3).

d. Revisi DIPA IV, Perubahan Blokir AA

Sebagai tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* I Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan Surat Menteri Pertanian Nomor: 108/RG.110/M/5/2022 tanggal 5 Mei 2022 hal: Penyampaian Penambahan *Automatic Adjustment* lingkup Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat tambahan alokasi blokir AA senilai Rp11.550.093.000,00, sehingga total pagu Rp54.049.355.000,00. Penetapan revisi berdasarkan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor:S-262/AG/Ag.3/2022 tanggal 3 Juni 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-4/Penambahan Blokir *Automatic Adjustment*) dengan pagu tetap.

e. Revisi DIPA V, Refokusing Anggaran

Berdasarkan keputusan rapat kerja dengan komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian tanggal 11 April 2022 dan Surat Menteri Pertanian Nomor: 87/RC.110/M/4/2022 tanggal 25 April 2022 hal: Persetujuan Perubahan APBN Kementerian Pertanian TA 2022, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan revisi anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran senilai Rp15.000.000.000,00 ke Badan Karantina untuk penguatan sistem informasi perkarantina sebagai big data dan pelaksanaan klinik ekspor, dengan pergeseran anggaran tersebut volume RO Ternak Ruminansia potong mengalami pengurangan sebanyak 1.000 ekor.

Penetapan revisi melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor:S-323/AG/AG.3/2022 tanggal 10 Juni 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-5) sehingga pagu anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Rp1.590.667.032.000,00

f. Revisi DIPA VI, Realokasi Anggaran BA BUN

Dalam rangka penanganan penyakit PMK Menteri Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-204/MK.2/2022 tanggal 7 Juli 2022 hal: Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku TA. 2022, telah menyetujui realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) TA 2022 sebesar Rp3.088.861.535.000,00, dengan rincian:

- 1) Pelayanan kesehatan hewan sebesar Rp2.412.111.470.000,00 dalam rangka:
 - a) Pengadaan vaksin, biaya operasional dan logistik pendukung untuk vaksinasi PMK 28.841.639 dosis;
 - b) Pengadaan, biaya operasional dan logistik pendukung pengobatan terpapar PMK sebanyak 2.500.000 dosis;
 - c) Distribusi vaksin dan obat termasuk untuk pengadaan alat penyimpanan vaksin (*cold storage*) dari satker pusat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ke satker OPD tugas pembantuan.
- 2) Pendataan dan penandaan ternak sebesar Rp526.750.065.000,00 dalam rangka pengadaan dan biaya operasional pengaplikasian alat penanda ternak (*ear tag*) sebanyak 14.825.819 unit pada ternak yang telah diberikan vaksinasi untuk mendukung proses monitoring vaksinasi.
- 3) Penggantian ternak sebesar Rp150.000.000.000,00 dalam rangka pemberian bantuan/kompensasi kepada peternak yang ternaknya diberlakukan tindakan depopulasi untuk mencegah penyebaran PMK.

Dengan penambahan realokasi anggaran BA BUN alokasi anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Rp4.679.528.567.000,00. Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-394/AG/AG.3/2022 tanggal 14 Juli 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-6).

g. Revisi DIPA VII, Buka Blokir AA

Berdasarkan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-230/MK.2/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Tanggapan Atas Permohonan Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian TA 2022, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat pergeseran anggaran buka blokir AA dari eselon I lain sebesar Rp343.685.595.000,00 dan buka blokir AA di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri sebesar Rp53.213.005.000,00, sehingga buka blokir yang dimanfaatkan untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp396.898.600.000,00 dengan rincian:

- 1) Sebesar Rp22.500.000.000,00 pada RO Ternak Yang Diganti/Diberikan Bantuan (PEN) (1784 BEL 001) digunakan dalam rangka koordinasi dan verifikasi penerima bantuan penggantian ternak/kompensasi untuk menunjang penyaluran penggantian ternak/pemberian kompensasi untuk ternak terdampak PMK yang diberlakukan disposal ternak;
- 2) Sebesar Rp198.734.572.000,00 pada RO Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN) (1784 QAH 001) digunakan dalam rangka:
 - a) Pengadaan desinfektan untuk pencegahan penularan PMK sebanyak 312.212 kg sebesar Rp165.784.572.000,00. Desinfektan tersebut akan diaplikasikan antara lain pada kandang ternak milik masyarakat untuk mencegah penyebaran PMK termasuk dalam rangka pengobatan luka pada ternak terdampak PMK;

- b) Pelatihan petugas vaksinasi PMK sebanyak 20.000 orang sebesar Rp16.000.000.000,00;
- c) Koordinasi dan pelaporan penanganan PMK sebesar Rp16.950.000.000,00.
- 3) Sebesar Rp143.752.128.000,00 pada RO Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (PEN) digunakan dalam rangka pengujian sampel penyakit PMK sebanyak 345.558 sampel yang meliputi antara lain untuk pengadaan bahan/alat pengujian PMK (metode RT PCR dan ELISA), surveilans dan pengambilan sampel PMK;
- 4) Sebesar Rp5.292.900.000,00 pada RO Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak (1785 AEA 001) digunakan dalam rangka supervisi, bimtek, monitoring dan evaluasi penandaan ternak yang telah divaksin PMK;
- 5) Sebesar Rp1.000.000.000,00 pada RO Layanan Hukum (1787 EBA 957) digunakan dalam rangka advokasi penanganan wabah PMK yang meliputi koordinasi dalam rangka penyusunan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan wabah PMK;
- 6) Sebesar Rp25.619.000.000,00 pada RO Layanan Hubungan Masyarakat (1787 EBA 958) digunakan dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penanganan wabah PMK yang meliputi antara lain peliputan PMK, publikasi penanganan PMK, dan pencetakan bahan KIE.

Dengan Buka Blokir AA anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Rp5.033.854.162.000,00. Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-450/AG/AG.3/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-7).

- h. Revisi DIPA VIII, Penggunaan Saldo Awal BLU Satker Singosari (Revisi Kanwil)
Dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga, meningkatkan efektifitas, kulaitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari mengusulkan revisi penggunaan saldo awal BLU sebesar Rp10.640.000.000,00. Revisi di tetapkan melalui Surat Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Timur Nomor: S-3356/WPB.16/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Hal Pengesahan Revisi DIPA Ke-4 Tahun 2022 Sakter 018-411956, dengan revisi ini pagu anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan menjadi Rp5.033.854.162.000,00.
- i. Revisi DIPA IX, Refocusing
Revisi anggaran dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemanfaatan sisa anggaran kontraktual untuk kegiatan/proyek SBSN, dengan rincian:
 - 1) Pergeseran anggaran sebesar Rp950.748.000,00 dari RO SBSN Prasarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala ke RO SBSN Sarana *Main Farm*

- Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin pengolah pakan ternak (*chopper* dan *mixer* pakan);
- 2) Pergeseran anggaran sebesar Rp1.194.986.000,00 pada RO SBSN Prasarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala dalam rangka pengadaan/pembangunan gedung pengawas ternak;
 - 3) Pergeseran anggaran sebesar Rp2.002.042.000,00 dari RO SBSN Prasarana Sentra Unit Pembibitan Ternak Kerbau Nasional Siborongborong ke RO Sarana Sentra Unit Pembibitan Ternak Kerbau Nasional Siborongborong dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin pendukung antara lain truk, traktor, USG, *chopper*, mikroskop, alat ukur kadar air dan keasaman, meubeler, alat penunjang rapat, dan sebagainya;
 - 4) Pergeseran anggaran sebesar Rp626.728.000,00 pada RO SBSN Prasarana Sentra Unit Pembibitan Ternak Kerbau Nasional Siborongborong dalam rangka pengadaan/pembangunan rumah jaga, menara pandang, paving blok, dan sumur bor;
 - 5) Pergeseran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari RO Ternak Ruminansia Perah (PEN) dan Ternak Ruminansia Potong (PEN) sebesar Rp35.717.472.000,00. Pengurangan pada dua RO tersebut dikarenakan terdapat beberapa wilayah kegiatan bantuan ternak ruminansia potong dan perah yang masuk dalam zona terdampak PMK sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan di wilayah tersebut;
 - 6) Pergeseran anggaran pada RO Layanan Perkantoran sebesar Rp3.736.079.000,00 dari komponen 001 Gaji dan Tunjangan ke komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
 - 7) pergeseran anggaran komunikasi informasi dan edukasi (KIE) penanganan wabah PMK pada RO Layanan Kehumasan sebesar Rp3.580.000.000,00 dari semula belanja barang (perjadin dan belanja bahan KIE penanganan wabah PMK) menjadi belanja modal pengadaan papan reklame/*billboard* dalam rangka penyebaran informasi penanganan wabah PMK pada 23 (dua puluh tiga) lokasi di lingkungan satker UPT Ditjen PKH Kementan.

Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-568/AG/AG.3/2022 tanggal 24 September 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-8), dengan pagu anggaran tetap yaitu Rp5.033.854.000,00.

j. Revisi DIPA X, Gaji

Melalui surat Nomor B-3731/RC.110/A/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 hal Penyesuaian Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai, Sekretaris Jenderal mengajukan penyesuaian pergeseran anggaran belanja pegawai dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai (gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji) pada Badan Karantina Pertanian dan anggaran tunjangan kinerja lingkup Kementerian

Pertanian pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan rincian sebagaimana Tabel 49.

Tabel 49. Pergeseran/Realokasi Belanja Pegawai Tahun 2022

(angka dalam ribuan Rp)							
No	Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Kelebihan Belanja Pegawai (Gaji)	Kekurangan Belanja Pegawai (Gaji dan Tukin)	Pergeseran/Realokasi Belanja Pegawai		
					Memenuhi kekurangan Gaji di Barantan	Memenuhi Kekurangan Tukin di Setjen	Jumlah Pergeseran
1.	Setjen	1.260.253.420	5.163.938	20.528.918	-	15.364.980	15.364.980
	- Gaji		5.163.938		-	(5.163.938)	(5.163.938)
	- Tukin			20.528.918	-	20.528.918	20.528.918
2.	Itjen	23.113.360	217.437		(47.015)	(170.422)	(217.437)
3.	Ditjen TP	46.192.278	525.410		-	(525.410)	(525.410)
4.	Ditjen Hortikultura	24.704.236	724.985		(724.985)	-	(724.985)
5.	Ditjen Perkebunan	68.952.970	4.313.961		-	(4.313.961)	(4.313.961)
6.	Ditjen PKH	140.358.110	1.035.379		-	(1.035.379)	(1.035.379)
7.	Ditjen PSP	27.971.677	3.442.397		-	(3.442.397)	(3.442.397)
8.	BSIP	478.618.420	7.100.000		(7.100.000)	-	(7.100.000)
9.	BPPSDMP	138.646.037	2.876.737		-	(2.876.737)	(2.876.737)
10.	BKP/Bapanas	21.475.203	3.000.674		-	(3.000.674)	(3.000.674)
11.	Barantan	288.946.205		7.872.000	7.872.000		7.872.000
	JUMLAH	2.519.231.916	28.400.918	28.400.918	-	-	-

Keterangan:
- Alokasi tukin pada Setjen merupakan alokasi tukin untuk seluruh pegawai Kementan dan Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan distribusi usulan pergeseran anggaran tersebut di atas, Ditjen PKH Kementan mengajukan usulan pergeseran anggaran belanja pegawai operasional pada RO Layanan Perkantoran dari unit Ditjen PKH Kementan ke Sekretariat Jenderal Kementan dalam rangka pemenuhan pagu minus belanja pegawai tunjangan kinerja lingkup Kementerian Pertanian yang dialokasikan pada Sekretariat Jenderal Kementan. Jumlah pergeseran anggaran adalah sebesar Rp1.035.379.000,00 yang berasal dari perkiraan kelebihan belanja pegawai Ditjen PKH Kementan TA 2022 pada unsur belanja gaji pokok.

Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-703/AG/AG.3/2022 tanggal 20 Oktober 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA. 2022 (Revisi ke-9), dengan pagu anggaran menjadi yaitu Rp5.032.818.783.000,00.

k. Revisi DIPA XI, Refocusing Kegiatan

Revisi anggaran adalah revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap merupakan revisi optimalisasi anggaran penanganan PMK dan pergeseran anggaran pada kegiatan:

- 1) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;
- 2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak;
- 3) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

- 4) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak; dan
- 5) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-776/AG/AG.3/2022 tanggal 2 November 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-10), dengan pagu anggaran tetap yaitu Rp5.032.818.783.000,00.

I. Revisi DIPA XII, Pengembalian AA

Revisi anggaran dilakukan dalam rangka perubahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan realokasi anggaran yang terblokir ke BA BUN, dengan rincian:

- 1) Terdapat penambahan target PNBP pada 3 (tiga) satker yaitu Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi, Balai Veteriner (Bvet) Medan, dan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Sembawa. Penambahan pagu belanja PNBP sebesar Rp2.970.554.000,00 yang akan digunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium pengujian pakan dan satu unit kendaraan fungsional (*pickup double gardan*) pengambilan sampel pakan ternak dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pakan di BPMSP Bekasi; pengadaan empat unit alat pengolah data (PC/laptop) dan tiga unit printer dalam rangka pelayanan pengujian penyakit hewan di BVet Medan dan Pengadaan peralatan dan mesin produksi ternak serta pengadaan bahan asupan pakan ternak di BPTU-HPT Sembawa;
- 2) penurunan target PNBP pada BPTUHPT Siborongborong tersebut di atas, diusulkan pengurangan pagu belanja PNBP sebesar Rp410.743.000,00 pada RO Bibit Ternak Unggul (PEN) dengan volume tetap. Penurunan target PNBP tersebut disebabkan antara lain karena adanya wabah penyakit *African Swine Fever* (ASF) dan penyakit mulut dan kuku (PMK) sehingga BPTUHPT Siborongborong tidak dapat melakukan layanan pendistribusian (penjualan) bibit ternak yang merupakan sumber PNBP secara optimal. Selain itu bibit ternak yang dihasilkan juga lebih diutamakan untuk *restocking* ternak babi di UPT untuk menjaga tingkat populasi ternak UPT yang ideal;
- 3) Melalui surat Nomor 287.1/RC.110/M/11/2022 tanggal 23 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA. 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yang merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2022 yang Terblokir ke BA BUN Ditjen PKH realokasi anggaran (pengurangan anggaran blokir untuk digeser ke BA BUN) sebesar Rp1.015.000.000,00.

Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-878/AG/AG.3/2022 tanggal 2 Desember 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA. 2022 (Revisi ke-11), dengan pagu anggaran menjadi yaitu Rp5.034.363.594,00.

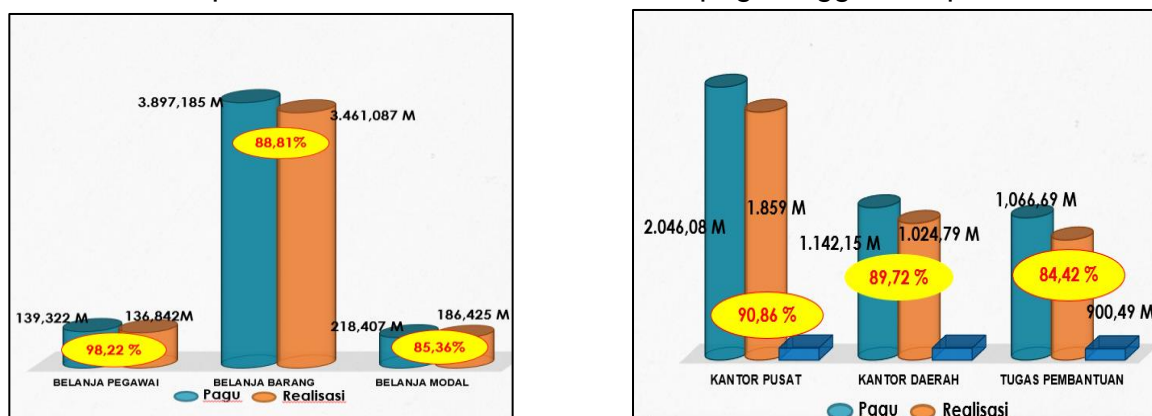
m. Revisi DIPA XIII, Pengembalian Anggaran BA BUN

Revisi pengembalian anggaran penanganan wabah PMK TA. 2022 yang didanai dari SP SABA 999.08 dari Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) ke BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya). Usulan tersebut sebagai tindak lanjut atas surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S-542/MK.2/2022 tanggal 8 Desember 2022 hal: Penetapan Revisi SP SABA 999.08 pada Kementerian Pertanian (BA 018) Nomor S-204/MK.2/2022 tanggal 7 Juli 2022 Dalam Rangka Pengembalian Anggaran ke BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) TA. 2022. Jumlah anggaran yang dilakukan pengembalian ke BA BUN adalah sebesar Rp779.448.297.000,00.

Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-945/AG/AG.3/2022 tanggal 16 Desember 2022 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2022 (Revisi ke-12), sehingga pagu anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada akhir tahun anggaran 2022 menjadi yaitu Rp4.254.915.297.000,00.

Dari anggaran Rp4,254 triliun dialokasikan untuk Kantor Pusat sebesar Rp2,046 triliun (48,09%), alokasi Kantor Daerah sebesar Rp1,142 triliun (26,84%), dan alokasi Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp1,066 triliun (25,07%) yang didistribusikan pada 57 satker, terdiri dari 1 Kantor Pusat, 22 Kantor Daerah (UPT) dan 34 provinsi. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2022 sebesar Rp3,784 triliun atau 88,94% dari total anggaran Rp4,254 triliun.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Kantor Pusat sebesar Rp 1,859 triliun atau 90,86% dari pagu anggaran Rp2,046 triliun, (ii) Kantor Daerah (UPT) sebesar Rp 1,025 triliun atau 89,72% dari pagu anggaran Rp 1,142 triliun, dan (iii) Kantor Provinsi sebesar Rp 900,448 miliar atau 84,42% dari pagu anggaran Rp 1,066 triliun.



Grafik 5. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan Tahun 2022
Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Kementerian Keuangan, 2022

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu (i) Belanja Pegawai sebesar Rp136,842 miliar atau 98,22% dari pagu anggaran Rp139,322 miliar,- (ii) Belanja Barang sebesar Rp3,461 triliun atau 88,81% dari pagu anggaran Rp3,897 triliun (iii) Belanja Modal sebesar Rp186,425 miliar atau 85,36% dari pagu Rp218,407 miliar.

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama yaitu: (i) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp 1,104 triliun atau 88,18% dari pagu anggaran Rp 1,253 triliun (ii) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp125,473 miliar atau 93,62% dari pagu anggaran Rp134,028 miliar (iii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rp 2.170,265 miliar atau 87,67% dari pagu anggaran Rp2.475,479 miliar (iv) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp40,869 miliar atau 96,83% dari pagu anggaran Rp 42,205 miliar (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Rp 25,516 miliar atau 96,36% dari pagu anggaran Rp26,480 miliar dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH sebesar Rp317,792 miliar atau 98,02% dari pagu anggaran Rp 324,201 miliar.

Tabel 50. Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2022 (dalam ribuan)

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak	134.028.982	125.473.975	93,62
2	1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	2.475.479.506	2.170.265.552	87,67
3	1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1.252.518.395	1.104.437.107	88,18
4	1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	42.205.789	40.869.834	96,83
5	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	324.201.683	317.792.174	98,02
6	5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	26.480.941	25.516.758	96,36
Total		4.254.915.296	3.784.355.403	88,94

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Dalam rangka mendukung kelancaran dan sebagai acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan, pada tahun 2022 Ditjen PKH telah mengeluarkan sebanyak 25 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), antara lain: a) Direktorat Perbibitan dan Produksi sebanyak 5 (lima) NSPK; b) Direktorat Pakan sebanyak 4 (empat) NSPK; c) Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 7 (tujuh) NSPK; d) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 6 (enam) NSPK; dan e) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 3 (tiga) NSPK. Rincian NSPK per Direktorat Teknis dapat dilihat pada Lampiran 14.

IV. PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKH merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Ditjen PKH. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Ditjen PKH kepada masyarakat/publik.

Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2022 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Program, 10 (sepuluh) Indikator Kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 1 (satu) Indikator Kinerja masuk kategori berhasil. Oleh karena itu, pencapaian kinerja Ditjen PKH dikatakan **sangat berhasil**.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Ditjen PKH dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Ditjen PKH tahun 2022.

Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2022 khususnya perkembangan capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program tersebut juga tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Ditjen PKH baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Ditjen PKH. Selain itu, juga dukungan pengendalian internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Capaian Indikator Kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis*; (6) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (8) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (9) Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (10) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian Indikator Kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022, khususnya pada peningkatan populasi dan produksi ternak, peningkatan volume dan nilai ekspor Subsektor Peternakan, penurunan impor daging sapi dan susu menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi program yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

1. Pengembangan ternak ruminansia (sapi/kerbau) melalui kegiatan SIKOMANDAN tahun 2020-2022 mampu menambah kelahiran sebanyak 6.790.013 ekor. Namun demikian, pengembangan sapi potong di Indonesia, saat ini masih terkendala belum banyaknya pengembangan budidaya yang berskala ekonomi, sehingga produksi daging sapi/kerbau belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
2. Produksi daging khususnya ruminansia kecil telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
3. Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk pasar dalam negeri.
4. Produksi susu nasional tahun 2022 sebesar 968.980 ton atau mengalami kenaikan sebesar 2,39% dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

Untuk menjawab permasalahan terkait dengan ketersediaan daging sapi/kerbau, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Ditjen PKH, antara lain:

1. Penguatan UPT Perbibitan, termasuk optimalisasi asset lahan UPT untuk pengembangan sapi.
2. Pengembangan sapi potong berdasarkan pemetaan wilayah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
3. Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk memperkuat kelembagaan peternakan sapi potong melalui Desa Korporasi Sapi.
4. Mondorong pembiayaan yang bersumber dari non APBN antara lain: kredit perbankan (KUR), kerja sama investasi antar negara.
5. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
6. Melanjutkan program percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri melalui kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri).
7. Penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.
8. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
9. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

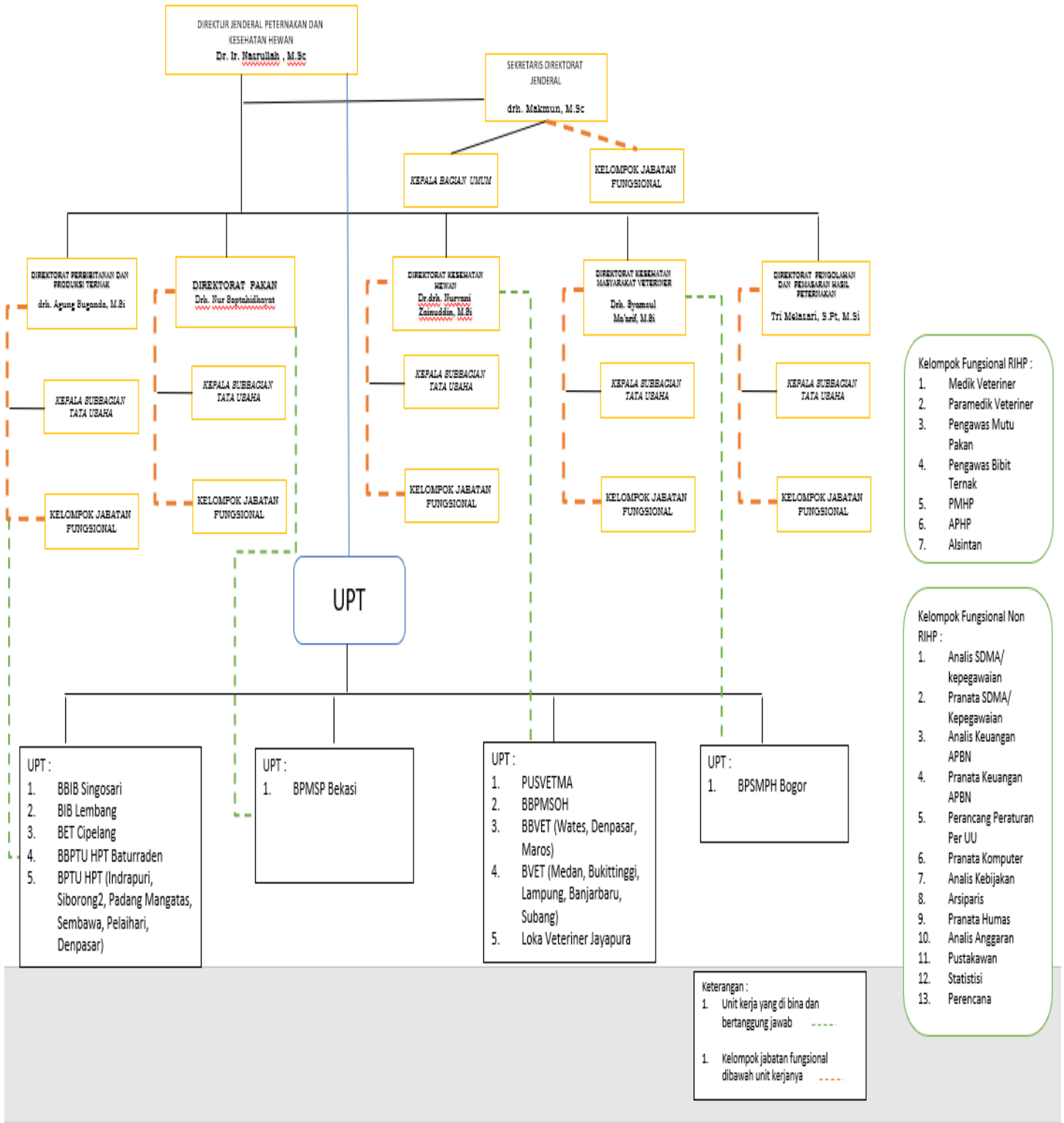
Dalam mengatasi permasalahan terkait upaya stabilisasi perunggasan, ada beberapa hal yang akan dilakukan Ditjen PKH, antara lain:

1. Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
2. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor Subsektor Peternakan.
3. Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
4. Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor.
5. Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam ras.

Untuk mengatasi permasalahan terkait persusuan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Ditjen PKH, antara lain: (1) Perlu menambah anggaran untuk *men-support* pengembangan sapi perah yang sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pengembangan sapi potong; (2) Mendorong peningkatan produktivitas susu sapi di tingkat peternak; (3) Mendorong peternak untuk memanfaatkan pembiayaan perbankan untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah di tingkat peternak yang masih di bawah skala ekonomis; dan (4) Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan. Sedangkan untuk pengembangan kambing dan domba akan dilakukan beberapa upaya yaitu: (1) Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk memperkuat kelembagaan peternak kambing/domba melalui kegiatan Korporasi Kambing/Domba; (2) Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain: kredit perbankan (KUR), kerja sama investasi antar negara; (3) Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif; (4) Koordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba atau Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak agar melakukan penyeleksian terhadap ternak yang diekspor (bukan merupakan bibit unggul); (5) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 2. Data Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	IC	ID	Gol I	IIA	IIB	IIC	IID	Gol II	IIIA	IIIB	IIIC	IID	Gol III	IVA	IVB	IVC	IVD	IVE	Gol IV	JUMLAH	
1	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	2	-	1	4	7	17	35	21	29	102	9	1	1	-	-	-	11	120
3	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	13	18	44	10	4	1	-	-	-	15	61
4	DIREKTORAT PAKAN	-	-	-	-	-	1	-	1	9	4	6	16	35	4	4	1	-	-	-	9	45
5	DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN	-	-	-	1	-	1	-	2	3	14	4	15	36	21	8	1	3	-	-	33	71
6	DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	2	8	19	16	6	-	1	-	-	23	44
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	-	-	-	-	-	2	-	2	8	6	14	7	35	8	5	-	-	-	-	13	50
8	PUSAT VETERINER FARMA	-	-	-	-	-	11	7	18	15	20	11	20	66	19	4	-	-	-	-	23	107
9	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNG SINDUR, BOGOR	-	-	-	1	-	8	5	14	7	11	5	18	41	11	1	2	1	-	-	15	70
10	BALAI BESAR VETERINER WATES	-	-	-	1	-	8	1	10	5	15	11	24	55	15	5	-	-	-	-	20	85
11	BALAI BESAR VETERINER MAROS	-	-	-	5	-	8	3	16	14	13	12	9	48	7	3	-	-	-	-	10	74
12	BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	-	-	-	3	-	8	3	14	6	8	4	7	25	8	3	5	-	-	-	16	55
13	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN	-	1	1	8	13	11	12	44	12	17	10	21	60	4	3	1	-	-	-	8	113
14	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	-	-	-	1	1	7	6	15	20	7	10	14	51	11	2	1	-	-	-	14	80
15	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBAUNG	-	1	1	-	2	5	10	17	7	12	9	15	43	5	2	-	-	-	-	7	68
16	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR	-	3	3	2	2	7	5	16	7	8	6	15	36	3	1	-	-	-	-	4	59
17	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN	-	1	1	-	-	5	8	13	8	9	5	9	31	10	5	-	-	-	-	15	60
18	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN	-	-	-	-	-	3	6	9	7	9	5	9	30	2	-	-	-	-	-	2	41
19	BALAI VETERINER MEDAN	-	-	-	2	1	3	3	9	6	16	6	10	38	7	2	-	-	-	-	9	56
20	BALAI VETERINER BUKITTINGGI	-	-	-	-	2	7	5	14	-	15	7	13	35	4	5	2	-	-	-	11	60
21	BALAI VETERINER LAMPUNG	-	-	-	-	-	8	3	11	4	13	12	10	39	6	3	-	-	-	-	9	59
22	BALAI VETERINER BANJARBARU	-	-	-	-	1	5	7	13	3	8	4	12	27	5	6	1	-	-	-	12	52
23	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI	2	-	2	-	1	5	3	9	6	10	8	16	40	6	4	-	-	-	-	10	61
24	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG	-	3	3	2	2	3	16	23	16	18	3	3	40	5	1	-	-	-	-	6	72
25	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MANGATAS	-	-	-	5	1	13	10	29	16	11	9	8	44	3	2	-	-	-	-	5	78
26	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	3	-	3	3	-	14	12	29	11	19	6	7	43	6	1	-	-	-	-	7	82
27	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI	-	-	-	-	-	5	13	18	14	12	2	9	37	-	2	-	-	-	-	2	57
28	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR	-	1	1	2	4	13	8	27	7	9	5	3	24	5	-	-	-	-	-	5	57
29	BALAI VETERINER SUBANG	-	-	-	1	1	5	2	9	5	5	16	7	33	8	1	-	-	-	-	9	51
30	LOKA VETERINER PAPUA	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	-	4	1	-	-	-	-	-	1	7
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		5	10	15	39	31	171	154	395	238	345	226	352	1.161	219	84	16	6	-	325	1.896	

Sumber: Ditjen PKH, Tahun 2022

REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN AKHIR
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 PER : 05-01-2023

No	Jenis Kelamin	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Laki-Laki	12	233	259	28	0	128	1	0	364	32	25	1082
2	Perempuan	11	308	215	7	0	153	1	0	119	0	0	814
	Jumlah	23	541	474	35	0	281	2	0	483	32	25	1896

Sumber: Ditjen PKH, Tahun 2022

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN FUNGSIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Desember 2022

No	Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PUSTAKAWAN	2	4	6
2	PRANATA KOMPUTER	18	3	21
3	ARSIPARIS	10	12	22
4	STATISTISI	3	1	4
5	MEDIK VETERINER	132	229	361
6	PARAMEDIK VETERINER	168	130	298
7	PENGAWAS BIBIT TERNAK	132	69	201
8	ANALIS KEPEGAWAIAN	6	13	19
9	PERENCANA	14	15	29
10	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3	2	5
11	PRANATA HUMAS	6	14	20
12	PENGAWAS MUTU PAKAN	95	58	153
13	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	11	16	27
14	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN(APHP)	9	3	12
15	ANALIS KETAHANAN PANGAN	1	1	2
16	ANALIS KEBIJAKAN	2	5	7
17	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	8	3	11
18	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	2	1	3
19	ANALIS ANGGARAN	1	0	1
20	PRANATA KEUANGAN APBN	6	10	16
	Jumlah	629	589	1.218

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
 KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
 Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id
 Website : http://ditjenpkh.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah
 Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
 Jabatan : Menteri Pertanian
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama,



Nasrullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak	Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik)	7,92 %
		Peningkatan Produksi Susu	0,61 %
		Peningkatan Produksi Telur	6,46 %
2	Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	85,5 %
3	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	74,5 %
4	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80 %
5	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	92,25 %
6	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	90 %
7	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 %
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	33,50 <i>Nilai</i>
9	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel Dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	88,93 <i>Nilai</i>

No	Program	Anggaran
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 26.480.941.000
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 3.904.412.832.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 324.201.683.000
Total		Rp. 4.255.095.456.000

Menteri Pertanian,

Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, Desember 2022

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nasrullah

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 4. Tabel Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2018-2022

(000 ton)						
No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2018	2019	2020	2021	2022 ^a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	DAGING/MEAT	4.778,78	4.888,09	4.555,67	4.541,66	5.157,80
1	Sapi/Beef	497,97	504,80	453,42	487,80	498,92
2	Kerbau/ Buffalo	25,35	24,79	18,53	18,94	21,12
3	Kuda/Horse	2,40	1,85	1,24	1,29	1,34
4	Kambing/Mutton	70,15	72,85	61,71	59,73	63,66
5	Domba/Lamb	82,27	70,07	54,19	50,70	54,65
6	Babi/Pork	215,81	236,28	281,32	260,85	262,76
7	Ayam Buras/Native Chicken	287,16	292,33	270,21	269,80	275,42
8	Ayam Ras Petelur/Layer	141,60	141,51	152,76	159,39	170,58
9	Ayam Ras Pedaging/Broiler	3.409,56	3.495,09	3.219,12	3.185,70	3.765,57
10	Itik/Duck	38,65	39,81	35,75	41,02	37,31
11	Itik Manila/Muscovy Duck	6,03	6,75	5,36	4,66	4,66
12	Kelinci/Rabbit	0,51	0,70	0,46	0,49	0,49
13	Puyuh/Quail	1,32	1,26	1,60	1,29	1,31
II	TELUR/EGG	5.267,93	5.354,62	5.874,38	5.893,43	6.322,55
1	Ayam Buras/Native Chicken	212,34	246,69	358,86	368,70	375,25
2	Ayam Ras Petelur/Layer	4.688,12	4.753,38	5.141,57	5.156,00	5.566,34
3	Itik/Duck	306,54	294,01	316,95	313,84	322,61
4	Itik Manila/Muscovy Duck	31,97	34,67	32,35	30,63	32,58
5	Puyuh/Quail	28,96	25,86	24,65	24,27	25,77
III	SUSU SAPI/DAIRY CATTLE MILK	951,00	944,54	946,91	946,39	968,98

Keterangan/Note : ^a) Angka sementara/Preliminary figures
 Produksi Daging Ayam Ras Pedaging dan Telur Ayam Ras Petelur dari laporan perusahaan melalui Sistem Perunggasan Nasional yang diambil pada tanggal 6 Oktober 2022 untuk laporan tahun 2022 yang diolah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan / The source of Broiler Meats and Layer Eggs production from the company's report through the National Poultry System that taken on October 6, 2022 for reports in 2022 processed by the Directorate General of Livestock and Animal Health Services

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 5. Tabel Populasi Ternak Tahun 2018-2022

(000 Ekor/000 Head)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2018	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	TERNAK BESAR/LARGE LIVESTOCK					
1	Sapi Potong/Beef Cattle	16.433	16.930	17.489	17.977	18.610
2	Sapi Perah/Dairy Cattle	582	565	568	582	593
3	Kerbau/Buffalo	894	1.134	1.154	1.143	1.170
4	Kuda/Horse	378	375	384	382	394
II	TERNAK KECIL/SMALL LIVESTOCK					
1	Kambing/Goat	18.306	18.463	18.690	18.904	19.398
2	Domba/Sheep	17.611	17.834	17.524	15.636	15.615
3	Babi/Pig	8.254	8.542	7.623	7.178	7.280
III	TERNAK UNGGAS/POULTRIES					
1	Ayam Buras/Native Chicken	300.978	301.761	305.445	306.392	314.101
2	Ayam Ras Petelur/Layer	324.153	336.490	345.181	386.126	378.591
3	Ayam Ras Pedaging/Broiler	3.137.707	3.169.805	2.919.516	2.889.208	3.168.325
4	Itik/Duck	50.528	47.783	48.245	48.368	49.877
5	Itik Manila/Muscovy Duck	9.024	9.446	8.325	8.202	8.474
IV	ANEKA TERNAK/VARIOUS LIVESTOCK					
1	Kelinci/Rabbit	1.332	1.247	1.199	1.193	1.250
2	Puyuh/Quail	14.062	14.844	15.223	16.015	16.481

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

Populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2018 dan 2019 bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Pusat Statistik/ Beef Cattle, Dairy Cattle, and Buffaloes Population in 2018-2019 from the Directorate General of Livestock and Animal Health Services and BPS-Statistics Indonesia

Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari laporan perusahaan melalui sistem perunggasan nasional yang diolah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan / The source of Layers and Broilers Population from the company's report through the National Poultry System processed by the Directorate General of Livestock and Animal Health Services

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 6. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2022

No.	Jenis unit usaha	Jumlah Unit Usaha	Jumlah sampel keseluruhan	Jumlah sampel yang memenuhi persyaratan	% sampel yang memenuhi persyaratan	Paramater Uji
	Daging	412	9.245	8.505	92%	
1	Cold Storage	76	1.991	1.911	96%	Cemaran mikroba, residu obat, logam berat
2	Distributor Daging	3	92	83	90%	Cemaran mikroba, residu obat, logam berat
3	Kios Daging/Swalayan	136	3.697	3.365	91%	Cemaran mikroba, residu obat, logam berat
4	RPH-B	4	108	105	97%	Cemaran mikroba, residu obat, logam berat
5	RPH-U	87	1.495	1.391	93%	Cemaran mikroba, residu obat, logam berat
6	RPH-R	71	1.305	1.149	88%	Cemaran mikroba, residu obat, logam berat
7	Unit Pengolahan Daging	36	556	489	88%	Cemaran mikroba
	Telur	137	3143	3.080	98%	
8	Budidaya Unggas Petelur	37	1.040	1.040	100%	Cemaran mikroba, residu obat
9	Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi	89	1.950	1.950	100%	Cemaran mikroba, residu obat
10	Unit Pengolahan telur	11	153	153	100%	Cemaran mikroba
	Susu Segar	104	1.987	1.808	91%	
11	Koperasi Susu	15	327	301	92%	Cemaran mikroba, residu obat
12	Unit Penampungan Susu	55	1.234	1.111	90%	Cemaran mikroba, residu obat
13	Unit Pengolahan Susu	35	426	383	90%	Cemaran mikroba
	Jumlah Keseluruhan	653	14.375	13.560	94%	

Sumber: Direktorat Kesmavet, Ditjen PKH, 2022

Tabel Rincian Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Hewan per UPT dan Wilayah Kerja

UPT/Lokasi Sampling	Jumlah Sampel Produk
BBVet Wates	2.030
D.I.Yogyakarta	228
Jawa Tengah	798
Jawa Timur	1.004
BBVet Maros	894
Gorontalo	69
Maluku	92
Maluku Utara	92
Papua	69
Papua Barat	69
Sulawesi Barat	92
Sulawesi Selatan	207
Sulawesi Tengah	46
Sulawesi Tenggara	66
Sulawesi Utara	92
BBVet Denpasar	674
Bali	469
Nusa Tenggara Barat	84
Nusa Tenggara Timur	121
BVet Medan	760
Aceh	140
Sumatera Utara	620
BVet Bukittinggi	1.372
Jambi	374
Kepulauan Riau	182
Riau	365
Sumatera Barat	451
BVet Lampung	552
Bangka Belitung	152
Bengkulu	75
Lampung	205
Sumatera Selatan	120
BVet Banjarbaru	1.019
Kalimantan Barat	429
Kalimantan Selatan	145
Kalimantan Tengah	136
Kalimantan Timur	225
Kalimantan Utara	84
BVet Subang	1.884
Banten	446
DKI Jakarta	793
Jawa Barat	644
BPMSPH Bogor	4.474
Banten	527
DIY	198
Jakarta	804
Jawa Barat	1.712
Jawa Tengah	519
Jawa Timur	438
Lampung	276
UPTD Lab Kesmavet Provinsi Jawa Barat	296
Jawa Barat	296
UPTD Lab Kesmavet Provinsi DKI Jakarta	220
DKI Jakarta	220
UPTD Lab Kesmavet Provinsi Banten	200
Banten	200
Jumlah Keseluruhan	14.375

Sumber: Direktorat Kesmavet, Ditjen PKH, 2022

Lampiran 7. Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit *Rabies* dan *Anthrax* Tahun 2022
Dibandingkan dengan Kasus Tahun 2021

Provinsi	Kasus Rabies			Kasus Anthrax		
	2021	2022	Status	2021	2022	Status
Aceh	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Bali	0	20	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Bangka Belitung	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Banten	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Bengkulu	0	1	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
DI Yogyakarta	0	0	Terkendali	0	23	Tidak Terkendali
DKI Jakarta	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Gorontalo	6	1	Terkendali	0	0	Terkendali
Jambi	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Jawa Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Jawa Tengah	0	0	Terkendali	1	0	Terkendali
Jawa Timur	0	0	Terkendali	13	0	Terkendali
Kalimantan Barat	13	14	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Selatan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Tengah	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Timur	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Utara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Kepulauan Riau	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Lampung	0	1	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Maluku	6	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Maluku Utara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Nusa Tenggara Barat	10	1	Terkendali	0	0	Terkendali
Nusa Tenggara Timur	4	8	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Papua	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Provinsi	Kasus Rabies	Kasus Anthrax	Provinsi	Kasus Rabies	Kasus Anthrax	Status
Riau	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Selatan	7	14	Tidak Terkendali	4	0	Terkendali
Sulawesi Tengah	1	2	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Tenggara	0	2	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Utara	9	6	Terkendali	0	0	Terkendali
Sumatera Barat	0	8	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Sumatera Selatan	2	1	Terkendali	0	0	Terkendali
Sumatera Utara	3	6	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2022

Lampiran 8. Status Kesehatan Hewan Per Provinsi dan Per Penyakit Tahun 2022

Tabel Status Kesehatan Hewan Per Provinsi Tahun 2022

No	Provinsi	Status Kesehatan Hewan
1	Papua	93,5
2	Kalimantan Timur	80,0
3	Bangka Belitung	78,5
4	Lampung	80,0
5	Nusa Tenggara Barat	80,0
6	Kalimantan Barat	89,3
7	Maluku Utara	88,9
8	Bengkulu	88,2
9	Kalimantan Utara	87,1
10	Maluku	86,2
11	Sumatera Selatan	86,0
12	Banten	85,8
13	Papua Barat	82,7
14	DKI Jakarta	82,5
15	Kalimantan Tengah	82,5
16	Kalimantan Selatan	82,1
17	Sulawesi Utara	79,5
18	Sulawesi Barat	79,1
19	Jawa Tengah	79,0
20	Jawa Barat	78,6
21	Jambi	78,1
22	Sulawesi Tenggara	78,0
23	Jawa Timur	77,7
24	Nusa Tenggara Timur	77,2
25	Sumatera Utara	77,1
26	Kepulauan Riau	76,9
27	DI Yogyakarta	76,8
28	Sulawesi Tengah	76,2
29	Bali	78,5
30	Sumatera Barat	73,1
31	Sulawesi Selatan	71,8
32	Riau	70,0
33	Aceh	70,8
34	Gorontalo	67,9
	Rata-rata	80,0

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Tahun 2022

Tabel Status Kesehatan Hewan Per Penyakit Tahun 2022

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH		AKH
		TARGET PENGENDALIAN	KAB/KOTA TERKENDALI	
1	<i>Rabies</i>	156	120	76,9
2	<i>Anthrax</i>	114	99	86,8
3	<i>Brucellosis</i>	254	221	87,0
4	<i>Avian Influenza</i>	260	188	72,3
5	<i>Classical Swine Fever (Hog Cholera)</i>	53	47	88,7
6	<i>African Swine Fever (ASF)</i>	38	20	52,6
7	<i>Lumpy Skin Disease</i>	38	20	52,6
8	Penyakit Mulut dan Kuku	314	267	85,0
		1.227	982	80,0

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, 2022

Lampiran 9. Rincian Surveillans PHMS Tahun 2022 pada UPT Veteriner Lingkup Ditjen PKH

No	Satker	Volume	Realisasi	%
1	Balai Besar Veteriner Denpasar	50.160	64.655	128,89
2	Balai Besar Veteriner Maros dan Loka Veteriner Papua	50.787	57.773	113,75
3	Balai Besar Veteriner Wates	110.190	120.483	109,34
4	Balai Veteriner Bukittinggi	32.765	36.323	110,85
5	Balai Veteriner Lampung	49.724	59.724	120,11
6	Balai Veteriner Banjarbaru	43.745	54.592	124,79
7	Balai Veteriner Medan	43.680	60.932	139,49
8	Balai Veteriner Subang	63.611	73.777	115,98
9	Pusat Veteriner Farma Surabaya	11.100	15.821	142,53
	Jumlah	456.514	544.080	119,38

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, 2022

Lampiran 10. Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Penerima	Lokasi
1	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Sido Rukun	Desa Margodadi, RT 009 RW 004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung
2	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Tiga Putri	Desa Tawangsari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
3	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Kandang Mukti	Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
4	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Genting Makmur Jaya	Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
5	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Bahagia Sejahtera	Desa Tamijajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
6	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Awar Awar Sejahtera	Desa Awar-awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
7	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Sepakat	Desa Tangga, Kecamatan Monto, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat
8	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Hisdi	Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
9	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Bersaudara	Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
10	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Alerang I	Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
11	Sarana Pakan Olahan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Ayam Mandiri Efrata	Desa Marakiri, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
12	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Sawah Haseum	Desa Sukamenak, Kec. Bantarujeg, Kab. Majalengka, Jawa Barat
13	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Harapan Sejahtera I	Desa Banggala Mulya, Kec. Kalijati, Subang, Jawa Barat
14	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Karya Mandiri	Desa Pekon Suka Banjar, Kec. Ngambur, Kab. Pesisir Barat, Lampung
15	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Sabana Mandiri	Desa Sukatani, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Banten
16	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Arum Jaya	Desa Wanakarta, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang, Banten
17	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Kendal Karet	Desa Sindang Panon, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang, Banten
18	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Karya Alam	Desa Dandang, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
19	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Fajar Sejahtera	Desa Ancol Pasit, Kec. Jambe, Kab. Tangerang, Banten
20	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Cihurang	Desa Mandala, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang, Banten
21	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Flamboyan	Desa Tanggulaingin, kec. Montong, Kab. Tuban, Jawa Timur
22	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Suloyo Gandring	Desa Wolutengah, Kec. Gandring, Kab. Tuban, Jawa Timur
23	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Makaryo	Desa Waleran, Kec. Grabagan, kab. Tuban, Jawa Timur
24	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Tanjung Sari	Desa Tanjung Harjo, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
25	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Lembu Jaya	Desa Tangir, Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
26	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Batu Bangke Mandiri	Desa Cendi Manik, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, NTB
27	Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Titiq Sama Guna	Desa Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, NTB
28	Container Lapangan	135 Unit	34 provinsi	Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan keswan
29	Container Depo N2 Cair	53 Unit	34 provinsi	Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan keswan
30	Container Depo Semen	62 Unit	34 provinsi	Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan keswan
31	Prasarana RPH-R Gowa	1 Unit	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
32	Prasarana Tempat Pemotongan Hewan Kurban	1 Unit	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
33	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1 Unit	Balai Besar Veteriner Denpasar	Balai Besar Veteriner Denpasar
34	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1 Unit	Balai Veteriner Banjarbaru	Balai Veteriner Banjarbaru
35	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1 Unit	BPMSPH Bogor	BPMSPH Bogor
36	Prasarana RPH-R Gowa	1 Unit	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
37	Sarana (Peralatan) RPHR Kota Bogor	1 Unit	Kota Bogor, Jawa Barat	Kota Bogor, Jawa Barat
38	Sarana (Peralatan) RPHR Kentungan	1 Unit	Kab. Sleman, DIY	Kab. Sleman, DIY
39	Prasarana Tempat Pemotongan Hewan Kurban	1 Unit	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
40	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Medan	Bvet Medan
41	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Bukittinggi	Bvet Bukittinggi
42	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Bandar Lampung	Bvet Bandar Lampung
43	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Banjarbaru	Bvet Banjarbaru
44	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Subang	Bvet Subang
45	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Wates	BBVet Wates
46	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Maros	BBVet Maros
47	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Denpasar	BBVet Denpasar

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, 2022

Lampiran 11. Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

No	Nama Sarana Prasarana	Kelompok	Alamat	(Termanfaatkan / Belum Termanfaatkan*)
1	Sarana Pengolahan Telur	Kelompok Temak Itik Melati	Jalan Pangkalan RT 003 RW 015 Desa Cibodas, Kec. Solokan Jeruk, Bandung	Termanfaatkan
2	Prasarana Pengolahan Telur	Kelompok Temak Itik Melati	Jalan Pangkalan RT 003 RW 015 Desa Cibodas, Kec. Solokan Jeruk, Bandung	Termanfaatkan
3	Sarana Pengolahan Susu	Kelompok Saung Yogurt	Kp. Sukamanis, Kel. Sukasukur, Kec. Cisayong, Tasikmalaya	Termanfaatkan
4	Prasarana Pengolahan Susu	Kelompok Saung Yogurt	Kp. Sukamanis, Kel. Sukasukur, Kec. Cisayong, Tasikmalaya	Termanfaatkan
5	Sarana Pasar Temak	UPTD Pasar Hewan Tanjungsari	Jln Pamegarsari, Ds. Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang	Termanfaatkan
6	Prasarana Pasar Temak	UPTD Pasar Hewan Tanjungsari	Jln Pamegarsari, Ds. Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang	Termanfaatkan
7	Sarana Pengolahan Susu	Gapoktan Tri Manunggal	Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo	Termanfaatkan
8	Prasarana Pengolahan Susu	Gapoktan Tri Manunggal	Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo	Termanfaatkan
9	Sarana Pasar Temak	Pasar Temak Ambarketawang	Jln Wates Km 6, Ambarketawang, Gamping, Sleman	Termanfaatkan
10	Prasarana Pasar Temak	Pasar Temak Ambarketawang	Jln Wates Km 6, Ambarketawang, Gamping, Sleman	Termanfaatkan
11	Sarana Pengolahan Susu	Kelompok Talago Sakato	Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2 X II Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman	Termanfaatkan
12	Prasarana Pengolahan Susu	Kelompok Talago Sakato	Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2 X II Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman	Termanfaatkan
13	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Kelompok Mutiara	Jorong Koto Panjang Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya	Termanfaatkan
14	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Kelompok Mutiara	Jorong Koto Panjang Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya	Termanfaatkan
15	Sarana Pasar Temak	UPTD RPH Pasar Temak Payakumbuh	Jln. Panglima Polim Kel. Koto Panjang Puyubusung Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh	Termanfaatkan
16	Prasarana Pasar Temak	UPTD RPH Pasar Temak Payakumbuh	Jln. Panglima Polim Kel. Koto Panjang Puyubusung Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh	Termanfaatkan
17	Sarana Pengolahan Pupuk Organik	Kelompok Mekar Jaya	Dusun Daya Mumi, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo	Termanfaatkan
18	Prasarana Pengolahan Pupuk Organik	Kelompok Mekar Jaya	Dusun Daya Mumi, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo	Termanfaatkan
19	Sarana Pengolahan Daging	KWT. Sekar Transad	Kampung Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab Lampung Tengah	Termanfaatkan
20	Prasarana Pengolahan Daging	KWT.Sekar Transad	Kampung Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab Lampung Tengah	Termanfaatkan
21	Prasarana Pengolahan Telur	Sehati	Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan	Termanfaatkan
22	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	KT. Bina Tani Bontang	Jln. Arief Rahman Hakim RT.40, Kelurahan Belimbing Kec Bontang Barat	Termanfaatkan
23	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	KT. Bina Tani Bontang	Jln. Arief Rahman Hakim RT.40, Kelurahan Belimbing Kec Bontang Barat	Termanfaatkan
24	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	KTT SPR Ridho Ilahi	Jl. Peternakan Rakyat Dusun Tanak Mira Daya Desa Wanasaba Lauk Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur	Termanfaatkan
25	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	KTT SPR Ridho Ilahi	Jl. Peternakan Rakyat Dusun Tanak Mira Daya Desa Wanasaba Lauk Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur	Termanfaatkan
26	Sarana Pasar Temak	Pasar Hewan Masbagik	Kabupaten Lombok Timur	Termanfaatkan
27	Prasarana Pasar Temak	Pasar Hewan Masbagik	Kabupaten Lombok Timur	Termanfaatkan
28	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Kelompok Sinar Bintunan II	Desa Lubuk Banyau, Kec Padang Jaya Bengkulu Utara	Termanfaatkan
29	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Kelompok Sinar Bintunan II	Desa Lubuk Banyau, Kec Padang Jaya Bengkulu Utara	Termanfaatkan
30	Sarana Pasar Temak	Pasar Temak Lili	Kelurahan Camplong Kec. Fatuleu Kab Kupang NTT	Termanfaatkan
31	Prasarana Pasar Temak	Pasar Temak Lili	Kelurahan Camplong Kec. Fatuleu Kab Kupang NTT	Termanfaatkan
32	Prasarana Tata Niaga	Holding Ground	Jln Timor Raya KM 07 Oesapa Kupang NTT	Belum Termanfaatkan
33	Sarana Pasar Temak	Pasar Temak Wonoasih Kota Probolinggo	Jl. Kyai Wira'No 1 Kel Jebreg Kidul Kec Wonoasih Kota Probolinggo	Termanfaatkan
34	Prasarana Pasar Temak	Pasar Temak Wonoasih Kota Probolinggo	Jl. Kyai Wira'No 1 Kel Jebreg Kidul Kec Wonoasih Kota Probolinggo	Termanfaatkan
35	Sarana Pasar Temak	Pasar Temak	Muntlan Kabupaten Magelang	Termanfaatkan
36	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	Coppo Bulu	Desa Bulu, Kec. Panca, Kab. Sidrap	Belum Optimal
37	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	DKS Bina Temak Sejahtera	Desa Bulu Wattang, Kec. Rijang, Kab. Sidrap	Termanfaatkan
38	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	Masumpulooe	Desa Cipo Takari, Kec. Rijang, Kab. Sidrap	Termanfaatkan
39	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	Padomae Jaya	Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap	Belum Optimal
40	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	Mario Marenu II	Desa Mario, Kec. Kulo, Kab. Sidrap	Termanfaatkan
41	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KIT Ngudi Tentrem	Desa Beji, Kec. Andong, Kab Boyolali	Termanfaatkan
42	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Tani Subur	Desa Kedungdowo, Kec. Andong, Kab. Boyolali	Termanfaatkan
43	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Tani Subur	Desa Kadipaten, Kec. Andong, Kab. Boyolali	Termanfaatkan
44	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Rukun	Desa Pakang, Kec. Andong, Kab. Boyolali	Termanfaatkan
45	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Gapoktan Margo Rukun	Desa Kunti, Kec. Andong, Kab. Boyolali	Termanfaatkan
46	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Sakalam Jaya	Desa Sarampad, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur	Belum Optimal
47	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Sani Tani	Desa Wangunjaya, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur	Termanfaatkan
48	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Sumber Arum	Desa Talaga, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur	Termanfaatkan
49	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Gede Harapan	Desa Gekbrong, Kec. Gekbrong, Kab. Cianjur	Termanfaatkan
50	Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	KTT Makmur	Desa Cikahujipan, Kec. Gekbrong, Kab. Cianjur	Belum Optimal
51	Sarana Pengolahan Daging	Fapel Unhas	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar	Termanfaatkan

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, 2022

Lampiran 12. Data Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017-2021


No	Komoditas/Commodities	Volume (Ton)/Volume (Ton)					Nilai (000 USD)/Value (000 USD)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	Ternak/Livestock	29.176,85	28.998,74	31.279,48	33.147,80	25.759,98	63.986,61	60.949,98	65.903,81	80.415,84	61.983,07
1	Kuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Keledai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kerbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Babi	28.711,95	27.862,64	30.721,54	32.751,11	25.167,46	59.884,05	55.930,14	60.684,54	75.489,69	55.854,93
6	Biri-biri	-	81,50	21,00	176,75	250,45	-	346,77	97,70	685,69	959,24
7	Kambing	6,24	11,26	15,12	4,92	136,22	11,54	128,95	118,94	19,15	381,12
8	Unggas	0,22	3,76	11,70	22,32	17,48	0,93	67,48	183,18	285,58	216,35
9	Lebah hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Binatang hidup lainnya	458,45	439,60	510,12	192,42	187,71	4.089,09	4.476,59	4.819,44	3.935,73	4.451,43
B.	Hasil Ternak/Livestock Product	168.988,09	166.472,98	186.802,04	213.904,92	219.973,34	458.873,64	495.803,47	646.977,58	889.136,06	894.873,20
1	Daging	11.963,90	17.933,85	35.351,53	41.943,98	50.095,16	41.587,61	65.644,79	141.718,85	165.991,80	164.749,43
a	Sapi	28,64	13,66	23,69	27,57	69,88	82,41	35,87	53,82	53,84	260,97
b	Babi	0,61	28,28	2,53	0,47	13,54	10,10	108,68	17,91	0,38	52,79
c	Kambing/domba	0,03	-	1,12	0,41	0,18	0,74	-	6,56	3,44	1,14
d	Kuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Unggas	10.420,25	16.532,01	34.388,51	41.578,15	49.495,35	37.124,47	61.189,77	139.406,60	164.947,38	160.453,19
f	Jeroan sapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Jeroan Non sapi	-	-	8,00	-	-	-	-	2,76	-	-
h	Daging lainnya	1.514,37	1.359,90	927,69	337,38	516,22	4.369,89	4.310,47	2.231,21	986,76	3.981,33
2	Susu	33.870,56	35.227,36	37.342,47	43.912,65	47.170,20	53.635,09	58.283,27	68.267,31	84.208,64	94.969,47
a	Susu dan kepala susu	27.174,17	23.129,06	21.421,45	25.462,75	24.923,18	40.505,88	39.307,85	45.238,27	59.656,72	62.999,00
b	Yoghurt	796,85	2.046,11	2.741,42	5.109,08	5.430,79	795,67	2.541,19	3.566,11	5.521,66	6.197,40
c	Mentega	4.539,63	8.893,14	11.928,88	11.222,20	14.556,15	8.116,04	12.821,27	15.405,59	11.847,73	17.928,81
d	Keju	1.359,90	1.159,05	1.250,72	2.118,62	2.260,09	4.217,49	3.612,96	4.057,34	7.182,54	7.844,26
3	Telur	9,93	2,03	7,33	4,27	4,10	3,10	6,78	51,73	57,79	55,20
4	Madu	370,45	201,15	273,27	213,63	491,26	1.730,02	909,87	1.063,82	462,12	1.178,49
5	Lemak	106.419,28	111.748,74	112.182,74	126.456,50	119.964,22	81.361,60	80.005,26	71.339,77	91.532,29	116.221,57
6	Makanan-olahan	45,14	24,86	47,02	39,87	56,98	82,98	89,59	295,72	177,94	141,39
7	Sarang burung walet	1.286,72	1.291,95	1.258,78	1.312,51	1.505,53	280.284,27	290.559,01	363.947,63	540.361,65	517.025,56
8	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan	0,41	0,26	17,48	15,48	63,54	159,67	114,06	253,83	325,86	516,67
9	Gelatin	21,69	42,80	21,41	6,04	22,33	29,31	190,86	38,93	17,97	15,42
C.	Produk Hewan Non Pangan / Non-food Animal Products	28.884,77	45.782,04	89.719,82	118.814,18	181.446,22	90.283,08	96.957,25	187.076,29	194.897,88	170.270,81
1	Bulu	1.957,09	2.327,20	2.809,70	1.506,67	1.897,17	3.204,13	4.717,71	7.024,48	1.943,95	3.641,14
2	Tulang dan Tanduk	522,55	443,96	568,87	594,17	908,34	353,03	220,40	298,90	1.367,17	2.276,35
3	Kulit	2.966,08	3.822,85	4.425,41	3.783,77	4.337,03	76.750,01	74.065,83	74.339,36	49.746,38	63.329,17
4	Wol	1,03	6,80	0,07	0,04	2,14	1,75	16,36	0,14	0,78	65,98
5	Pakan Hewan	21.429,04	39.119,71	81.849,80	110.601,20	124.241,62	9.914,49	19.751,09	54.830,96	81.432,17	100.894,24
6	Ulat sutera	8,98	11,52	59,97	28,32	59,92	59,67	185,85	582,45	207,20	64,03
D.	Obat Hewan/Veterinary Drugs	276.804,03	308.273,54	192.906,07	146.219,41	188.251,78	278.216,82	284.467,75	179.825,69	198.321,90	172.865,61
1	Vaksin untuk obat hewan	518,23	667,64	591,03	652,06	646,42	10.024,17	12.279,51	12.960,07	15.485,54	17.165,58
2	Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner	-	-	-	0,15	0,03	-	-	-	1,80	76,42
3	Lain-lain (Premix, Lisin, dll)	275.785,80	302.605,89	192.315,04	145.567,20	157.605,30	268.191,65	272.218,25	166.665,62	120.834,56	155.613,61
E.	Benih/Bibit/Livestock Seeds	16.846,48	19.884,98	16.213,19	17.406,65	20.046,78	8.737,74	8.766,77	8.903,38	8.241,71	6.604,92
1	Telur yang difertili untuk inkubasi dari unggas	376,19	46,07	166,71	73,57	47,88	2.283,88	769,39	1.763,21	1.301,64	870,80
2	Telur yang difertili untuk inkubasi dari bebek	-	-	1,74	0,16	0,14	-	-	1,89	0,18	0,04
3	Telur yang difertili untuk inkubasi dari selain unggas dan bebek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mani dan Produk hewani lainnya tidak dirinci	16.270,26	19.618,91	15.044,75	17.334,82	19.997,72	4.453,86	5.997,38	4.538,24	4.939,88	5.734,08
F.	Jumlah/Total	808.000,19	868.642,28	815.614,81	827.194,88	854.876,36	898.086,89	946.976,18	1.085.896,71	1.240.813,16	1.306.487,71

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 13. Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

**HASIL LKE PMPRB KEMENTERIAN PERTANIAN DAN
HASIL LKE PMPRB ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2021**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT PUSAT	NILAI PUSAT	BOBOT UNIT	BOBOT UNIT										
					SETJEN	ITJEN	TP	HORTI	PKH	BUN	PSP	SDM	BARANTAN	BKP	LITBANG
A	Pengungkit/Proses (60 %)	50,00	49,22	36,30	34,72	34,53	34,23	33,78	35,73	35,00	35,63	34,95	34,16	35,36	33,92
	I. Pemenuhan (20 %)	20,00	20,00	14,60	14,41	14,04	14,39	14,02	14,60	14,00	14,44	14,45	14,00	14,60	13,23
	1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,65
	2. Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	3,00	2,00	2,00	1,49	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,95	1,80	2,00	1,95
	4. Penataan Tatalaksana	2,50	2,50	1,00	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	1,00	1,00
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	3,00	1,40	1,40	1,40	1,31	1,37	1,40	1,40	1,40	1,40	1,31	1,40	1,37
	6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	7. Penguatan Pengawasan	2,50	2,50	2,20	2,09	2,20	2,08	2,18	2,20	1,95	2,12	2,20	2,04	2,20	2,02
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50	2,50	2,42	2,48	2,50	2,17	2,50	2,40	2,42	2,40	2,41	2,50	2,24
	II. Hasil Antara Area Perubahan														
	III. Reform (30%)	30,00	29,22	21,70	20,31	20,48	19,84	19,77	21,13	21,00	21,19	20,50	20,16	20,76	20,70
	1. Manajemen Perubahan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,75	2,48	3,00	3,00	3,00	2,42	3,00	3,00	3,00
	2. Deregulasi Kebijakan	3,00	2,83	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	4. Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,25	3,75	3,75	3,75	3,75	3,25	3,75	3,25
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	4,30	2,00	2,00	1,69	1,75	2,00	2,00	1,75	2,00	1,50	1,89	1,38	1,92
	6. Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,43	3,75	3,34	3,25	3,12	2,84	3,18	3,30	3,25	3,63	3,32	3,44	3,34
	7. Penguatan Pengawasan	3,75	3,68	1,95	1,93	1,95	1,72	1,95	1,95	1,95	1,94	1,95	1,95	1,95	1,94
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	3,75	2,79	3,34	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75



**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,**

Sumber: Inspektorat Jenderal, Kementan, 2022

Lampiran 14. Rincian Norma Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Ditjen PKH Tahun 2022

A. NSPK Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Optimalisasi Reproduksi
2. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
3. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah
4. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
5. Pengembangan Mutu Genetik Sapi Perah

B. NSPK Direktorat Pakan

1. Kepdirjen No 11075/Kpts/PK.320/F/10/2022 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan pakan dalam keadaan tertentu darurat PMK
2. Pemanfaatan jagung lokal oleh industri pakan, dan Perkembangan pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT)
3. SNI Pakan
4. Masterplan implementasi Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit

C. NSPK Direktorat Kesehatan Hewan

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 738/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Jenis Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Diseases*).
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS/PK.300/M/11/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 738/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Jenis Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Diseases*).
3. Kiatvetindo PMK
4. Kiatvetindo LSD
5. Revisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/2013
6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pengawasan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya didalam wilayah NKRI
7. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Minimal

D. NSPK Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan

1. SOP Pencegahan Penyebaran PMK di Pasar Ternak dan Angkutan Darat, Laut, dan Udara
2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan.
3. Rancangan *Roadmap*/Peta Jalan Pengembangan Persusuan Organik Nasional Tahun 2022-2026

E. NSPK Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Pengawasan Keamanan Produk Hewan
2. Sanitary dan Standardisasi
3. Higiene, Sanitasi dan Penerapan
4. Kesejahteraan Hewan
5. *Zoonosis*
6. Pengendalian Pematangan Betina Produktif

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 15. Manual IKU Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Lampiran 9

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor

Tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

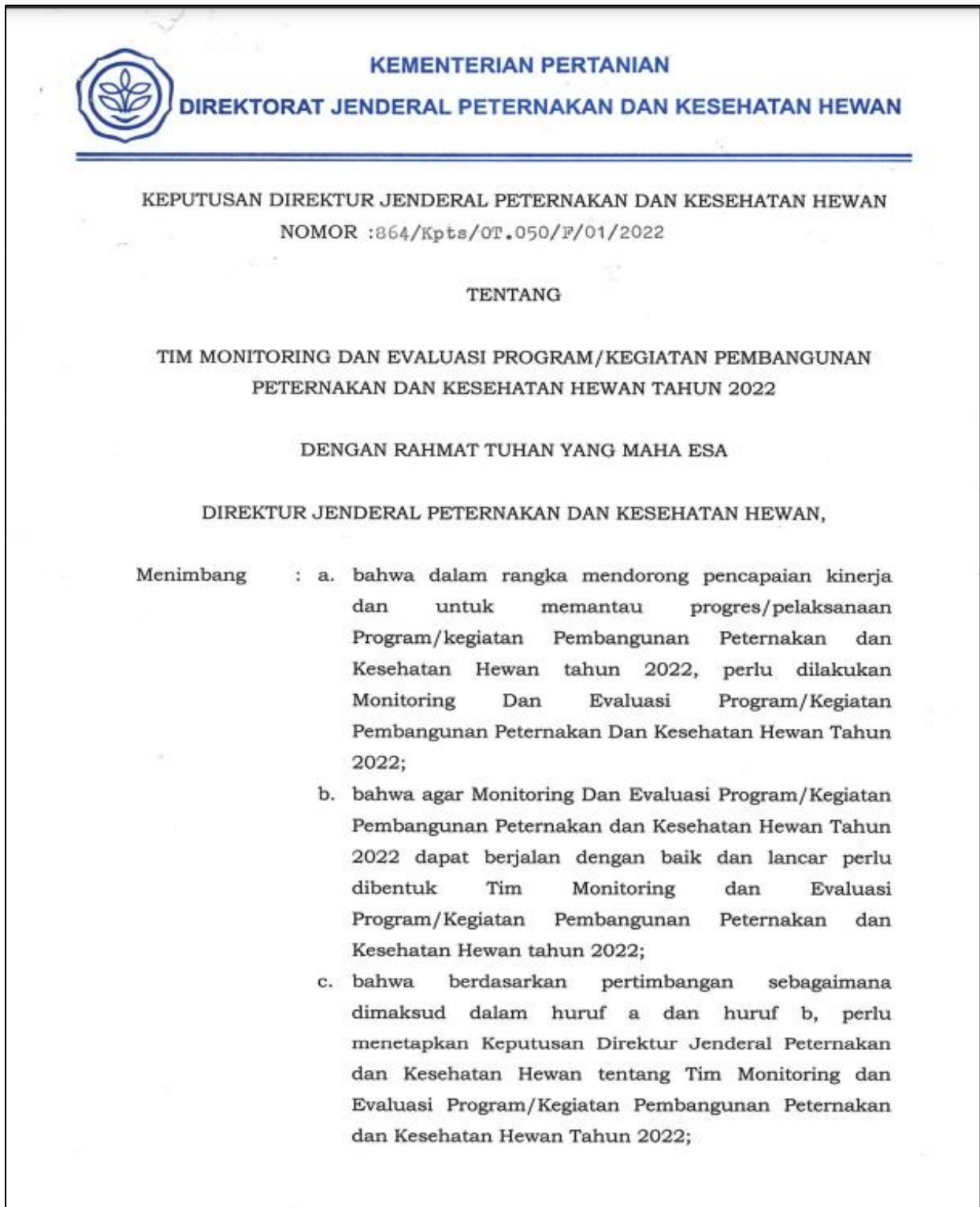
Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
UNIT ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Nama Organisasi :
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Tugas :
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 16.SK Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022



Sumber: Ditjen PKH, 2022

Lampiran 17. Standar Operasional Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Program dan/atau Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Monev TA. 20

22



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 4745/KPTS/HK.160/F/04/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target program dan/atau kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022 perlunya pemantauan dan evaluasi agar memberikan peran penting untuk perbaikan pelaksanaan maupun perencanaan program dan/atau kegiatan dimaksud;

b. bahwa dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Petugas Penanggung Jawab pemantauan dan evaluasi, Pengelola dan Pelaksana program/kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan dan Evaluasi Program dan/atau Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Sumber: Ditjen PKH, 2022